



Sejarah Perkembangan Muhammadiyah

Aceh

Direktorat
Idayaan

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
2005

**SEJARAH PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH
DI ACEH**

297.45 811

Oleh:
Sri Waryanti
Seno
Indriani

Penyunting:
Rusdi Sufi
Aslam Nur

**BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH**

2005

Hak Cipta 2005, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan foto copy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan pertama, 2005

Penulis :

Sri Waryanti

Seno

Indriani

Penyunting:

Rusdi Sufi

Aslam Nur

Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh

ISBN: 979-9164-59-1

Hak Penerbitan pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai
Tradisional Banda Aceh

Setting/Layout : Agus Budi Wibowo

Desain Sampul : Titit Lestari

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Jln. Tgk. Chik Kutakarang No. 3

Komplek Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam

Banda Aceh Telp. (0651) 7410455

SAMBUTAN

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan pemurnian pemikiran keislaman yang bergerak dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan sudah berumur hampir satu abad dan telah melewati berbagai pasang surut dalam perkembangannya. Dalam rentang waktu sejak berdirinya hingga sekarang, banyak kritikan dilontarkan, namun ia tetap adaptif dan resistan berpegang pada garis perjuangannya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.

Mengingat begitu besar peran dan kiprah Muhammadiyah di dalam kehidupan masyarakat, maka Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh mendokumentasikan dalam sebuah buku, khususnya sejarah perkembangan Muhammadiyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Buku ini merupakan salah satu upaya lembaga ini untuk ikut memberikan pembelajaran tentang kehidupan sebuah organisasi yang tumbuh dalam masyarakat sehingga dapat dipetik pelajaran darinya.

Setelah selesainya penelitian yang dilanjutkan dengan penerbitan ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. Kepada penulis, teruskan berkarya dan menghasilkan buku-buku yang lebih berbobot di masa yang akan datang. Mohon maaf kalau buku yang sampai di tangan pembaca ada kekurangan di sana sini.

Banda Aceh, September 2005
Kepala Balai Kajian Sejarah dan
Nilai Tradisional Banda Aceh



Drs. H. Shabri A.
NIP. 131412260

DAFTAR ISI

Sambutan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Manfaat Penulisan.....	5
F. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II MUHAMMADIYAH DALAM GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM DI ACEH.....	7
A. Masa Kolonial Belanda.....	7
B. Masa Pendudukan Jepang	39
BAB III KIPRAH MUHAMMADIYAH DALAM MENGISI PEMBANGUNAN DI ACEH.....	44
A. Dalam Bidang Pendidikan	44
B. Dalam Bidang Politik	63
C. Dalam Bidang Agama.....	83

BAB IV EKSISTENSI MUHAMMADIYAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ACEH	103
BAB V KESIMPULAN	123
DAFTAR PUSTAKA	127
Daftar Informan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan pemurnian¹ pemikiran keislaman yang bergerak dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan sudah berumur cukup dewasa dan telah melewati berbagai pasang surut dalam perkembangannya. Dalam rentang waktu sejak berdirinya hingga sekarang, banyak kritikan dilontarkan, namun ia tetap adaptif dan resistan berpegang pada garis perjuangannya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan yang *amal oriented* pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang lahir dalam lingkungan budaya dunia ketiga. Rakyat dunia ketiga pada umumnya ditandai oleh adanya tiga tantangan, yaitu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, tetapi pada

¹Alfian, "Peranan Muhammadiyah dalam Pergerakan Nasional dan Kemungkinan Masa Depan", dalam *Cita dan Citra Muhammadiyah*. (Jakarta: Panjimas, 1981). hlm 73.

kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan tidak mempunyai lembaga-lembaga modern dalam hal pendanaan, meskipun mayoritas kondisi umat Islam adalah kelompok minoritas.²

Oleh karena itu, usaha mencerdaskan umat melalui kegiatan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat ditunda-tunda. Perbaikan mutu pendidikan adalah langkah merubah pola pemikiran, cara berbuat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi umat yang selalu berada dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan bermental minoritas tampaknya telah menempatkan Islam sebagai agama yang belum dapat mengaktualisasikan dirinya sebagaimana yang diinginkan.

Muhammadiyah dengan jumlah anggota dan partisipasi yang boleh dikatakan cukup besar perlu memantapkan jati dirinya secara prima agar berbagai tantangan dapat diubah menjadi peluang. Mengubah tantangan menjadi peluang adalah makna tajdid dari sebuah gerakan pembaharuan. Peluang-peluang sejenis hendaklah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan agama, bangsa dan negara serta dijadikan tulang punggung menghadapi tantangan.

Kebangkitan ilmu dan amal di kalangan Muhammadiyah khususnya di abad kelima belas Hijriah diharapkan mampu memandang dan menatap realitas sosial secara tajam dan dapat memperhitungkan karakteristik secara tepat. Keberadaan kaum intelektual yang berwawasan luas untuk menterjemahkan ajaran-ajaran dasar Islam ke dalam kehidupan nyata sangat dibutuhkan sehingga pemurnian ajaran Islam ke dalam kehidupan keseharian merupakan sebuah keniscayaan.

²Arif Budiman, "Agama, Demokrasi dan Keadilan", dalam *Agama, Demokrasi dan Keadilan*. (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 22.

Pada masa awal dilancarkannya pembaharuan di Aceh, ada tiga aspek yang menjadi sasaran pembaharuan Muhammadiyah, yaitu sosial kemasyarakatan, pendidikan dan paham keagamaan. Dengan corak pembaharuan yang demikian, Muhammadiyah memulai gerakannya lebih dari 60 tahun yang lalu dan sampai kini corak pembaharuan yang demikian masih tetap menyelimuti organisasi ini.

Dalam kurun waktu yang cukup lama perkembangan Muhammadiyah di Aceh telah diwarnai oleh suatu fenomena yang menarik untuk dikaji. Fenomena tersebut dimulai pada dekade tahun 1930-an di mana gerakan selain bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, keagamaan juga pada gerakan-gerakan politik yang jika dikaji lebih lanjut ternyata berawal dari tataran gagasan dan visi ke-Islaman dan kemanusiaan yang cukup tajam seiring dengan situasi saat ini.

B. Masalah

Sesuai dengan tema yang akan diuraikan, maka masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Aceh ?
2. Apa yang menjadi andil Muhammadiyah dalam pembangunan masyarakat di Aceh?
3. Mengapa organisasi Muhammadiyah di Aceh terlihat sulit berkembang pada semua lapisan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan tentang Perkembangan Muhammadiyah di Aceh bertujuan:

1. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengungkap lebih jelas tentang perkembangan organisasi Muhammadiyah di Aceh
- b) Untuk mengetahui sistem organisasi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah di Aceh
- c) Untuk mengetahui sampai sejauh mana organisasi Muhammadiyah berkiprah di Aceh

2. Tujuan Umum

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan khalayak umum, khususnya para pembaca mengenai sejarah Muhammadiyah di Aceh.
- b) Dengan hasil penelitian ini diharapkan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh akan dapat menyediakan data dan informasi yang membahas tentang Sejarah Muhammadiyah di Aceh.
- c) Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk penerapan syariat Islam di Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengungkapan dari hasil penelitian ini adalah mengenai organisasi Muhammadiyah yang berkembang di Aceh. Sesuai dengan judul yang diambil, maka ruang lingkup temporalnya sejak organisasi Muhammadiyah itu muncul di Aceh sampai sekarang yaitu pada tahun 1923 - 2005. Sedangkan ruang lingkup spasialnya meliputi seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

E. Manfaat Penulisan

Penelitian dan penerbitan ini secara garis besar mempunyai tiga manfaat. Pertama, manfaat akademis, yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah, khususnya berkaitan dengan sejarah Muhammadiyah di Aceh. Dengan dibahasnya sejarah Muhammadiyah di Aceh, maka pengetahuan para pembaca akan bertambah. Kedua, manfaat untuk membina generasi penerus agar menjadi generasi yang cinta organisasi Muhammadiyah dan dapat mengisi syariat Islam di Aceh melalui ilmu yang dikembangkan di Muhammadiyah. Dengan membaca sejarah Muhammadiyah di Aceh, maka kita akan tahu perkembangan organisasi tersebut khususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan yang sangat relevan dengan diberlakukannya syariat Islam di Aceh

F. Metode Penelitian

Penulisan sejarah selalu berangkat dari jejak-jejak peninggalan atau rekaman dan ingatan tentang peristiwa masa lampau, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Bekas peninggalan atau rekaman masa lalu tersebut dapat disebut sebagai sumber sejarah. Oleh karena itu, para peneliti dan penulis sejarah menggunakan sumber-sumber sejarah tersebut sebagai bahan untuk diolah menjadi kisah sejarah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka proses untuk menghasilkan sejarah sebagai kisah, penulis harus berpegang pada pendekatan sejarah yang multi disipliner. Dengan pendekatan sejarah yang multi disipliner itulah, maka peristiwa sejarah dapat diungkapkan kembali secara lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan masalah yang dibahas,

maka metode yang akan ditempuh adalah melalui metode heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

G. Sistematika Penulisan

Buku tentang sejarah perkembangan Muhammadiyah di Aceh yang ada di tangan pembaca terbagi kepada lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi tentang Muhammadiyah dalam gerakan pembaharuan Islam di Aceh pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang yang perinciannya meliputi gerakan pembaharuan Muhammadiyah pada tahun 1927 - 1950, corak dan macam pembaharuan dalam gerakan Muhammadiyah dan peranan Muhammadiyah dalam perubahan sosial di Aceh. Bab tiga membicarakan tentang kiprah Muhammadiyah dalam mengisi pembangunan di Aceh yang meliputi pembangunan di bidang pendidikan, politik, keagamaan dan ekonomi. Bab empat mengungkap tentang keberadaan Muhammadiyah di Aceh dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Bab lima sebagai bab penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dari kesimpulan ini penulis memberikan saran tentang kemungkinan langkah-langkah Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II

MUHAMMADIYAH DALAM GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM DI ACEH

A. Masa Kolonial Belanda

Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan Islam yang terbesar di Indonesia. Menurut Solichin Salam, seorang yang banyak menulis tentang Muhammadiyah, terdapat faktor intern dan faktor ekstern yang mendorong lahirnya gerakan Muhammadiyah.¹ Yang termasuk dalam faktor intern adalah:

1. Kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku.
2. Keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan dan kemunduran.
3. Tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat.

¹Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 23-25.

4. Lembaga pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik, dan sistem pesantren yang sudah sangat kuno.

Sedangkan faktor-faktor ekstern meliputi:

1. Adanya kolonialisme Belanda di Indonesia.
2. Kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia
3. Sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman.
4. Adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda, demi kepentingan politik kolonialnya.

Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330) oleh K.H.A Dahlan di Yogyakarta. Pada Mukaddimah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah terdapat pokok-pokok pikiran K.H.A. Dahlan, yang kemudian dirumuskan oleh K.H. Ki Bagus Hadikusuma (menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953) dengan disertai kutipan ayat-ayat Al-Qur'an. Dari mukaddimah ini ternyata dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah selanjutnya. Setelah K.H.A. Dahlan dan kawan-kawannya di Yogyakarta meresmikan berdirinya "Mohammadiyah" (nama mula-mula) diajukanlah surat pendaftaran Muhammadiyah sebagai badan hukum (*recht persoon*) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia tertanggal 20 Agustus 1912. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh K.H.A. Dahlan dan H. Abudullah Sirat. Pada tanggal 15 Juni 1914 barulah turun jawaban dari pemerintah Hindia Belanda tentang keputusan persetujuan Muhammadiyah sebagai badan

hukum. Anggaran Dasar (*Statuten*) Muhammadiyah yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal (*Gouvernement Besluit*) No. 81 tanggal 22 Agustus 1914 dengan jangka waktu pendirian selama 29 tahun diubah dengan *Gouvernement Besluit* No. 40 tanggal 16 Agustus 1920. Keputusan itu lantas diubah lagi dengan *Gouvernement Besluit* No. 36 tanggal 2 September 1921. *Statuten* ini berlaku selama 29 tahun, karena sesuai ketentuan pada masa pemerintah Hindia Belanda, kalau lebih dari 30 tahun harus memenuhi ketentuan undang-undang dan disahkan parlemen di negeri Belanda. Jika di bawah 30 tahun, izin cukup diberikan oleh Gubernur Jenderal sesuai *staatsblad* (Lembaran Negara) 1870 No. 64.²

Setelah beberapa tahun berdiri, barulah Muhammadiyah mengembangkan sayapnya ke daerah-daerah lain di luar pulau Jawa. Untuk wilayah Sumatera, yang menjadi sentral pengembang Muhammadiyah adalah Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat kemudian disebar kader-kader Muhammadiyah ke berbagai pelosok di Sumatera, seperti ke Sumatera Selatan, Bengkulu, Tapanuli, Sumatera Timur, termasuk juga ke daerah Aceh, bahkan juga ke Kalimantan dan Sulawesi. Sehingga timbul ungkapan “Muhammadiyah lahir di Jawa, Minangkabau yang membesarkannya”. Oleh karena Muhammadiyah lahir pada zaman penjajahan Belanda, maka perkembangan Muhammadiyah tidak selalu berjalan mulus. Pemerintah Belanda amat sensitif terhadap segala bentuk kegiatan atau organisasi yang secara sengaja atau tidak sengaja mengobarkan semangat kebangsaan.³

²“Lahir di Yogyakarta, Minangkabau Membesarkannya”, dalam *Kompas*, Jum’at, 14 Desember 1990, hlm. 12-13

³ *Ibid.*,

Gagasan-gagasan tentang Muhammadiyah sudah muncul di Aceh, khususnya di Kutaradja pada tahun 1923. Orang yang mula-mula memperkenalkan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam ialah Djajasoekarta. Beliau adalah seorang pegawai pemerintah Belanda asal Sunda yang selalu ditugaskan oleh pemerintah untuk berkunjung ke daerah-daerah guna melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Djajasoekarta menyampaikan gagasan-gagasan Muhammadiyah pertama kalinya di mushalla yang terletak di tepi jalan di Seutui, Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Gagasan-gagasan yang disampaikan mendapat tanggapan dan sambutan dari beberapa jemaah terutama dari pegawai pemerintah Belanda yang berasal dari Jawa dan Sumatera Barat. Dari mushalla Seutui inilah pemahaman Muhammadiyah mulai menyebar, pada mulanya di dalam kota Kutaraja kemudian merambat ke Sigli (Pidie) dan Sabang. Dengan demikian Djajasoekarta dianggap sebagai pelopor atau “bapak” Muhammadiyah Aceh. Di Kutaraja, Muhammadiyah tetap stabil berkembang di Kampung Sukaramai, sedangkan di kampung lainnya seperti Keudah dan Lampriek Muhammadiyah timbul tenggelam sama dengan daerah-daerah lainnya.⁴

Meskipun gagasan-gagasan Muhammadiyah telah mulai disemaikan sejak tahun 1923, secara resmi Muhammadiyah baru berdiri pada tahun 1927 di Kutaraja. Rapat pembentukan Muhammadiyah dilakukan di rumah Djajasoekarta di jalan ujung Batee, Seutui. Dalam susunan kepengurusan Muhammadiyah Djajasoekarta terpilih menjadi ketua dan rumah tersebut kemudian diwakafkan kepada Muhammadiyah (sekarang menjadi

⁴Bakhrum Yunus, *Beberapa Catatan tentang Sejarah Awal Muhammadiyah di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perencanaan dan Evaluasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 2

SMU Muhammadiyah).⁵ Pada awal berdirinya, yang menjadi Konsul Muhammadiyah ialah T. Hasan Geulumpang Payong, sedangkan sebagai wakil konsul adalah Nasruddin. Menurut catatan kantor Muhammadiyah terletak di jalan Merduati (kini jalan K.H.A Dahlan, di sekitar SD Muhammadiyah), kemudian baru tempat kegiatan Muhammadiyah meluas ke daerah Taman Siswa dan Punge Blang Cut II. Sesudah itu barulah Muhammadiyah membentangkan sayapnya di daerah-daerah lain di Aceh. Namun demikian penerimaan Muhammadiyah di setiap daerah tidaklah sama, bahkan pada beberapa daerah organisasi Muhammadiyah didirikan sesudah zaman pendudukan Jepang.

Muhammadiyah cepat berkembang seiring dengan perjuangan tokoh-tokoh dan kadernya sehingga maju dengan pesat, khususnya di ibukota kabupaten. Pada masa itu antara pengurus satu dengan yang lainnya selalu melakukan konsolidasi, bermusyawarah untuk meningkatkan amal dan perjuangan. Penyebaran paham Muhammadiyah di daerah Aceh ini dilakukan melalui kunjungan-kunjungan tabligh dan kuliah-kuliah pada tiap-tiap cabang Muhammadiyah. Setelah dirasa cukup mantap langkah selanjutnya adalah memenuhi persyaratan berdirinya cabang organisasi secara formil, yaitu sekolah. Salah satu syarat untuk dapat disahkannya sebuah cabang Muhammadiyah adalah apabila cabang tersebut mempunyai sebuah sekolah menengah Islam seperti tsanawiyah atau yang sederajat. Sedangkan untuk sahnya sebuah ranting harus ada sekolah minimal tingkat SD. Selain amal ibadah di bidang agama dan sosial, tujuan utama Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan pendidikan di bidang pengajaran Islam. Tujuan ini direalisasikan dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam umum dengan sistem

⁵Wawancara dengan Abdul Manaf Meuraxa, Banda Aceh, Selasa, 29 Februari 2002

klasikal berbentuk madrasah dan juga meniru sekolah pemerintah kolonial Belanda.⁶

Pada tahun pertama organisasi ini didirikan secara resmi di Aceh (1927), jumlah anggota Muhammadiyah yang terdaftar secara resmi adalah 102 orang laki-laki dan 52 orang perempuan. Pada akhir tahun 1932 jumlah anggota organisasi ini menjadi 191 orang laki-laki dan 132 orang perempuan. Para anggota tersebut umumnya adalah orang-orang yang berdinasti dalam pemerintahan yang terdiri dari para perantau Minangkabau dan Jawa. Hal ini berkaitan dengan pembawa aliran pembaharuan ini di Aceh yaitu dari golongan pegawai pemerintah Kolonial Belanda. Dengan demikian karena mutasi dan sebab-sebab lain, organisasi ini pernah tidak mempunyai anggota.⁷

Pada tanggal 29 April sampai dengan 2 Mei 1938, perkumpulan Muhammadiyah Aceh di bawah pimpinan konsulnya pada waktu itu (Teuku Cut Hasan Meuraksa) mengadakan suatu konperensi tahunan di kota Idi (Aceh Timur). Konperensi ini menarik perhatian banyak orang dan juga telah menimbulkan kekhawatiran di pihak pemerintah. Oleh karena di antara yang ikut berpidato dalam konperensi tersebut terdapat seorang propogandis Muhammadiyah terkenal saat itu, yaitu Haji

⁶Iriani (Ed), *Peranan Muhammadiyah dalam Sistem Pendidikan Islam di Padang Panjang Tahun 1950-1965* (Jakarta: Depbudpar Ditjen Sejarah dan Purbakala, 2001), hlm. 26-27

⁷Bahrein T. Sugihen, "Muhammadiyah dalam Kultur Keacehan", dalam Zamroni Mashuda, dkk, *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira', 1995), hlm.141-142.

Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) yang datang khusus untuk menghadiri konferensi itu dari Medan⁸

Dalam hal pengembangan organisasi juga untuk melaksanakan berbagai kegiatannya, Muhammadiyah memperoleh dana dari para donatur, kontribusi, anggota biasa, subsidi pemerintah, sumbangan atau lain-lain pemberian serta dari uang sekolah siswa.⁹

A. 1. Kabupaten Aceh Besar

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada tahun 1923 Muhammadiyah diperkenalkan di Kutaraja oleh Djajasoeakarta. Akan tetapi, baru pada tahun 1927 Pengurus Besar mengirimkan utusannya yaitu A.R. Soetan Mansur ke Kutaraja untuk menerangkan azas dan tujuan Muhammadiyah dan seterusnya beliau melanjutkan tugasnya ke Sigli dan Lhok Seumawe. Daya upaya untuk melakukan propaganda ke kampung-kampung tidak dilakukan lagi. Pada tahun 1928 tersebut sesudah Pengurus Besar mengirimkan utusannya M.J. Anies ke Aceh dan kemudian menyelidiki keadaan cabang Kutaraja, maka dengan Surat Ketetapan dari Pengurus Besar pada tanggal 1 Juli 1928 No: 129/A. Kutaraja ditetapkan menjadi cabang dari Muhammadiyah Hindia Timur menurut fasal 7.¹⁰ Semakin lama semakin banyak orang-orang Aceh yang menjadi anggota cabang Kutaraja, apalagi setelah Teuku Hasan Geulumpang Payong dan Teuku Mansur

⁸*Ibid.*, hlm. 129.

⁹ Idham, *Moehammadiyah Hindia Timoer Tjabang Koetaradja. Perhitoengan: Wang Keloear Dan Musoek Dalam Tahoen 1932*, (Koetaradja, 23 Februari 1933), hlm. 19

¹⁰*Ibid.*, hlm. 3-4

(imeum yang berpemerintahan sendiri di Mukim Leupung, Lhok Nga) memberikan pengarahannya. Di samping itu cabang tersebut telah mendirikan pula perkumpulan pandu *Hizbul Wathan* dengan pengurusnya terdiri dari: Mokhtar (guru sekolah Belanda-Indonesia) sebagai ketua, Sady Tarohoram (guru sekolah Belanda-Indonesia Muhammadiyah) sebagai wakil ketua, dan Zahar (guru sekolah Belanda-Indonesia pemerintah) sebagai sekretaris-bendahara. Yang menjabat sebagai komisaris adalah Teuku Cut, Aphan Daulat, Wagiman, Jarimin dan Abdul Haq, sedangkan pemimpin umumnya adalah Suwaji (guru sekolah Belanda-Indonesia pemerintah Hindia Belanda).¹¹

Pada tanggal 16-19 Februari 1933 Muhammadiyah Aceh mengadakan konferensi daerah yang diadakan di Kutaraja. Acaranya terdiri dari beberapa rapat tertutup, termasuk juga rapat untuk cabang organisasi wanita Muhammadiyah yang bernama Aisyiah. Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1933 diadakan rapat umum di gedung bioskop "Deli" yang dimulai pada pukul 9.00 Wib. Rapat tersebut dipimpin oleh T.M. Hasan Geulumpang Payong serta dihadiri oleh lebih kurang 750 orang, diantaranya K.H. Hisyam dan Raden H. Hajid, masing-masing sebagai ketua dan komisaris Pengurus Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Raden H. Hajid bahkan juga merangkap sebagai Direktur Sekolah Pendidikan di Yogyakarta. Pertemuan itu semata-mata bersifat keagamaan, oleh karena pada permulaan rapat, ketua telah memberitahukan bahwa atas perintah Pemerintahan Dalam Negeri (*Binnenlandsch Bestuur*) tidak dibenarkan untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan ordonansi sekolah-sekolah liar (*Wildescholen-Ordonnantie*) dan masalah "*Zeven Provincien*".

¹¹Seri Informasi Aceh Th. VI No. 1 *Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928*, Terj. Aboe Bakar (Banda Aceh: PDIA, 1982) hlm. 25-26

Sebagai pembicara dalam rapat adalah : Armies, Naciuddin, Raden Haji Hajid, Zainul Baharuddin dan K. H. Hisyam. Kecuali R. Haji Hajid, pembicara-pembicara lain mengupas masalah-masalah keagamaan secara umum. R. Haji Hajid juga membicarakan sikap Muhammadiyah terhadap gerakan Ahmadiyah serta perbedaan-perbedaan antara kedua perkumpulan itu. Pada akhir pembicaraan itu berdirilah propagandis Ahmadiyah yang menetap di Aceh yaitu Muhammad Sadiq, lalu ia mulai berdebat, akan tetapi ketua dapat menghentikan perdebatan tersebut. Akibatnya di dalam ruangan terjadi kegaduhan dan atas permintaan polisi, Muhammad Sadiq segera meninggalkan ruangan rapat. Setelah kepergian Muhammad Sadiq keadaan menjadi tenang kembali. Pada pukul 12.30 Wib rapat umum ditutup. Pada pukul 13.00 dilanjutkan dengan rapat umum untuk cabang wanita Aisyiah di gedung sekolah Belanda-Indonesia Muhammadiyah yang dihadiri oleh lebih kurang 350 orang wanita. Dalam rapat ini pun dibatasi hanya membicarakan mengenai masalah-masalah keagamaan. Rapat berjalan dengan tenang serta bersemangat dan diakhiri pada pukul 17.30 WIB. Kedua anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah K.H. Hisyam dan R. Haji Hajid tersebut tiba di Kutaraja pada tanggal 16 Februari 1933, mereka menginap di rumah T. Muhammad Hasan Geulumpang Payong. Setelah konferensi daerah Muhammadiyah berakhir, mereka pun berangkat pada tanggal 20 Februari dengan kereta api ke Medan dan dari Medan mereka naik kapal menuju pulau Jawa.¹²

¹²“Laporan Politik Polisionil Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933”, dalam *Seri Informasi Aceh Th. V No. 4*, Terjemahan Aboe Bakar, (Banda Aceh, PDIA, 1981), hlm. 3-5

Tabel 1
Jumlah Anggota Muhammadiyah Cabang Kutaraja
pada tahun 1927-1932

Pada akhir tahun	1 Juli 1927		Bertambah		Meninggal dan pindah	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1 Juli 1927	75	1				
1927			27	52	6	1
1928			56	37	12	29
1929			52	8	6	8
1930			8	1	31	40
1931			22	40	26	-
1932			26		74	-
Jumlah	75	1	191	138	155	78

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota Muhammadiyah pada 31 Desember 1932 sebanyak 171 orang yang terdiri dari 111 laki-laki dan 60 perempuan. Pada tanggal 23 Jumadil Awal 1351 dengan surat Pengurus Besar No: 584 telah diserahkan 27 anggota tersebar (*verspreid lid*) kepada cabang Kutaraja. Anggota tersebut diterima oleh Pengurus Besar pada

tanggal 3 September 1924, akan tetapi karena tidak ada lagi yang tinggal di Kutaraja, namanya tidak dimasukkan dalam buku pokok.¹³

Tabel 2

**Susunan Pengurus Muhammadiyah Sejak Pengangkatan
22 Juli 1927**

No	Nama	Jabatan	Masa jabatan
1.	R.O. Atmadinata	Pemuka	22 Juni 1927 – 23 Juli 1927
2.	Abdoel Moethie	Pemuka	23 Juli 1927 – 29 April 1929
3.	Teungkoe Abdussalam	Pemuka	10 Agustus 1929
4.	Teungkoe Hasan Tjut	Pemuka Muda	20 Agustus 1928
5.	Imam bin Abas	Pemuka Muda	29 Oktober 1927 - 29 Desember 1928
6.	Moehamad Hakim	Jurusurat	23 Juli 1927 – 28 Desember 1928
7.	Abdul Hamid	Jurusurat	23 Juli 1927 – 29 Desember 1928
8.	Soetan Ahmad	Juru uang	23 Juli 1927 – 29-12-1928

¹³Idham, *op. cit.*, hlm. 4-5

Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh

9.	Abdul Manap	Juru uang Juru periksa Juru uang Juru periksa	22 Juni 1927 – 23 Juli 1927 23 Juli 1927 – 29 Desember 1928 29 Maret 1931 - 27 Februari 1932 27 Februari 1932
10.	Mohamad Saleh	Juru surat	29 Desember 1928 - 30 September 1930
11.	M. Mingoen	Juru uang Juru periksa	29 Desember 1928 - 29 Maret 1931 29 Maret 1931
12.	Idham	Juru Periksa Juru surat Js – Jw	23 Juli 1927 - 30 September 1930 30 September 1930-27 Februari 1932 27 Februari 1932
13.	Abdul Manaf	Juru periksa	23 Juli 1927
14.	Mohamad Joesoef		29 Oktober 1927 - 29 Desember 1928
15.	Abdul Aziz		Idem
16.	Datoek Kajo		Idem
17.	H. Mohd. Ali		Idem

Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh

18.	Nj' Mansoer	Juru periksa	29 Desember 1928 - 29 Maret 1931
19.	H. Abas Iljas	Idem	Idem
20.	Sidilenggang	Idem	Idem
21.	Z. Baharoeddin Pasaribu Hasan	Juru periksa	29 Maret 1931
22.	Ch. St. R. Endah		

Pendidikan

Bahagian yang terpenting dari keberadaan Muhammadiyah adalah dengan didirikannya sekolah-sekolah. Di bawah ini dapat dilihat susunan pengurus yang mengelola sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk cabang Kutaraja pada awal berdirinya.¹⁴

¹⁴ Idham, *op.cit.*, hlm. 5-6

Tabel 3
Susunan Pengurus Sekolah Muhammadiyah

No.	Nama	Jabatan	Masa jabatan
1.	Teuku Moh. Hasan	Pemuka	1 Agustus 1928
2.	M. Soewadji	Pemuka Muda	1 Agustus 1928 - 11 Juni 1932
3.	T. Zainoel Abidin	Pemuka Muda	1 Juli 1930 - 1 Desember 1930
4.	Kamarroesid	Js - Jw	1 Agustus 1928 - 3 Mei 1931
5.	M. Mingoen	Js - Jw	1 Mei 1931
6.	Teuku Tjoet Hasan	Juru periksa	1 Agustus 1928
7.	Teungku Abdussalam	Idem	1 Agustus 1928
8.	Abdul Moethie	Idem	1 Agustus 1928 - 30 April 1929

Pada tahun 1927 Muhammadiyah cabang Kutaraja sudah berusaha dan berhasil memperoleh seorang guru yang kemudian diangkat oleh Pengurus Besar M. Ridwanhadjir. Sejak 1 Februari

1928 hingga 30 Juni 1928 dibuka *Standuardschool* bertempat di Gang Air Wangi. Akan tetapi, oleh karena suatu lain hal rencana pelajaran tidak dapat dijalankan, lalu diganti dengan sekolah biasa. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1927 diputuskan untuk membuka sekolah yang menjadi kebutuhan penduduk yaitu *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Muhammadiyah. Sekolah tersebut dibuka pada tanggal 9 Juli 1928 dengan siswa sebanyak 85 orang, dan pada tanggal 31 Desember 1932 jumlah siswa telah bertambah menjadi 191 orang yang terdiri dari 137 laki-laki dan 54 perempuan.¹⁵

Cabang Kutaraja ini pada tanggal 9 Juli 1928 mendirikan sekolah Belanda-Indonesia (*Hollandsche Inlandsche School*) di ibukota daerah, di mana diberikan pelajaran-pelajaran agama Islam. Pada waktu pembukaannya, selain para *uleebalang* dan tokoh-tokoh Aceh lainnya hadir pula pegawai-pegawai pemerintah setempat. Pegawai-pegawai Eropa dapat diterima dengan baik oleh pihak pengurus cabang Muhammadiyah. Oleh karena sebelumnya pemerintah Hindia Belanda telah memberi izin kepada 2 orang guru bangsa Indonesia yang menjadi guru pada sekolah Belanda-Indonesia di Kutaraja untuk mengajar sore pada sekolah tersebut. Pada akhir tahun 1928 terdapat 3 orang guru di sekolah tersebut yaitu: Syamsuddin (asal Sumatera Barat), Sady Tarihoram (asal Tapanuli) dan Ridwan Hadir (asal Yogyakarta) yang sejak Januari 1928 telah datang ke Kutaraja untuk mengajar agama. Pada akhir tahun 1928 sekolah ini telah

¹⁵*Ibid.*, hlm. 8-9

memiliki siswa sebanyak 99 orang, 27 persen di antaranya adalah bersuku Aceh, selebihnya Minangkabau dan Jawa.¹⁶

Untuk mencukupi pemberian pelajaran agama kepada anak-anak yang akan memasuki sekolah lainnya, maka mulai 1 Maret 1932 Muhammadiyah membuka Madrasah Diniyah untuk anak laki-laki dengan pengurus Abdul Manaf dan Ma'mun. Sedangkan bagian Aisyiah sejak tanggal 16 November 1932 membuka Madrasah Diniyah khusus untuk anak perempuan. Kedua madrasah ini menempati ruangan sekolah HIS Muhammadiyah pada sore harinya. Guru yang mengajar pada Diniyah untuk putera adalah Mohamad Hasbi Zamzani dan untuk puteri adalah H. Mohamad Joesoef. Pada tanggal 31 Desember 1932 Madrasah Diniyah masing-masing memiliki 53 siswa laki-laki dan 51 siswa perempuan.¹⁷

Aisyiah

Organisasi Aisyiah di Kutaraja dibentuk pada tanggal 14 November 1927 dan baru pada tahun 1930 (sesudah menempati sebuah sekolah) aktif melakukan kegiatan. Sebagai wakil dari Pengurus cabang Aisyiah adalah Abdul Manap dan Hasan. Adapun pengurus Aisyah adalah H. Moernie (Pemuka), Fatimah (Pemuka Muda), Saminem, Djamaliah (Juru surat), Dajah (Juru

¹⁶“Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928”, dalam *Seri Informasi Aceh Th. VI No. 1* Terj. Aboe Bakar (Banda Aceh: PDIA, 1982), hlm. 24-25

¹⁷Idham, *op. cit.*, hlm. 11-12

uang dan juru periksa), Sitti Raham, Saodah, Soefinah, Hasnah, Ijem (anggota).¹⁸

Pemuda Muhammadiyah

Organisasi Pemuda Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada bulan Mei 1932. Akan tetapi sebelum organisasi ini resmi berdiri, di Aceh Besar pembinaan terhadap generasi muda telah banyak dilakukan. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1928 dengan ketua M. Soewaji dan disahkan oleh pengurus cabang sebagai bagian dari urusan *Hizbul Wathan*. Akan tetapi pada tanggal 24 Maret 1931 kelompok ini dihapuskan karena tidak mampu menjalankan undang-undang *Hizbul Wathan*. Ketika kelompok ini dihapuskan, M. Suwaji bahkan mengalami kerugian sebanyak f 200.¹⁹

A.2 Kabupaten Pidie

Muhammadiyah di Sigli berdiri setelah berdirinya cabang Lhokseumawe, di mana A.R. Sutan Mansur turut meresmikan berdirinya Muhammadiyah tersebut. Sedangkan di Sabang Muhammadiyah berdiri sekitar bulan Juli atau Agustus 1927 yang diresmikan oleh wakil konsul Muhammadiyah di Kutaraja Nasruddin. A.R. Sutan Mansur tiba di Sigli pada akhir bulan Juni 1927 dan Cabang Muhammadiyah di Sigli resmi berdiri tanggal 1 Juli 1927 dan disahkan oleh Pengurus Pusat sejak tanggal 16 Februari 1928. Dalam melaksanakan kegiatannya Muhammadiyah lebih menitikberatkan pada bidang agama dalam arti tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5-6

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 17

melakukan kegiatan-kegiatan politik. Organisasi ini khusus bergerak dalam kegiatan/pertemuan yang menganjurkan supaya orang taat melaksanakan kaidah-kaidah agama, mendirikan mesjid untuk wanita, mendirikan sekolah putri Muhammadiyah dan sebagainya, serta menganjurkan supaya orang bersikap toleransi terhadap orang-orang yang berlainan keyakinan. Sejak perkumpulan ini didirikan, ketegangan-ketegangan antara kaum muda dengan kaum tua sudah berakhir. Dari kaum muda inilah yang banyak menjadi anggota Muhammadiyah.²⁰ A.R. Sutan Mansur merupakan kader Muhammadiyah yang memang sengaja diutus oleh *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah pusat di Yogyakarta untuk daerah Minangkabau (Sumatera Barat) dan kemudian juga menyiarkan Muhammadiyah ke seluruh Aceh.

Muhammadiyah Cabang Sigli anggotanya terdiri dari 97 orang laki-laki (Muhammadiyah) dan 100 orang perempuan (Aisyiah) dan hampir seluruhnya bukan orang Aceh. Muhammadiyah Cabang Sigli menulis selebaran (yang ditulis oleh sekretaris pengurus perkumpulan) yang berisi agar masyarakat bersikap hati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu tentang "prang sabil".²¹

Pada bulan Februari 1933 Muhammadiyah cabang Sigli mendapat kunjungan 2 orang Wakil Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jawa, yaitu K.H. Hisyam dan Raden Haji Hajid. Di sana mereka menghadiri 3 buah rapat yang diadakan di ruangan cabang wanita Aisyiah. Dalam rapat tersebut dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan pendidikan serta

²⁰"Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928", *op. cit.*, hlm.26

²¹*Ibid.*, hlm.27

syarat-syarat yang berhubungan dengan itu. Diputuskan juga untuk mengadakan rapat gabungan dengan pengurus cabang-cabang Muhammadiyah dan Aisyiah pada tanggal 20 Februari 1933 serta rapat anggota cabang Muhammadiyah dengan dipimpin oleh Sutan Nagari (seorang pedagang di Sigli). Sebagai pembicara dalam rapat adalah Sutan Perpatih (juga pedagang di Sigli) dan Nazaruddin (guru agama di Takengon). Rapat anggota cabang Aisyiah diadakan pada tanggal 21 Februari.²²

Untuk lebih menggairahkan aktifitasnya Muhammadiyah cabang Sigli telah mendirikan Taman Pustaka. Taman Pustaka ini diketuai oleh P. K. Abdul Majid (1927-1928). Buku-buku untuk Taman Pustaka didapatkan dari toko buku Muhammadiyah Yogyakarta dan dari Balai Pustaka (milik pemerintah) di Jakarta. Setelah P.K. Abdul Majid pindah ke Langsa maka kegiatan Taman Pustaka digerakkan kembali oleh Djamaran, guru agama untuk keluarga Aisyiah Sigli. Dengan dibantu oleh beberapa teman, Taman Pustaka juga menyelenggarakan Taman bacaan. Untuk tahap pertama Taman Pustaka ini berlangganan 5 buah surat kabar, diantaranya surat kabar "Adil" dan beberapa majalah. Pada bulan Juli 1935 kegiatan taman Pustaka mengalami kemunduran, hal ini disebabkan Djamaran meninggal dunia. Selanjutnya Taman bacaan terpaksa ditutup karena tidak ada yang menggantikan kepemimpinannya.²³

²²Laporan Politik Polisionil Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933", *op. cit.*, hlm. 9

²³ Bakhrum Yunus, *op. cit.*, hlm. 16

A.3 Kabupaten Aceh Utara

Pada tanggal 5 November 1927 diusahakan untuk mendirikan Muhammadiyah Cabang Bireuen, daerah Kabupaten Aceh Utara. Namun karena ada sedikit salah paham, maka rapat tidak jadi dilaksanakan. Akibatnya propagandis Muhammadiyah P.K. Abdul Majid yang berasal dari Sigli telah menarik rencananya berhubung ulama Haji Mustafa di Bireuen juga kurang menaruh simpati terhadap perkumpulan tersebut, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan hasil yang sedikit sekali.²⁴ Akibatnya Muhammadiyah tidak jadi didirikan di daerah ini.

Sebelum Muhammadiyah berdiri di Lhokseumawe (ibu kota Kabupaten Aceh Utara), A.R. Sutan Mansur lebih dahulu datang ke kota ini. Ketika A.R. Sutan Mansur mendakwahkan ajaran-ajaran Muhammadiyah, pada saat itu pulanglah sejumlah orang-orang muda dari menuntut ilmu di tanah Minang. Mereka segera tertarik dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah yang disampaikan A.R. Sutan Mansur tersebut. Pada mulanya ajaran Muhammadiyah disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi setelah kepulangan orang-orang dari Minangkabau itu, penyebaran ajaran Muhammadiyah dilakukan secara terang-terangan. Di samping A.R. Sutan Mansur, ajaran Muhammadiyah disebarkan juga oleh Jakam (pegawai kantor telepon), H. Kamaruddin, H. Hanafiah, Bendahari dan Daud Ali. Muhammadiyah resmi didirikan pada bulan Maret 1927 di Lhok Seumawe dengan status cabang Muhammadiyah. Peresmian dilakukan oleh Buya A.R. Sutan Mansur. Pengurus pertama terdiri dari Jakam (ketua) dan H. Kamaruddin (sekretaris).

²⁴ "Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928", *op.cit.*, hlm.27

Pengesahan pimpinan pusat baru terwujud pada tahun 1928 dengan SK.PP. No. 193, tanggal 26-11-1928.²⁵ Muhammadiyah cabang Lhok Seumawe mendapat simpati dari *uleebalang* di daerah ini.

Pada tanggal 23 November 1927 cabang Muhammadiyah Lhok Seumawe telah mendirikan bahagian wanita yang diberi nama Aisyiah yang bertujuan:

1. Mengajak anggota-anggotanya supaya taat melaksanakan kaidah-kaidah agama.
2. Memperingatkan supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
3. Memberi pendidikan agama kepada anak-anak

Terpilih sebagai ketua Aisyiah adalah Isah (isteri Jakam, ketua cabang Muhammadiyah). Pada rapat tersebut hadir 10 orang laki-laki dan 49 perempuan, kebanyakan mereka bukan suku Aceh. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 1927 diadakan rapat umum Samudera bertempat di gedung bioskop Lhok Seumawe. Rapat dihadiri oleh ± 200 orang terutama dari suku bangsa Jawa, baik yang berasal dari tempat tersebut maupun dari Sigli dan Kuala Simpang serta tempat-tempat di sekitarnya. Selanjutnya ± 100 orang dari suku bangsa Aceh terutama mereka dari wilayah Lhok Seumawe dan 50 orang anak-anak yang menyanyikan doa-doa selamat. Di antara mereka yang hadir terdapat utusan Muhammadiyah dari Kutaraja seperti: Teuku Hasan Geulumpang Payong, Teuku Hasan (adik *uleebalang* Meuraksa/Ulee Lheu), Teungku Abdulsalam (pedagang), Ridwan Hadjir, Muhammad Yuti (pegawai kantor Jawatan Kereta Api Aceh). Cabang Muhammadiyah Sigli diwakili oleh Tamini, Kuala Simpang oleh

²⁵Bakhrum Yunus, *op.cit.*, hlm. 28

Islami Jamil dan dari Sumatera Barat diwakili oleh Sutan Mudo dan Mohamad Zein. Selain dari perkumpulan Muhammadiyah, juga hadir perwakilan dari perkumpulan-perkumpulan lain seperti perkumpulan Cina "*Chung Hwa Hwee Koan*" dan perkumpulan Arab "*Al Irsyad*". Selain itu hadir juga Ibrahim (juru gambar P.U. di Langsa) yang dahulu berada dalam pengawasan polisi berhubung ia mempunyai kecenderungan komunis. Hasil dari rapat itu pada pokoknya dan juga secara bulat telah diterima usul untuk disampaikan kepada pemerintah pusat supaya dicabutnya ordonansi guru.²⁶

T. Hasan (konsul Muhammadiyah) bersama dengan beberapa anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah dari Jawa yang mengadakan kunjungan singkat ke Aceh, juga telah mengunjungi gedung Muhammadiyah di Bireuen dengan sepengetahuan anggota-anggota pengurus yang berkumpul di sana. Setelah itu mereka menuju Lhok Seumawe. Pada tanggal 21 Februari 1933 di Madrasah Aisyiah di Kampung Cina Lhok Seumawe diadakan rapat Muhammadiyah dengan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rapat itu dipimpin oleh Jalaludin dan T. M. Hasan Geulumpang Payong. Selanjutnya tampil sebagai pembicara-pembicara Said Husin (seorang Arab) dari Sigli, R. Haji Hajid dan K.H. Hisyam, anggota-anggota pengurus Pusat Muhammadiyah di Jawa, T.M. Hasan dan Jalaludin.²⁷

²⁶“Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928”, *op.cit.*, hlm. 27-29

²⁷“Laporan Politik Polisionil Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933”, *op.cit.*, hlm. 10

A. 4 Kabupaten Aceh Timur

Kehadiran Muhammadiyah di pesisir Timur Aceh tidak lepas dari usaha A.R. Sutan Mansur yang datang ke Aceh pada tahun 1927 dari Sumatera Barat dan tinggal beberapa tahun di Lhok Seumawe. Pada siang hari beliau bekerja sebagai montir, sedangkan pada malam hari menjadi mubaligh yang mendakwahkan dan menyebarkan faham Muhammadiyah. Muhammadiyah di Aceh Timur dimulai dengan berdirinya organisasi ini di Kuala Simpang pada tanggal 4 Oktober 1928. Peresmian dilakukan oleh M. Yunus Anis, wakil pimpinan Pusat Muhammadiyah. Uniknya, sebelum organisasi Muhammadiyah lahir, sebulan sebelumnya yakni pada tanggal 28 September 1928 telah berdiri organisasi Aisyiyah. Di daerah-daerah lain organisasi Aisyiah lahir belakangan setelah organisasi Muhammadiyah berdiri. Hal ini berkaitan dengan kedatangan Rahmah El Yunusiah pemimpin sebuah pesantren wanita terkenal di Sumatra Barat yang melakukan kunjungan ke Aceh termasuk di Kuala Simpang untuk mencari sumbangan sekaligus memperkenalkan organisasi Aisyiah pada tahun 1926.

Tanggal 30 September 1927 di gedung bioskop Kuala Simpang diadakan rapat umum yang bertujuan mendirikan cabang Muhammadiyah yang dipimpin oleh Mohamad Sandan (guru bantu sekolah bumiputera kelas 2 pemerintah). Pada kesempatan itu telah berbicara Ismail Jamil (guru agama sekolah Diniyah) serta Mohamad Yunus Anies (sekretaris pengurus pusat) merangkap propandis perkumpulan Muhammadiyah. Rapat itu dihadiri oleh ± 200 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Hampir semua hadirin adalah orang Minangkabau, sementara beberapa yang lain adalah orang Jawa dan Tamiang. Selain masalah-masalah keagamaan, di rapat itu juga Muhamad Yunus Anies mengemukakan hal-hal yang telah dilaksanakan

Muhammadiyah.²⁸ Pada tanggal 7 Oktober 1927 di Kuala Simpang berhasil dibentuk cabang Muhammadiyah, di mana 33 orang menyatakan diri menjadi anggota. Juga dibentuk cabang wanita bernama Aisyiah yang pengurusnya sebagian terdiri dari isteri-isteri atau anggota keluarga dari anggota pengurus cabang Muhammadiyah. Pada saat itu 60 orang menyatakan dirinya menjadi anggota Aisyiah.²⁹

Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1927 di Langsa di bawah pimpinan propagandis Muhammadiyah yang bertempat tinggal di Sigli yaitu P.K. Abdul Majid telah diadakan rapat yang bertujuan mendirikan cabang Muhammadiyah. Usaha tersebut berhasil baik dengan didirikannya Muhammadiyah pada tanggal 29 Oktober 1927 oleh pengurus sementara yang disampaikan kepada pemerintah di Langsa. Pada pertengahan tahun 1928 anggotanya sebanyak 20 orang yang terdiri dari orang bukan Aceh.³⁰

Pada malam tanggal 12/13 Februari 1933 di Mesjid Raya Langsa telah diadakan pertemuan Muhammadiyah. Pertemuan berjalan baik, walaupun dibubarkan karena suatu lain hal. Pengurus Muhammadiyah dianggap bersikap sombong sehingga menimbulkan ketidaksenangan pada sebagian besar hadirin yang diperlihatkan dengan teriakan-teriakan ketika mereka meninggalkan ruangan. Pengurus Muhammadiyah dianggap tidak mau bekerja sama dengan *uleebalang* dan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menganggap demikian, karena pada tanggal 22 Februari 1933 dalam rangka kedatangan

²⁸“Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928”, *op. cit.*, hlm. 29

²⁹*Ibid.*, hlm. 29

³⁰*Ibid.*, hlm.30

konsul T. Hasan Geulumpang Payong dan anggota-anggota Pengurus Pusat K.H. Hisyam dan R.H. Hajid di sekolah Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah tidak mengundang *uleebalang*nya, sehingga *uleebalang* Cut Langsa melarang diadakannya pertemuan itu yang disampaikan kepada Wakil ketua Zainun. Akan tetapi sikap Konsul T. Hasan Geulumpang Payong menyampaikan kepada *uleebalang* supaya rapat tetap diteruskan karena maksud perjalanannya itu telah diketahui oleh Gubernur. Selanjutnya Asisten Residen memberitahukan bahwa pertemuan tidak boleh diteruskan, akhirnya orang-orang yang telah hadir pun segera bubar.

Tanggal 23 Februari 1933 Pemerintahan Eropa (*Europesch Bestuur*) telah mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah K.H. Hisyam dan R.H. Hajid serta konsul Muhammadiyah untuk Aceh T. Hasan. Kepada pemerintah mereka mohon diberikan izin baru untuk mengadakan rapat umum dengan dihadiri pihak-pihak pemerintah daerah Kabupaten dan *uleebalang* serta untuk menjelaskan kepada hadirin bahwa Pengurus Pusat Muhammadiyah sangat tidak setuju dengan sikap Pengurus Cabang. Izin pertemuan diberikan pada tanggal 23 Februari 1933 dengan tanpa menunggu keputusan *uleebalang*. Akhirnya kegiatan ini dilarang karena pada tanggal 22 Februari 1933 telah kelihatan beberapa orang Aceh menyiapkan batu-batu untuk melempar gedung Muhammadiyah. Pengurus Muhammadiyah Cabang Langsa telah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan sikap mereka itu. Mereka itu terdiri dari orang Minangkabau, kecuali Isyataddi (orang Nias) dan Hassan Basri (peranakan) :

Pengurus Muhammadiyah Cabang Langsa

Jabatan	Nama	Pekerjaan
Ketua	Mohamad Alif	Guru sekolah “Wustha”
Wakil Ketua	Zainun	Pengurus perkara-perkara
Sekretaris	Mohamad Afan	Klerk administrasi ketentaraan
Bendaharawan	Isyataddi	Kerani maskapai “Atjeh Handel”
Komisaris	Hassan Basri Halim Mohamad Husin	Kerani maskapai “Deli Atjeh” Kondektur jawatan kereta api Atjeh Pedagang kecil
Penasihat	Mohamad Rais	Kerani maskapai “Atjeh Handel”

Ketua cabang Muhammadiyah Kuala Simpang (Mohamad Alif) pada tanggal 2 Februari 1933 berhenti dan sebagai penggantinya adalah Bahrum Syah. Mohamad Alif kemudian menjadi komisaris untuk Kuala Simpang. Tanggal 23 Februari ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah K.H. Hisyam dengan disertai sekretaris R.H. Hajid dan konsul untuk Aceh T. Hasan beserta seorang guru agama dari Sigli Habib Husin Sihab

berkunjung juga ke Kualasimpang. Kedatangan mereka ke sana dinantikan oleh anggota-anggota Muhammadiyah. Kemudian tamu tersebut berceramah di mesjid Kualasimpang yang dihadiri ± 200 orang. Dalam pertemuan tersebut mereka menganjurkan supaya umat Islam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan sebaik-baiknya. Tanggal 24 Februari 1933 oleh anggota pengurus Pusat Muhammadiyah yang disebut itu bersama pengurus cabang Kualasimpang mengadakan pembicaraan mengenai sikap pengurus cabang perkumpulan tersebut. Disepakati bahwa anggota-anggota pengurus ingin melakukan kerja sama dengan pemerintah. Dinyatakan dahulunya pemerintah telah melakukan kerja sama yang cukup baik dengan mengadakan pasar malam untuk Muhammadiyah, orang-orang Cina atau kelompok-kelompok penduduk lainnya. Tanggal 15 Februari K.H. Hisyam dan H.R. Hajid berangkat ke Medan, sementara T. Hasan bersama guru agama dari Sigli kembali ke tempat mereka masing-masing.³¹

E. Kabupaten Aceh Barat

Cikal bakal Muhammadiyah di *Westkust van Atjeh* telah ada sejak dibukanya *Thawalib School* di Tapaktuan dan Labuhan Haji. Hubungan antara Sumatera Barat dengan Aceh bertambah kuat (khususnya dengan Aceh Selatan dan Aceh Barat) terjadi sekitar tahun 1920-an, yaitu pada waktu Sumatra Thawalib memperluas pengaruhnya ke daerah ini dengan membuka beberapa sekolahnya. Pada tahun 1919 atas usaha pedagang di Tapaktuan di antaranya Pakih Hasyim Sutan Larangan dan H. Mohammad Nur diorganisirilah pembentukan sebuah Madrasah

³¹“Laporan Politik Polisionil Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933”, *op. cit.*, hlm. 11-17

Sumatra Thawalib. Madrasah yang merupakan filial dari perguruan serupa di Sumatera Barat itu bukan hanya berorientasi ke madrasah induknya, melainkan juga mempekerjakan para guru yang berasal dari Sumatera Barat. Guru-guru Sumatera Thawalib filial Aceh Selatan didatangkan dari Sumatera Barat secara bergilir yaitu *lerar berlayar* (sama dengan dosen terbang) karena waktu itu hanya ada perahu layar dan kapal laut kepunyaan KPM. Gilirannya antara satu tahun atau 6 bulan sekali guru-guru didatangkan dengan kapal KPM. Guru-guru tersebut antara lain H. Jalaluddin Thaib, H. Syuib, Baharuddin dan pernah juga datang mengajar ulama besar H. Abdul Karim Amrullah yang lebih terkenal dengan H. Rasul yaitu ayahanda dari Prof. Hamka. Kemudian berturut-turut diutus pula para guru ke daerah ini, yaitu H. Syuib El-Yunusy dan Labai Majolelo. Madrasah yang serupa juga dibangun kemudian di Labuhan haji, Meulaboh dan Sinabang.³² Guru tersebut ada yang kembali ke Sumatera Barat, ada pula yang tinggal menetap, seperti di Susoh dan Meukik. Mereka inilah yang terus menerus mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam di wilayah ini dengan cara sebijaksana mungkin agar tidak dicurigai oleh pemerintah Belanda. Dalam hal pengembangannya mereka tidak memakai nama Muhammadiyah, akan tetapi memakai istilah kaum muda artinya kaum yang mengadakan pembaharuan.³³ Setelah Muhammadiyah resmi berdiri di Kutaraja pada tahun 1927, Muhammadiyah terus berkembang di *Westkust van Atjeh*, pertama kali ke Calang.

³²H. Said Abubakar, *Berjuang untuk Daerah*, (Banda Aceh: Yayasan Nagasakti, 1995), hlm. 58

³³ *Wawancara* dengan Abdul Manaf Meuraxa, Banda Aceh, Selasa, 29 Februari 2002

Bulan Oktober 1927 propandis Muhammdiyah seorang Minangkabau bernama Mohamad Zain Jambek telah mengunjungi ibu kota wilayah Tapaktuan untuk mengadakan propaganda Muhammadiyah. Akan tetapi berdasarkan permintaan *uleebalang-uleebalang* yang bersangkutan oleh pemerintah daerah setempat telah diberitahukan kepadanya, bahwa mengingat keadaan politik yang belum begitu mantap di sana ia tidak dibenarkan mengadakan propaganda-propaganda keagamaan karena dikawatirkan bahwa setiap propaganda yang dilakukan oleh perkumpulan manapun akan dapat menimbulkan gangguan ketentraman baru. Belanda mengkhawatirkan perkumpulan-perkumpulan keagamaan seperti Sumatra Thawalib dan Ahmadiyah yang dianggap telah mengacaukan keamanan di daerah tersebut pada tahun 1926 akan muncul kembali dengan segala akibatnya yang merugikan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda mendengar desas desus bahwa anggota-anggota Sumatra Thawalib secara rahasia telah turut dalam kunjungan Muhammad Zein Jambek itu dengan maksud hendak menimbulkan huru hara dan bahwa perkumpulan tersebut dengan bantuan Muhammadiyah akan memulai aksinya lagi. Dikhawatirkan oleh Belanda bahwa dalam propaganda Muhammadiyah yang mengandung unsur-unsur hendak menghapuskan adat istiadat yang bertentangan dengan hukum Islam di antaranya meniadakan kenduri pada orang-orang yang meninggal akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.³⁴

Pemerintah Belanda yang ada di Kutaraja mengadakan pembicaraan dengan Konsul Muhammadiyah T. Hasan Geulumpang Payong yang melahirkan *agreement* yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak boleh dikembangkan di

³⁴“Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928”, *op. cit.*, hlm.31-32

Westkust van Atjeh, kecuali yang sudah ada di Calang. Jadi sejak tahun 1927 tidak boleh bertambah lagi Muhammadiyah di wilayah ini.³⁵

Keberatan Belanda mengizinkan berdirinya Muhammadiyah di wilayah Aceh Barat disebabkan pandangan mereka yang menganggap penduduk wilayah ini masih ortodok dalam pikiran keagamaannya sehingga dianggap propaganda nantinya akan menyinggung keyakinan mereka. Selain itu mereka dianggap mempunyai mentalitas yang khas sangat peka yang tidak ingin tersinggung oleh ajaran-ajaran baru yang dibawa Muhammadiyah. Hal ini mengingat pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan ini seperti pembunuhan-pembunuhan Aceh, penyergapan terhadap patroli-patroli Belanda, bahwa hal-hal yang menjurus kepada keyakinan mereka akan dapat memerangi kompeni. Suatu hal yang sedapatnya dihindarkan oleh pemerintah Belanda. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka kepada pejabat-penasihat urusan-urusan kebumiputeraan telah diminta supaya kepada Muhammadiyah yang walaupun sudah terkenal sebagai perkumpulan yang setia dan untuk menghindari ekses-ekses yang ditimbulkan oleh propaganda-propagandanya, untuk sementara tidak dibenarkan melebarkan propaganda-propaganda ke daerah kebutatan Aceh Barat.³⁶

Uleebalang Teupah, wilayah Simeulu pada tanggal 19 Mei 1930 telah menerima surat dari T. Hasan konsul Muhammadiyah di Kutaraja yang menyatakan, bahwa beberapa orang Minangkabau di Sinabang telah mencatatkan nama mereka

³⁵ *Wawancara* dengan Abdul Manaf Meuraxa, Banda Aceh, Selasa, 29 Februari 2002

³⁶ "Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928", *op. cit.*, hlm.32

sebagai calon anggota Muhammadiyah. T. Hasan mengharapkan kepada *uleebalang* tersebut, agar ia kiranya dapat menyetujui kemungkinan didirikannya cabang Muhammadiyah di Sinabang. Tanggal 23 Juni 1930 beberapa orang anggota yang berdiam di Sinabang (semuanya dari suku bangsa bukan Aceh) telah menyatakan keinginan mereka kepada *uleebalang* tersebut untuk mengadakan rapat umum agar dapat diusahakan pendirian cabang Muhammadiyah di Sinabang. Akan tetapi *uleebalang* Teupah tanpa suatu syarat tidak ingin memberikan persetujuannya untuk maksud itu, disebabkan, menurut pendapat *uleebalang* itu, adanya suatu perkumpulan menurut prakteknya hanya berarti pengumpulan orang-orang bukan penduduk pribumi yang memakai nama perkumpulan sebagai perisai untuk menentang *uleebalang*.³⁷

Di wilayah *Westkust van Atjeh* Muhammadiyah baru resmi berdiri 15 tahun setelah berdirinya di Kutaraja, padahal ajaran-ajaran Muhammadiyah telah sangat lama menyebar di daerah tersebut. Pada tahun 1933 Muhammadiyah telah berdiri di Tapak Tuan, tetapi setahun kemudian membubarkan diri. Tetapi pada tahun 1933 itu Muhammadiyah berdiri pula di Labuhan Haji yang dipelopori oleh alumni *Thawalib School* di Sumatra Barat. Sejak tahun 1936 Muhammadiyah berkembang di wilayah ini walaupun secara sembunyi-sembunyi dan berhasil membentuk ranting-ranting Muhammadiyah yang langsung di bawah pembinaan pusat. Mereka tidak dapat berhubungan dengan Kutaraja karena terhalang oleh persetujuan yang telah ada. Ketika berlangsungnya Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan pada tahun 1939 *Westkust van Atjeh* turut serta mengirimkan utusannya yaitu dari daerah Blang Pidie dan Tapaktuan dengan

³⁷“Laporan Politik Polisionil Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933”, *op. cit.*, hlm. 17-18

menggunakan mandat dari konsul Muhammadiyah di Kutaraja. Mereka yang dikirim antara lain Abdul Ghafar, Ahmad bin Walid, Syamsul Bahri (Tapaktuan), Syekh Ahmad dan Abdul Ghafar (Blang Pidie). Setelah selesai kongres Kyai Sujak salah seorang pengurus Muhammadiyah Pusat kembali ke Jawa dengan melewati wilayah *Westkust van Aceh* sekaligus meresmikan Cabang Muhammadiyah di Kutabuloh Meukik dan resmi memakai nama Muhammadiyah secara administrasi yang diketuai oleh H.M. Abduh Syam. Sejak tahun 1939 Pemerintah Hindia Belanda bersikap mendiamkan saja perkembangan Muhammadiyah di wilayah ini, walaupun secara resmi persetujuan itu baru dibatalkan setelah Belanda menyerah kepada Jepang.

F. Kabupaten Gayo dan Tanah Alas

Di tanah Gayo kehadiran Muhammadiyah setahun lebih lambat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Atas inisiatif A.R. Sutan Mansur, berdirilah Muhammadiyah di Takengon pada tahun 1928 yang menyebar secara cepat di Teritit dan Simpang Tiga. Di daerah Aceh Tenggara, Muhammadiyah baru berdiri pada tahun 1937, walaupun pada sekitar tahun 1930-an beberapa pemuda setempat yang baru kembali dari *Thawalib School* di Sumatra Barat telah menyebarkan ajaran-ajaran Muhammadiyah di daerah tersebut.

Pada bulan April 1933 di kenegerian Buket, wilayah Takengon telah didirikan dua buah sekolah agama, yaitu di Kampung Kenawat dengan nama sekolah "Palaah" di mana diberikan pendidikan kepada 40 orang siswa, terbagi dalam 3 kelas. Sebagai guru sekolah tersebut di antaranya Kader dan Abdullah (keduanya orang Gayo). Di Simpang Tritit didirikan sebuah sekolah partikelir yang diberi nama "T. Jacobschool".

Sekolah T. Jacob ini didirikan dengan 3 buah kelas dengan jumlah siswa 27 orang, gurunya hanya seorang yakni Muda Kala (orang Gayo). Di sekolah itu diberikan juga pelajaran-pelajaran seperti rencana pengajaran di sekolah rakyat.³⁸

Muhammadiyah secara organisasi baru berdiri di Aceh Tenggara (Kutacane) pada tahun 1937. Meskipun demikian gagasan-gagasan Muhammadiyah sudah dikenal lama sebelum itu. Sekitar tahun 30-an, bahkan sebelum itu telah ada beberapa orang muda yang baru kembali setelah selesai belajar dari Sumatra barat (diantaranya *Thawalib School*) untuk menyebarkan ajaran-ajaran Muhammadiyah di daerah itu. Atas prakarsa mereka dibangunlah sebuah sekolah agama dan salah seorang gurunya adalah A. Rauf St. Batuah, tamatan *Thawalib Padang Panjang*, dan sebagai kepala sekolah dipercayakan kepada Sutan Makmur. Barulah pada tahun 1952 Muhammadiyah cabang Kutacane terbentuk.³⁹

B. Muhammadiyah Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada akhir masa pemerintahan Belanda di Aceh (1942), jumlah cabang Muhammadiyah di seluruh Aceh tercatat 8 buah. Di setiap cabang pada umumnya terdapat pula organisasi kepanduan *Hizbul Wathan* dan sejumlah lembaga pendidikan yang semuanya dikelola oleh Muhammadiyah. Adapun jumlah lembaga pendidikannya adalah sebagai berikut: 9 buah HIS, masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe, Langsa, Kuala Simpang, Calang, Takengon, Idi dan Mereudu; 1

³⁸“Laporan Politik Polisionil Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933”, *op. cit.*, hlm. hlm.17

³⁹ Bakhrium Yunus, *op. cit.*, hlm. 79

MULO dan *Leergang* Muhammadiyah (Darul Muallimin) keduanya berlokasi di Kutaraja; 10 buah Diniyah yang terdapat di Kutaraja, Lubuk, Sigli, Lhok Seumawe, Takengon, Kuala Simpang, Calang, Idi, Mereudu dan Bireuen; dan 1 Taman Kanak-Kanak di Kutaraja.⁴⁰ Yang menjadi permasalahan besar pada masa pendudukan Jepang adalah mengenai arah kiblat yang harus diubah yakni lebih ke kiri dari arah yang biasa (benar). Tujuan mereka adalah agar umat Islam menyembah matahari sebagaimana orang Jepang. Pengurus Muhammadiyah terpaksa harus bekerja keras untuk mematahkan kegiatan pensyirikan yang dilakukan orang Jepang tersebut.

Pada zaman pendudukan Jepang Muhammadiyah cabang Banda Aceh mendirikan sebuah rumah penyantun di Punge Blang Cut II dan pendirian ini dimaksudkan sebagai tempat bertemunya para pimpinan Muhammadiyah di Banda Aceh. Pada waktu itu pihak Jepang melarang Muhammadiyah melakukan kegiatannya. Rumah Penyantun Muhammadiyah (RPM) Banda Aceh merupakan rumah penyantun Muhammadiyah pertama di Aceh yang didirikan pada tanggal 28 Februari 1943. Pada mulanya dibangun di kompleks Muhammadiyah sekarang ini (jl. Prof. A. Majid Ibrahim I) dan kemudian dipindahkan ke Punge Blang Cut. Panti asuhan Muhammadiyah ini didirikan oleh 22 orang anggota Muhammadiyah sehingga disebut dengan istilah "Sahabat Dua Puluh Dua". Pelopor pendirinya adalah T. Djohan Meuraxa dan para anggota "sahabat dua puluh dua" itu termasuk Idham, A. Bakhari, Tgk. M. Ali, ustadz M. Nur Hayik, Djamaan Kasim, Rafii St. Aminullah, M. Yusa, A. Rahman, Nurdin, dan lain-lain. Rumah Penyantun Muhammadiyah (RPM) ini didirikan untuk menghindari penggunaan gedung-gedung yang dimiliki

⁴⁰Rusdi Sufi, *Gerakan Nasionalisme di Aceh*. (Banda Aceh: BKSNT Banda Aceh, 1998). hlm. 122-123

Muhammadiyah sebagai tempat balatentara Jepang. Untuk mencegah hal tersebut, “sahabat dua puluh dua” mengumpulkan anak yatim untuk tinggal di sana. Pada waktu itu tidaklah sulit mencari anak yatim, karena memang banyak anak yatim dijumpai dalam masyarakat. Akan tetapi para keluarga yang mengasuh anak yatim itu enggan melepaskan mereka dengan alasan malu dengan keluarga lain. Ketika Jepang akan menguasai gedung SD Muhammadiyah tersebut, pengurus Muhammadiyah memperlihatkan kepada penguasa Jepang bahwa gedung tersebut adalah sebuah panti asuhan, sehingga bangunan tersebut terlepas dari okupasi Jepang. Selain berfungsi sebagai rumah penyantun, bangunan tersebut juga merupakan tempat berkumpul para pengurus dan anggota Muhammadiyah untuk menggerakkan dan melanjutkan perjuangan Muhammadiyah. Bapak Nasruddin dipercayakan sebagai ketua (pamong) asrama yang pertama. Ia diberi tugas menjaga dan mengasuh anak-anak tersebut serta menyediakan keperluan sehari-hari mereka, yang pada saat itu merupakan kesulitan yang sangat besar yang dirasakan seluruh masyarakat. Namun berkat bantuan Tgk. M. Ali yang bekerja sebagai pedagang, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Setelah Jepang kalah dan kemerdekaan Indonesia diproklamkan, aktifitas gedung tersebut dibagi dua, sebagian untuk gedung SD Muhammadiyah dan sebagian lagi untuk RPM.⁴¹

Kegiatan Muhammadiyah di Aceh Selatan selama masa pendudukan Jepang bersifat aktif terutama dalam memberikan pengajaran-pengajaran khususnya untuk para anggota Muhammadiyah. Segera setelah Jepang meninggalkan Indonesia, organisasi Muhammadiyah mendapatkan momentum yang baik sehingga organisasi ini berkembang pesat.⁴² Walaupun pada masa

⁴¹Bakhrum Yunus, *op. cit.*, hlm.142-143

⁴²*Ibid.*, hlm. 4

Jepang dikatakan tidak boleh membentuk organisasi, akan tetapi Muhammadiyah sudah membuka lembaga pendidikan Diniyah yaitu di Kuta Buloh, Tapaktuan, le Dingen, Labuhan Haji, Blang Pidie. Muhammadiyah tidak memasuki lembaga pendidikan dayah, akan tetapi langsung mendirikan sekolah-sekolah dan membentuk pengajian-pengajian secara berkelompok. Ketika Muhammadiyah memasuki dayah (Perti) terjadilah benturan-benturan, tetapi dapat diselesaikan secara bijaksana melalui pendekatan dengan pemimpin-pemimpin Perti (di Blang Pidie umpamanya dengan H. Abdul Hamid Kamal dan Syekh Mahmud) untuk menghindari terjadinya konflik.

Penyebaran paham Muhammadiyah di daerah Aceh ini dilakukan melalui kunjungan-kunjungan tabligh dan kuliah-kuliah pada tiap-tiap cabang Muhammadiyah yang kemudian melahirkan pendidikan-pendidikan Islam. Pada akhir masa pendudukan Jepang salah seorang mubaligh Muhammadiyah yang juga sebagai Ketua *Hizbul Wathan* Aceh yaitu Teungku Muhammad Idris Lhoong mengadakan kunjungan dari Kutaraja ke wilayah *Westkust van Aceh* hingga ke Singkil. Beliau bahkan sampai menetap dan berumah tangga di sana.⁴³ Namun di daerah ini setelah Jepang meninggalkan Indonesia, Muhammadiyah berkembang sangat pesat meninggalkan daerah-daerah lainnya di Aceh.

Di Kuala Simpang, pada zaman pendudukan Jepang kegiatan organisasi ini dapat dikatakan berhenti. Hal ini disebabkan karena semua bangunan Muhammadiyah dipakai secara paksa oleh bala tentara Jepang sebagai tempat tinggal. Ketika Jepang meninggalkan bangunan Muhammadiyah dan

⁴³ *Wawancara* dengan Abdul Manaf Meuraxa, Banda Aceh, Selasa, 29 Februari 2002

sekaligus meninggalkan Kuala Simpang pada bulan Agustus 1946, keadaan bangunan Muhammadiyah dan peralatan di dalamnya dalam keadaan kurang baik.⁴⁴

⁴⁴Bakhrum Yunus, *op. cit.*, hlm. 75

BAB III

KIPRAH MUHAMMADIYAH DALAM MENGISI PEMBANGUNAN DI ACEH

A. Pembangunan Muhammadiyah dalam Bidang Pendidikan

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi sosial Islam yang bertujuan untuk mengadakan pembaharuan atau pemurnian ajaran Islam, memperbaharui sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman, mengembalikan dasar kepercayaan umat kepada tuntunan Al-Qur'an dan Hadist, bersih dari bid'ah dan khurafat, serta menafsirkan ajaran Islam secara modern. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan berbagai kegiatan seperti : dakwah Islam, memajukan pendidikan, mengadakan tabligh untuk membicarakan masalah-masalah Islam serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat kabar dan majalah.¹

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah berusaha mengadakan pembaharuan sistem pendidikan dan pengajaran yang berorientasi Islam, baik di sekolah, madrasah maupun

¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indoneisa 1900-1924*. (Jakarta : LP3ES, 1985),hlm. 86

pendidikan dalam masyarakat yang bersifat non formal. Artinya, dengan memajukan pendidikan maka masyarakat Islam dengan sendirinya menjadi pribadi yang berkualitas baik dalam hal agama maupun dalam ilmu pengetahuan umum. Oleh sebab itu Muhammadiyah sejak awal berdirinya melakukan kegiatan-kegiatan seperti membangun sekolah, madrasah yang diiringi dengan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Pada tahun 1950-an Muhammadiyah mengusulkan agar di dalam kurikulum sekolah-sekolah umum dicantumkan mata pelajaran agama. Berkat usaha Muhammadiyah maka keluarlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950.²

Citra pembaruan yang muncul dalam bidang pendidikan seperti berawal dari rasa tidak puas terhadap sistem pendidikan yang diterapkan pada dua lembaga pendidikan yang ada pada saat itu, yaitu lembaga pendidikan pesantren yang dianggap konservatif³ dan pendidikan kolonial yang modern dan sekular. Muhammadiyah melihat adanya segi-segi yang positif sehingga harus diangkat dari kedua lembaga pendidikan tersebut dan melahirkan pendidikan yang ketiga, yang merupakan kompromitas antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan kolonial. Sistem pendidikan yang baru ini diterapkan untuk yang pertama kali dalam Lembaga pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Wajah pesantren yang tampak dalam pondok ini adalah bahan pelajaran berupa kitab-kitab fikih as-

²Iriani (Ed), *Peranan Muhammadiyah dalam Sistem Pendidikan Islam di Padang Panjang Tahun 1950-1965*. (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2001), hlm. 2

³Konservatif dalam arti pesantren kurang peka terhadap perubahan tuntutan zaman dan masyarakat saat itu. Lihat Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*. (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 112.

Syafi'i, kitab Tasauf karangan Imam Al-Ghazali, kitab Tafsir Jalalain dan sebagainya. Sedangkan dari pendidikan kolonial hampir seluruh perangkat pendidikannya ditemukan di pondok ini. Misalnya metode pelajaran, sistem pengajaran klasikal, ilmu pengetahuan umum yang terdiri dari ilmu sejarah, ilmu hitung, menggambar, bahasa Melayu, Inggris dan Belanda.⁴

Sebelum Muhammadiyah mendirikan sekolah, terlebih dahulu dengan menyelenggarakan kursus untuk anak-anak yang telah lanjut pelajarannya. Kursus ini diadakan pada malam hari sedangkan pada pagi hari dan petangnya anak-anak tersebut harus mengikuti pendidikan formal.

Pada masa Belanda banyak banyak anak yang ditolak masuk ke HIS (*Hollandsch Inlandsche School*). Hal tersebut disebabkan adanya berbagai persyaratan yang ketat sehingga pintu sekolah HIS hanya terbuka untuk anak-anak golongan bangsawan dan anak-anak dari orang hanya yang berkedudukan saja. Sedangkan bagi anak-anak dari kalangan biasa ataupun anak-anak saudagar yang meskipun mungkin mereka sanggup membiayai anak mereka bersekolah di sekolah ini, namun tetap sulit untuk diterima di HIS.

Menurut catatan J. Jongejans, sekitar tahun tiga puluhan, banyak sekali permintaan dari masyarakat Aceh, terutama dari kalangan berduit agar dapat menyekolahkan anak-anak mereka

⁴Arbiyah Lubis, "Cita dan Corak Pembaharuan dalam Gerakan Muhammadiyah dalam Zamroni Mashuda, *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. (Banda Aceh: Gua Hira, 1995), hlm. 35-36

pada sekolah ini. Akan tetapi permintaan ini ditolak oleh pemerintah Belanda.⁵

A.1 CABANG SIGLI

Sistem pendidikan yang dikenal saat itu telah menciptakan suatu kondisi di mana hanya orang yang berpengaruh sajalah yang dapat bersekolah yaitu golongan bangsawan dan orang-orang yang mempunyai kedudukan seperti golongan umara. Meskipun orang merasa mampu secara finansial, namun tetap saja tidak bisa bersekolah sebagaimana mestinya.

Melihat kondisi tersebut maka pada tahun 1928 pengurus Muhammadiyah Cabang Sigli mengutus pengurus Muhammadiyah yaitu Sutan Machudum, Rafii Tamimi, P.K. Abdul Madjid, Sutan Nagari dan Burhan untuk menemui Aboe Bakar seorang penilik sekolah (*schoolloppziener*) dan Mohd. Salim seorang mantri polisi. Adapun tujuan menemui mereka adalah untuk meminta nasehat dan petunjuk tentang pendirian sekolah HIS Muhammadiyah di Sigli. Selanjutnya tim ini juga menghadap Teuku Pakeh Mahmud seorang pemuka masyarakat di Pidie.⁶

Setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, maka pengurus Muhammadiyah menetapkan untuk mendirikan HIS Muhammadiyah. Pada tanggal 30 Maret 1930 dibentuk panitia yang terdiri dari Teuku Johan Meuraxa sebagai ketua,

⁵ Rusdi Sufi. *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942)*. (Banda Aceh : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1998), hlm. 25

⁶ Bakhrum Yunus, *Beberapa Catatan Tentang Sejarah Awal Muhammadiyah di Daerah Istimewa Aceh*. (Banda Aceh : Badan Perencanaan dan Evaluasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh. 1995), hlm. 13.

Teuku Raden (sekretaris), H.M. Amin (bendahara), Amir Hamzah, M. Yusuf, Habib Sutan Maradjo, Hasan, Marah Hakim, Teuku Hasan Glumpang Minyeuk (komisaris) dan Aboe Bakar sebagai penasihat.

Para pengurus sepakat untuk mengumpulkan uang sebagai modal dasar dan terkumpul dana sebesar f 300. Setelah setahun berjalan modal itu tinggal f 70 karena telah diambil oleh pengurus yang berpindah ke tempat lain. Untuk itu disusunlah pengurus baru dengan ketuanya Zainal Baharuddin, Abdullah Pakeh (sekretaris), Sutan Basar Kampung, H.M. Amin, M. Yusuf, Marah Hakim dan S.M. Oesman (komisaris).⁷

Dengan kepanitiaan baru maka pada tanggal 1 Juli 1930 diresmikan sekolah HIS Muhammadiyah yang pertama di Pidie dengan jumlah murid 70 orang dan dikumpulkan dalam satu kelas. Sebagai kepala sekolah yang pertama yaitu Mohammad Daoed juga sebagai guru ilmu pengetahuan umum dan Nasiruddin sebagai guru agama.

Peresmian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1930 dengan dihadiri oleh Tuan Van Schuttelen, Assistent Resident Pidie, Mohammad Hasan dan para cendekiawan dan pemuka masyarakat Pidie. Masyarakat Pidie menyambut positif atas berdirinya HIS Muhammadiyah ini sehingga dapat berkembang dengan baik. Di samping itu dengan adanya hasil Muktamar Muhammadiyah ke-22 di Semarang maka mulai tanggal 3 November 1933 hari libur Minggu diganti dengan hari Jumat dan perubahan ini telah terlebih dahulu dilaksanakan oleh Diniyah.

Diniyah ini mempunyai nama lengkap Diniyah al-Islamiyah. Namun kehadiran sekolah ini cukup merisaukan

⁷ *Ibid.*

masyarakat karena sekolah ini dicap oleh sebagian anggota masyarakat sebagai sekolah “kaum muda”. Diniyah ini ada sebelum HIS Muhammadiyah didirikan dan telah dibubarkan karena perkembangannya tidak begitu menggembirakan. Semua kekayaan termasuk surau dan tanah akhirnya diserahkan kepada Muhammadiyah.

Pada awal berdirinya HIS Muhammadiyah ini meminjam gedung Diniyah Muhammadiyah dan surau Muhammadiyah dengan diadakan perbaikan seperlunya. Setelah setahun berjalan barulah dapat didirikan sebuah gedung permanen diatas tanah yang dihadiahkan oleh Teuku Pakeh Mahmud di Peukan Pidie. Namun bangunan ini tidak dapat digunakan seterusnya karena letaknya agak jauh dari Kota Sigli sehingga banyak anak-anak yang enggan untuk bersekolah di sini. Dengan melihat kondisi tersebut maka pengurus Muhammadiyah berusaha mencari tanah di Sigli tetapi belum juga ditemukan. Selanjutnya pada tanggal 2 April 1933 diputuskan untuk membangun surau yang ada dan dibangun sebuah gedung setengah permanen untuk HIS. Peletakkan batu pertama dilaksanakan oleh Abdullah Pakeh yaitu Ketua Cabang Muhammadiyah Sigli. Pada awalnya di atas lahan surau tersebut hanya dapat dibangun tiga lokal dengan berdinding bambu dan beratap rumbia. Baru pada tahun 1935 secara berangsur-angsur bangunan tersebut diganti dengan kayu. Melihat kondisi yang belum membaik maka seorang saudagar yang bernama H.M. Amin mewakafkan tanah miliknya yang berada di dekat bangunan. Dengan adanya tambahan tanah dari saudagar Sigli tersebut maka bangunan yang sudah ada digabung dengan bangunan yang baru dan berjumlah 5 lokal.⁸

⁸ *Ibid.*, hlm. 15

Untuk meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah juga berencana mendirikan sebuah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) atau setingkat SMP . Akan tetapi dengan adanya keterbatasan tempat, tenaga pengajar dan lesunya situasi ekonomi pada saat itu maka rencana itu belum dapat diwujudkan.⁹

Dalam perkembangannya atas usaha pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah pada tanggal 1 September 1936 didirikan sebuah “*voorklas*” (taman kanak-kanak). *Voorklas* ini dipimpin oleh anggota Aisyiyah yaitu Sitti Hasanah. Sekolah ini berada di bawah pengawasan kepala HIS Muhammadiyah.

A.2 CABANG SABANG

Perkembangan pendidikan Muhammadiyah di Kota Sabang dimulai pada tanggal 1 Agustus 1971 dengan didirikannya sebuah SMP Muhammadiyah. Adapun latar belakang pendiriannya adalah adanya alasan pemerintah tidak akan membangun sebuah SMA di Sabang kecuali bila telah ada sedikitnya dua buah SMP. Padahal pada waktu itu baru terdapat 1 buah SMP Negeri, sehingga Muhammadiyah mendirikan sebuah SMP dan selanjutnya pemerintah segera mendirikan sebuah SMA Negeri Sabang .

Sebagai tenaga pengajar adalah para anggota Muhammadiyah atau simpatisannya dan sebagian guru SKKP di mana waktu itu gedung sekolah SKKP digunakan sebagai tempat belajar sambil menunggu pembangunan gedungnya. Pada perkembangannya sampai tahun 1975 dikarenakan kekurangan kelas maka dengan terpaksa meminjam kelas serta bangku SMA Negeri Sabang dengan persetujuan pemerintah. Namun sangat

⁹ *Ibid.*

disesalkan karena para keluarga Muhammadiyah kurang berminat untuk meyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah Muhammadiyah.¹⁰ Hal ini merupakan suatu kendala bagi perkembangan Muhammadiyah di bidang pendidikan yang belum didukung sepenuhnya oleh anggotanya sendiri.

C. CABANG ACEH UTARA

Perkembangan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di Aceh Utara yang diwakili oleh Muhammadiyah ranting Kuta Makmur (*Buloh Beureghang*) dan dalam tahap selanjutnya sudah menjadi cabang tidaklah begitu menonjol. Hal tersebut terlihat kegiatannya yaitu membangun sebuah sekolah dengan cara bergotong royong dengan mengerjakan sawah sebagai lokasi sekolah yang berlangsung pada tahun 1946 –1949. Pada tahun yang sama mengirimkan 7 orang anak yatim Muhammadiyah ke Kutaraja untuk dididik di Panti Asuhan Muahmmadiyah dan membuka sebuah SMP pada tahun 1953.

Kegiatan atau usaha yang telah dilakukan oleh Cabang Bireun antara lain: (a) pada tahun 1935 membangun sebuah sekolah di Jalan Jati di atas sebidang tanah wakaf dari T. Haji Sjik Djohan Alamsyah (*uleebalang* Peusangan), (b) pada masa permulaan kemerdekaan Muhammadiyah dan 'Aisiyah turut berjuang melalui organisasi Hizbullah, Sabilillah, dan PMI, (c) mendirikan gedung Darul Arqam, (d) setelah peristiwa Aceh atau yang dikenal dengan DI/TII. Atas inisiatif Syamsuddin Ali , A. Aziz Muin dan H. Ambia, maka didirikan sebuah SMP di Bireun pada tanggal 8 Februari 1954, (e) atas inisiatif A. Djaliil (Aboe Lie) dan Guru SMP Muhammadiyah, dibangunlah sebuah PGA

¹⁰ Ibid., hlm. 26

Muhammadiyah (f) pada tahun 1963 dibuka sebuah SR Muhammadiyah, namun hanya berjalan selama 2 tahun (g) atas inisiatif M. Ali Sabi, BA, dan M. Husin Maun, didirikanlah sebuah SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah ini hanya bertahan sampai dengan tahun 1970 dan kemudian ditutup. Adapun kendala yang dihadapi biasanya adalah kekurangan siswa yang berminat terhadap sekolah Muhammadiyah.¹¹

A.4 CABANG ACEH TENGAH

Sebelum Muhammadiyah masuk ke daerah Aceh Tengah telah tersebar berita mengenai kegiatan Muhammadiyah. Namun dalam kabar tersebut yang menonjol hanyalah hal-hal yang negatif. Misalnya Muhammadiyah telah dicap sebagai “Agama Baru”, “Agama yang kolot”, atau sebagai “Kaum Wahabi”.¹² Adapun tokoh yang memasukkan gagasan Muhammadiyah ke Takengon adalah P.K. Abdul Madjid (PK kepanjangan dari Paya Kumbuh).

Setelah berdirinya Muhammadiyah maka segera didirikan Diniyah dan Langgar Kota yang sekarang ini telah menjadi mesjid kota yang besar. Selanjutnya didirikan Muhammadiyah Cabang Tritit yang mendirikan Diniyah Muhammadiyah dengan nama “Jacob School”. Adapun alasan pemakaian nama tersebut adalah untuk mengatasi reaksi masyarakat pada waktu itu yang anti atau tidak suka pada Muhammadiyah. Ide tersebut muncul dari penguasa kolonial pada masa itu yaitu Raja Ilang yang mengatakan bahwa sekolah tersebut jangan membawa nama

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37

¹² *Ibid.*, hlm. 50.

Muhammadiyah demi kelancaran dalam prosesnya. Secara kebetulan pula ia mengusulkan nama “Jacob School” yang sesuai dengan nama anaknya M. Jacob. Pada tahap awal jumlah muridnya adalah 50 orang putra dan putri. Dari tahun ke tahun perkembangannya cukup menggembarakan dengan bertambahnya jumlah murid. Sehingga sekolah ini menjadi terkenal di Tritis.¹³

Madrasah “Jacob School” akhirnya pindah dari Simpang Tritis ke Tunggul Nam pada tahun 1935. Lokasi itu terletak antara desa Tritis dengan Uning Tritis. Dengan menempati lokasi yang baru maka namanya sudah berubah yaitu “Madrasah Muhammadiyah Uning Tritis”. Setelah berganti nama barulah masyarakat umum tahu bahwa “Jacob School” adalah sekolah di bawah asuhan Muhammadiyah. Meskipun mengetahui bahwa sekolah tersebut di bawah naungan Muhammadiyah masyarakat tetap bangga dengan sekolah tersebut karena telah berhasil mencetak kader-kader Muhammadiyah yang berhasil. Misalnya bekerja sebagai guru, pendakwah, petani dan lain sebagainya. Guru-guru yang terlibat pada waktu itu adalah Tg. Jamaluddin Rauf, Tgk. Abdul Latif Rusydi, Tgk. Siti Aisyah, Tgk. Sulthan Amin dan Tgk. Moh. Adam.

Pada tahun 1950 H.A. Bangkit telah memwaqafkan tanahnya untuk Muhammadiyah tanah seluas 168 x 160 meter yang terletak di Blang Panas. Dengan adanya waqaf ini maka Madrasah Muhammadiyah dipindahkan dari Uning Tritis ke Blang Panas. Di tempat yang baru ini berubah menjadi Sekolah Dasar Muhammadiyah Cabang Tritis. Sebagai pengajar di SDM tersebut diantaranya Tgk. M. Ali Jadun, Tgk. Sulthan Amin, Tgk. M. Adam, dan Tgk. Siti Aisyah.

¹³ *Ibid.*, hlm. 55

Cabang lain yang berkiprah dalam bidang pendidikan adalah Simpang Tiga Bale. Pada zaman Belanda di daerah ini telah lahir organisasi yang bernama “Pendidikan Islam” yang berpusat di Takengon dengan dipimpin oleh Ustaz Abdul Jalil seorang alumni dari Al-Irsyad Surabaya. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan sehingga masyarakat menjadi simpati dengan kegiatannya. Dengan adanya simpati yang cukup besar dari masyarakat menyebabkan dalam waktu yang singkat berhasil dibangun sebuah sekolah Organisasi Pendidikan Islam yang menganut aliran modern sejalan dengan paham Muhammadiyah.

Pada tahun 1956 Muhammadiyah Simpang Tiga Bale berhasil mendirikan sebuah Sekolah Rakyat di bawah pimpinan Maryam Ibrahim. Adapun gedung sekolahnya dipinjam dari masyarakat melalui kepala kampung Bale Simpang Tiga yaitu Ismail Amin Abbas. SR ini kemudian berubah menjadi “Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah” (MIM) di bawah pimpinan M. Amin Yunus pada tanggal 28 Juni 1962

A.5 CABANG ACEH TIMUR

Perkembangan sejarah pendidikan Muhammadiyah di Aceh Timur khususnya telah dimulai pada zaman Jepang di mana Muhammadiyah Cabang Langsa. Mampu mendirikan sebuah Sekolah Rakyat (SR) setingkat SD. Kemudian pada tahun 1948 di atas tanah setapak didirikanlah SMP Muhammadiyah hingga dapat mempunyai gedung permanen pada tahun 1949. Adapun staf pengajar yang terlibat di antaranya T. Hitam Muli, Yacob Muli, Ustaz Mansur dan Ustaz Radiman.

Dengan perkembangan yang cukup menggembirakan maka dilanjutkan dengan pendirian sebuah SMA Muhammadiyah dengan lokasi belajar masih bergabung dengan SMP. Sehingga

pada waktu itu hanya ada 2 (dua) buah SMA di Aceh yaitu SMA Negeri Banda Aceh (SMUN 1 Banda Aceh sekarang) dan SMU Muhammadiyah Langsa.

Seiring dengan kebijakan pemerintah waktu itu yang memberikan peluang untuk mendirikan sekolah negeri, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan Muhammadiyah. Dengan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Muhammadiyah terutama masalah minat siswa untuk masuk sekolah Muhammadiyah menyebabkan pada tahun 1961 SMA Muhammadiyah Langsa ditutup sedangkan SMP masih bisa beroperasi. Setelah ditutupnya SMA maka didirikan sebuah PGA Muhammadiyah dan juga sebuah Diniyah Muhammadiyah. Namun beberapa waktu kemudian sekolah ini pun juga ditutup karena kekurangan siswa.

Amal usaha bidang pendidikan yang telah ditempuh oleh Muhammadiyah cabang Kuala Simpang dimulai dengan dibangunnya Sekolah Diniyah Muhammadiyah Kuala Simpang tahun 1928. Selanjutnya pada tahun 1930 sebuah HIS Muhammadiyah didirikan dengan pimpinan Bapak Mukhtar yang mempunyai jumlah murid 100 orang dengan tenaga pengajar 5 orang guru. Di samping tenaga pengajar ada pula tenaga penilik HIS Muhammadiyah yaitu Raden Suwandi dan Werjo Sunjoyo.

Perkembangan pendidikan setelah kemerdekaan mengalami kemajuan dengan didirikannya Sekolah Rendah Muhammadiyah Cabang Kuala Simpang. Animo masyarakat terhadap pendirian ini sangat besar terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat yang mengirimkan anaknya untuk sekolah di sini. Selanjutnya pada tahun 1952 mendirikan SMP Muhammadiyah dengan tujuan untuk menampung lulusan dari HIS Muhammadiyah yang telah ada terlebih dahulu. Namun menjelang tahun 1960 dengan adanya sekolah negeri dan swasta

yang semakin banyak jumlahnya menyebabkan sekolah Muhammadiyah kekurangan siswa. Sebagai konsekuensi tidak adanya murid maka sekolah tersebut dengan terpaksa ditutup.

Pada masa tahun 1970 sekolah yang masih bertahan yaitu SR (sekolah rakyat) (kemudian menjadi SD) Muhammadiyah. Sekolah ini masih diminati oleh sebagian besar anggota masyarakat meskipun selalu dihadapkan pada permasalahan yang cukup rumit. Pada tahun 1970-an rintangan ini terletak pada terbatasnya murid dan pada tahun 1980 adanya keterbatasan dana sehingga untuk menjadikan sekolah Muhammadiyah menjadi baik secara fisik dan sumber daya manusianya menjadi sangat sulit.

A.6 CABANG ACEH TENGGARA

Perkembangan pendidikan Muhammadiyah di Kutacane diawali pada tahun 1954 dengan didirikannya SR Muhammadiyah. Adapun sebelum menjadi SR Muhammadiyah bernama "Sekolah Agama" yang dimiliki oleh masyarakat Islam dalam wilayah Kutacane. Pada saat Muhammadiyah didirikan kondisi sekolah tersebut tersendat-sendat karena berbagai hal, sehingga oleh masyarakat diserahkan kepada Muhammadiyah untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya.

Di komplek SR Muhammadiyah tersebut selanjutnya juga didirikan Diniyah dan SMP Muhammadiyah. Sampai dengan tahun 1970-an kondisi sekolah-sekolah ini masih berjalan dengan baik.

Cabang lain yang dapat mendirikan sekolah PGA (Pendidikan Guru Agama) Muhammadiyah adalah Cabang Blang Kejeren pada tahun 1958. Dalam perjalanannya yang singkat PGA tersebut telah menghasilkan calon guru dan kebanyakan di

antara mereka telah menjadi guru di MIN Gayo Luas. Selanjutnya pada tahun 1971-1972 Muhammadiyah Cabang Blang Kejeran membuka sekolah SD Muhammadiyah dan pada tahun 1972-1973 didirikan pula Diniyah Muhammadiyah dan Taman Kanak-kanak Aisyiyah.

A.7 CABANG ACEH BARAT

Perkembangan pendidikan di Aceh Barat dimulai pada tahun 1950 dengan didirikannya SD Muhammadiyah dan memiliki guru dari Sumatera Barat yang bernama Amir Zulkarnain beserta istrinya dan langsung mengajar di sekolah tersebut. Adapun kepala sekolah waktu itu adalah M. Yusuf pensiunan guru SMP Negeri yang bertanggung jawab mengenai dana untuk membayar honor guru dan membeli peralatan sekolah.

Selanjutnya tahun 1956 didirikan sekolah SMP Muhammadiyah yang dipelopori oleh Abbas Hasyim dan Tgk. Abbas. Mereka dapat mengusahakan sebidang tanah yang dananya didapatkan dari anggota Muhammadiyah. Setiap anggota diminta untuk menyediakan dana untuk pembelian tanah 1 meter. Selain itu sumbangan berasal dari Komandan Koren 012/T. Umar yaitu Rivai Harahap dan Kepala Pekerjaan Umum A. Kasim Zubir.

Sebagai gambaran sekolah Muhammadiyah yang ada di Aceh Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4
Keadaan Pendidikan Muhammadiyah di Aceh Barat
sampai tahun 1970-an

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Jumlah
1	Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM 6 Tahun)	Jeuram	1
		Sinabang	1
		Meulaboh	1
2	Sekolah Menengah Pertama	Jeuram	1
3.	Pendidikan Guru Agama Pertama dan Atas Muhammadiyah	Sinabang (PGAP)	1
		Meulaboh (PGA)	1
4.	Sekolah Diniyah Muhammadiyah (4 Tahun)	Meulaboh	1
		Alue Bili	1
		Sinabang	1
		Simpang Peut	1
	Jumlah		10

Sumber : Data diolah

Pada tahun 1971 cabang Muhammadiyah Meulaboh mendirikan SMA Muhammadiyah yang dikepalai oleh Usman Abdullah yang diikuti dengan pembukaan dua fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Tarbiyah. Kedua fakultas ini bernaung di bawah Universitas Muhammadiyah Banda Aceh dengan rektor Prof. Drs. Sumarmo dan dengan sekretaris Drs. Bakhrum Yunus. Adapun pendirian kedua fakultas ini berkat adanya kerjasama dengan berbagai pihak yaitu : Majelis Pendidikan Muhammadiyah (M. Idris Yusuf), Zaid Hayyi' SH. (ketua panitia pendirian), Drs. A.R. Ishaq, selaku Ketua Dewan Kurator, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat serta keluarga Muhammadiyah dan anggota muslim lainnya.¹⁴ Di Banda Aceh telah berdiri Universitas Muhammadiyah yang memiliki Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM), Akademi Publisistik.¹⁵

Pada saat itu Fakultas Keguruan mempunyai 2 jurusan yaitu jurusan Civic Hukum dan jurusan Ilmu Hayat, sedangkan Fakultas Tarbiyah memiliki satu jurusan yaitu jurusan Ilmu Agama (Syari'ah). Dalam kondisi yang banyak tantangan akhirnya kedua fakultas ini akhirnya tidak dapat beroperasi lagi yang disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan, terbatasnya tenaga dosen, adanya larangan dari Rektor Universitas Syiah Kuala terhadap pendirian lembaga pendidikan swasta dan lain sebagainya. Meskipun lembaga pendidikan ini seperti pohon yang mati

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 100

¹⁵ Bakhrum Yunus. "Sejarah Singkat Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Aceh" dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daserah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995, hlm. 411.

sebelum berbuah, ia tetap dicatat oleh sejarah sebagai lembaga pendidikan pertama yang muncul di pesisir Barat Aceh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Muhammadiyah terhadap pendidikan meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Oleh karena sudah menjadi semangat warga Muhammadiyah untuk selalu komitmen terhadap dakwah dan pendidikan.

A.8 CABANG ACEH SELATAN

Gagasan mengenai Muhammadiyah sudah mulai menyebar pada tahun 1920-an yang diikuti oleh ikut sertanya para pemuda pergi ke Tanah Minang untuk menuntut ilmu. Sebagian besar mereka belajar di Tawalib School. Menjelang tahun 1927 sudah puluhan pemuda yang telah kembali belajar dari Tanah Minang diantaranya dari : Tapak Tuan, Meukek, Labuhan Haji, Blang Pidie dan sebagainya. Dalam perkembangannya pada tahun 1920 telah berdiri Tawalib School di Tapak Tuan dan Labuhan Haji dengan cara mengikuti model Tawalib di Tanah Minang yang bersifat modernis atau progresif. Pada saat itu pemerintah Belanda merasakan adanya kegiatan yang menjurus pada politik sehingga Belanda memutuskan untuk membubarkannya. Dengan ditutupnya sekolah ini mempunyai akibat terhadap proses belajar para murid sehingga mereka terpaksa melanjutkan sekolah ke Sumatera Tawalib Padang Panjang Sumatera Barat. Setelah beberapa tahun mereka kembali ke Aceh Selatan dan keinginan untuk mendirikan Muhammadiyah semakin besar sehingga pada tahun 1927 Muhammadiyah di Aceh Selatan berdiri.

Selain hal tersebut di atas pada tahun 1956 Muhammadiyah Cabang Alue Sungai Pinang telah berdiri SRI yang didirikan oleh Mujahiddin. Pada awal mulanya sekolah ini mempunyai murid sebanyak 100 orang yang dikepalai oleh

M.Amin Nyak Geh dan tahap berikutnya pengelolaannya diserahkan kepada Muhammadiyah yang kemudian berganti nama MIN.

Sampai dengan tahun 1993 jenis sekolah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah bertambah dengan kehadiran STM, SPP (Sekolah Pertanian dan Peternakan), MAM (Madrasah Aliyah Muhammadiyah), SPK (Sekolah Perawat Kesehatan), MTs (Madrasah Tsanawiyah), MIM (Madrasah Islam Muhammadiyah), dan Pesantren. Dalam kurun waktu ini juga tidak sedikit sekolah Muhammadiyah yang terpaksa tutup karena kekurangan murid, seperti SMA Muhammadiyah di Meureudu, Bireun dan Simpang Tiga yang hanya muncul beberapa tahun dan kemudian ditutup.¹⁶

Sampai dengan tahun 1993 jumlah sekolah yang bernaung di bawah Muhammadiyah di Aceh dapat dilihat pada lampiran I dan II.

Keterlibatan pembangunan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tidak boleh diabaikan karena sejak zaman pemerintahan Belanda hingga masa kemerdekaan banyak sekali yang telah diperbuat oleh Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan anak negeri. Meskipun dalam perjalanannya mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi kehidupan bernegara saat itu.

Selain itu dalam organisasi Muhammadiyah terjadi suatu transformasi struktural dari watak pembaharu pemikiran (tajdid) ke watak perbuatan (action, amal). Hal ini bisa dipahami dalam kerangka tahapan sebuah proses yaitu amal merupakan tahapan operasional tesis-tesis pembaharuan yang telah diumumkan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 413.

sebelumnya. Sehingga pendidikan yang dilatarbelakangi oleh watak sosial membuat perkembangan pendidikan khususnya di Aceh menjadi lamban seperti terjadi pada kemacetan berfikir, adanya anggapan yang dilahirkan dari orientasi pemikiran bahwa organisasi ini harus memikirkan kepentingan orang banyak terutama kelas rendah, miskin dan kurang terpelajar. Hal ini berarti bahwa semua amalan Muhammadiyah harus berorientasi dan dinikmati oleh rakyat banyak sehingga lahirah sekolah Muhammadiyah tidak boleh mahal karena tidak akan terjangkau oleh rakyat kebanyakan.¹⁷

Untuk menyejajarkan sekolah Muhammadiyah dengan sekolah swasta lainnya diperlukan suatu terobosan yang sangat radikal yaitu mencari format sekolah Muhammadiyah yang mampu melahirkan pembaru zaman ini. Adapun caranya dengan menerapkan syarat profesional dalam pendidikan Muhammadiyah dan meninjau kembali kurikulum pendidikan Muhammadiyah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan warga Muhammadiyah untuk lebih peduli lagi terhadap pendidikan yang berformat Muhammadiyah. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh beberapa daerah misalnya di Yogyakarta, Sumatera Barat dan lainnya. Untuk itu Muhammadiyah Aceh diharapkan agar mampu mengantarkan generasi muda Islam melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk memasuki zaman modern dengan penuh percaya diri, penuh pengetahuan yang relevan dan penuh kearifan

¹⁷ Ahmad Tafsir, " Pendidikan: Alternatif Pembaruan Muhammadiyah". dalam Usman Yatim. *Muhammadiyah dalam Sorotan*. (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1993), hlm. 305 – 307.

yang islami sekaligus menegakkan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁸

B. Pembangunan Muhammadiyah dalam Bidang Politik

Ketika K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 mendirikan organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah kondisi tanah air kita masih terbelenggu oleh rantai penjajahan sekaligus dalam kondisi rakyat yang sangat terbatas. Terbatas hak-haknya dalam mengemukakan pendapat, baik dengan lisan atau tulisan, terbatas dalam kesempatan menikmati pendidikan, terbatas dalam memperbaiki tingkat kesehatan, beroleh dalam kesempatan kerja dan keikutsertaannya dalam bidang politik serta pemerintahan dan lain sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa keterbatasan itu mencerminkan kehidupan sebagai “anak negeri jajahan”.¹⁹

Dalam kondisi yang serba terbatas ini semakin memperkuat keinginan K.H. Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan untuk melenyapkan keterbatasan-keterbatasan melalui aktivitas organisasi. Dengan demikian setelah Muhammadiyah berdiri lebih banyak bergerak dalam bidang agama, sosial, dan kesehatan sehingga membantu mempermudah diterima oleh masyarakat luas.

¹⁸ Mochtar Buchori. “Sekolah Muhammadiyah dalam Kenangan dan Harapan” dalam *Muhammadiyah dalam Sorotan*. (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1993), hlm. 326.

¹⁹ Baharuddin Yahya. “Muhammadiyah dalam Konstalasi Politik Nasional”. dalam *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. Banda Aceh: Gua Hira, 1995: 75.

Akan tetapi perkembangan Muhammadiyah di Aceh yang berkaitan dengan bidang politik mempunyai suatu keistimewaan. Dikatakan istimewa karena dalam perjalanannya peranan politik Muhammadiyah sangat menonjol dibandingkan dengan daerah lain. Begitu juga bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang datang dari Jawa misalnya Budi Utomo, Serikat Islam, Insulinde, Taman Siswa, Jong Islamieten Bond (JIB) dan Parindra, Muhammadiyah merupakan organisasi yang relatif dapat hidup dan berkembang di Aceh. Sekelompok cendekiawan Aceh menjadi anggota dan pendukung Muhammadiyah. Melalui organisasi ini mereka menyalurkan aspirasi-aspirasi politik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya bersifat sosial sehingga telah memberi warna tersendiri bagi Muhammadiyah di Aceh.²⁰ Di Jawa gerakan Muhammadiyah menitikberatkan pada bidang agama dan sosial maka di Aceh juga turut dalam gerakan-gerakan politik.²¹

Adapun gerakan-gerakan Muhammadiyah dalam politik dimulai pada tahun 1931 pada saat Pemerintah Hindia Belanda di Aceh menghendaki supaya bahasa Aceh digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, untuk menggantikan bahasa Melayu (bahasa Indonesia) yang sudah digunakan sebelumnya. Adapun alasan yang diberikan pemerintah kepada rakyat Aceh adalah dengan menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar, murid-murid akan lebih cepat mengerti dan cepat menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Selain itu murid-murid juga akan dapat menulis dan

²⁰ A.J. Piekar. *Atjeh En De Orlog Met Japan*. (Den Haag: W. Van Hoeve, 1949), hlm. 17.

²¹ *Ibid.*

membaca bahasa ibunya sendiri dengan menggunakan huruf latin, sehingga bahasa Aceh sebagai bahasa literatur akan dapat dihidupkan kembali. Untuk melaksanakan maksud tersebut, pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Juli 1932 sebagai tonggak pemakaian secara resmi bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, pengganti bahasa Melayu.²²

Namun maksud pemerintah tersebut tidak disetujui oleh cendekiawan Aceh. Untuk menentang maksud tersebut pada tanggal 5 Maret 1932 membentuk panitia yang diketuai oleh Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong (di organisasi Muhammadiyah sebagai Konsul Muhammadiyah yang pertama untuk daerah Aceh) dan diwakili oleh Teuku Cut Hasan Meuraksa (sebagai konsul kedua). Untuk itu diadakan suatu rapat terbuka pada tanggal 6 Maret 1932 di Deli Bioscoop Kutaraja yang membahas tentang masalah bahasa pengantar. Sekitar 20 orang dari kalangan uleebalang dan juga selaku anggota Muhammadiyah secara terang-terangan menentang rencana tersebut dengan alasan akan menyebabkan tidak berkembangnya bahasa Melayu di daerah Aceh. Dengan demikian akan menghambat terwujudnya cita-cita persatuan nasional sebagaimana yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selain itu juga akan menghambat rakyat Aceh untuk mengerti bahasa tersebut yang amat diperlukan bagi pengembangan ekonomi mereka dalam berhubungan dengan suku-suku lain di daerah sekitar.²³

²² Rusdi Sufi. "Perkembangan Muhammadiyah dan Kiprahnya dalam Bidang Politik pada Masa Kolonial di Aceh". dalam *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. Banda Aceh: Gua Hira, 1995, hlm. 122 – 124.

²³ *Ibid.*, hlm. 125

Meskipun ada tentangan tersebut Pemerintah Belanda tetap bersikukuh untuk menjalankan program tersebut. Namun hanya sebagian saja dari sekolah-sekolah rakyat di Aceh yang menggunakan bahasa Aceh sebagai pengantar.

Selanjutnya kiprah Muhammadiyah dalam bidang politik yaitu pada waktu terjadi krisis ekonomi dunia yang juga membawa pengaruh dalam pemerintahan Hindia Belanda. Khususnya dalam bidang pendidikan di mana pada bulan Juli 1931 di Aceh terdapat 116 orang guru sekolah yang diberhentikan sebagai akibat dari adanya penghematan dalam pengeluaran biaya dengan cara mengurangi subsidi kepada sekolah-sekolah bahkan ada pula yang ditutup. Begitu pula dalam pengaturan tentang jumlah murid yang disesuaikan dengan jumlah guru misalnya sebelum tahun 1932 seorang guru dapat mengajar 45 orang murid, maka setelah tahun itu harus mengajar murid sejumlah 60 orang.²⁴

Melihat kondisi tersebut menyebabkan ketidakpuasan di kalangan cendekiawan sehingga pada tanggal 19 Juli 1932 bertempat di *Deli Bioscoop* Kutaraja mereka mengadakan rapat umum untuk memprotes tindakan pemerintah tersebut. Rapat ini diorganisir oleh PGHB (Perkumpulan Guru-guru Hindia Belanda) yang diketuai oleh Zainul Baharuddin, seorang guru HIS Muhammadiyah di Kutaraja. Rapat ini dihadiri oleh 600 orang. Sebagai pembicara juga hadir Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong yang mewakili Muhammadiyah. Inti pidatonya tokoh Muhammadiyah ini adalah bahwa di Asia Muka dan Philipina, keadaan pendidikan jauh lebih maju bila dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila di

²⁴ Ibid., hlm. 126

Indonesia didirikan sekolah-sekolah swasta dalam usaha untuk meningkatkan kecerdasan rakyatnya.

Peristiwa lain yang diprakarsai oleh Muhammadiyah pada waktu itu adalah peristiwa 27 Mei 1928 yang bertempat Kutaraja mengadakan suatu rapat umum yang diramaikan dengan pertunjukkan musik dalam rangka menggembleng rakyat agar menyokong usul kelebihan anggota-anggota yang berasal dari kalangan bumi putera untuk duduk dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat). Rapat ini diketuai oleh Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong yang dibantu oleh Ridwan Hajir seorang guru HIS Muhammadiyah asal dari Yogyakarta serta Muhammad Jailani (Jaksa Kepala Kutaraja sekaligus juga anggota Muhammadiyah cabang Kutaraja). Adapun keputusan rapat adalah pada bulan September 1928 akan dikirim suatu delegasi khusus ke negeri Belanda untuk memperjuangkan agar usul tersebut diterima oleh pemerintah Belanda. Dana berasal dari sumbangan anggota dan pengurus Muhammadiyah. Di samping itu juga akan diselenggarakan pertandingan sepakbola yang dipungut bayaran. Selain itu juga diputuskan, apabila biaya untuk pengiriman delegasi tersebut bersisa, maka sisanya akan digunakan untuk mendirikan HIS swasta di Kutaraja.²⁵

Pada tanggal 25 Desember 1928 diadakan rapat umum kembali yang berlangsung di *Deli Bioscoop* Kutaraja dan dihadiri oleh utusan-utusan Muhammadiyah dari : Kutaraja, Sigli, Langsa, Kuala Simpang dan juga dari Sumatera Barat; serta utusan dari perkumpulan "Al-Irsyaad" cabang Lhokseumawe. Rapat ini membicarakan tentang masalah ordonansi guru. Sehubungan

²⁵ *Ibid.*, hlm 128.

dengan masalah ini rapat memutuskan untuk mengajukan usul kepada pemerintah agar ordonansi guru tersebut dicabut.²⁶

Pada masa kolonial Belanda dan fasisme Jepang, dimensi politik Muhammadiyah ditampilkan dalam bentuk nahi munkar. Kebijakan Belanda dalam pendidikan agama dan pelaksanaan hewan korban yang dikenal dengan istilah *Guru Ordinansi* dan *Slag Blasting* serta peraturan fasisme Jepang yang memaksa pelaksanaan *saekerei* (tunduk ke arah matahari terbit) mendapat tentangan dari Muhammadiyah. Baik *Guru Ordinasi* dan *Slag Blasting* apalagi tindakan *saekerei* benar-benar mengganggu keyakinan serta aktivitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Akhirnya mereka mencabut kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut setelah disadari hal itu akan mempengaruhi hegemoni mereka di bumi Nusantara.²⁷

Pada masa jayanya Partai Komunis Indonesia (PKI), pengurus Muhammadiyah di Aceh Utara mendapat ancaman dari PKI. Pada waktu itu PKI menentang Pemerintah Daerah dan juga Muhammadiyah karena telah menjalankan dakwah sampai ke kampung-kampung. Sedangkan PKI saat itu juga gencar meluaskan pengaruhnya sampai ke desa-desa. Dengan gencarnya dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah mampu mengurangi bahkan menghancurkan pengaruh PKI . Oleh karena itu PKI selalu mengancam para muballigh Muhammadiyah dan menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan dakwahnya.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M. Yunan Yusuf, "Muhammadiyah dan Politik", dalam Usman Yatim (Ed.) , *Muhammadiyah dalam Sorotan, op.cit.*, hlm. 356

Oleh karena adanya alasan takut atau karena rayuan PKI hanya ada dua organisasi Islam yang berani menentang PKI termasuk Muhammadiyah. Pada tahun 1964 hasutan dan ancaman PKI semakin meningkat, maka Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Aceh Utara melaksanakan kursus kader yang pengikutnya berjumlah 212 orang. Kegiatan ini semakin membuat PKI marah dan kemudian PKI menyampaikan sebuah resolusi kepada pemerintah agar pemerintah memberhentikan orang-orang Muhammadiyah yang duduk dalam pemerintahan.

Pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Jawatan Penerangan Kabupaten Aceh Utara adalah Djaman Kasim, seorang tokoh Muhammadiyah. Dalam masa jayanya PKI, beliau selaku kepala memberikan penerangan juga mengeluarkan brosur tentang ideologi negara Pancasila dengan menunjukkan keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Tindakan ini membuat PKI tersinggung dan gusar karena hal ini dapat menghambat usaha PKI dalam menyebarkan ideologi komunis. Sehingga PKI mencap Djaman Kasim sebagai "Pendurhaka Pancasila" dan "Si Kepala Sinting" dan PKI segera meminta agar Djaman Kasim diberhentikan (diretul) dari jabatannya sebagai Kepala Jawatan Penerangan.²⁸

Menjelang Pemilu tahun 1971 Muhammadiyah Aceh Utara mendapat cobaan yang berat dengan keluarnya larangan dari pemerintah tentang pelarangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota partai politik atau organisasi masa yang berafiliasi dengan partai politik. Ketentuan ini tentu saja membuat ragu bagi anggota Muhammadiyah yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Meskipun telah disampaikan penjelasan kepada

²⁸ Bakhrum Yunus, *op.cit.*, hlm. 46

pemerintah daerah bahwa Muhammadiyah tidak ada hubungannya dengan PARMUSI, namun alasan tersebut tidak dapat diterima oleh pemerintah. Oleh karena PARMUSI dibentuk Muhammadiyah karena itu pasti ada hubungannya dengan organisasi tersebut.

Sebagai akibatnya banyak anggota Muhammadiyah yang keluar bahkan tidak berani lagi mendekati kantor Muhammadiyah. Pemerintah tetap memperhatikan mereka yang keluar sedangkan pegawai yang tetap bertahan sebagai anggota Muhammadiyah mendapat berbagai macam ancaman dan intimidasi. Dengan kondisi demikian dari 24 cabang Muhammadiyah yang ada menjadi tinggal 6 cabang saja yang masih aktif. Sementara itu pengurus pimpinan cabang tidak lengkap lagi, ada cabang yang hanya memiliki 4-5 pengurus.²⁹

Sebagaimana cabang yang lain Muhammadiyah di Cabang Bale Simpang Tiga mengalami cobaan dan rintangan yang drastis. Mental para anggota Muhammadiyah diteror sehingga sebagian besar anggota Muhammadiyah keluar dan masuk ke Golongan Karya. Ranting-ranting yang baru pun juga mengalami pasang surut. Pada akhir tahun 1971 semua ranting sudah tidak ada, jumlah anggota menyusut begitu juga semua amal usahanya terhenti misalnya bidang pendidikan. Sebelum Pemilu anggota Cabang Bale Simpang Tiga berjumlah 684 tetapi setelah Pemilu tinggal 37 orang.

Ketika badai Pemilu memporakporandakan bangunan Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah ditinggal oleh anggotanya baik secara diam-diam atau terang-terangan dan ketika hasutan, firmah maupun tekanan yang menimpa organisasi

²⁹ *Ibid.*, hlm. 30

ini ternyata masih ada yang bertahan. Salah seorang diantaranya adalah Bapak Jim Aman Ali Imran. Beliau tetap dengan tegar berusaha menjalankan roda organisasi Muhammadiyah meskipun dengan jumlah anggota yang sangat terbatas.³⁰

Dalam Konferensi Muhammadiyah Wilayah Aceh ke-26 yang berlangsung di Kutaraja yang berlangsung dari tanggal 26 – 31 Mei 1962 diputuskan adanya pembagian ke dalam daerah-daerah . Pembagian Muhammadiyah ke dalam daerah-daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa sejak tahun 1960 terutama setelah peristiwa G-30-S/PKI pertumbuhan Muhammadiyah cukup pesat. Adapun pembagian daerahnya sebagai berikut :

1. Muhammadiyah Daerah I yang meliputi :

- a. Kabupaten Aceh Timur
- b. Kabupaten Aceh Utara
- c. Kabupaten Aceh Tengah
- d. Kabupaten Aceh Tenggara

2. Muhammadiyah Daerah II meliputi :

- a. Kabupaten Pidie
- b. Kabupaten Aceh Besar
- c. Kabupaten Aceh Barat

3. Muhammadiyah Daerah III meliputi :

- a. Kabupaten Aceh Selatan

Dalam Konferensi Wilayah Muhammadiyah pada tahun 1964 Muhammadiyah Daerah I dipecah menjadi Daerah I dan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 60

Daerah IV. Muhammadiyah Daerah I hanya meliputi Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara sedangkan Muhammadiyah Daerah IV meliputi Aceh Utara dan Aceh Tengah.³¹ Dalam perkembangannya struktur Muhammadiyah disesuaikan dengan pemerintahan sehingga akhirnya setiap daerah membentuk pimpinan daerahnya sendiri.

Pemilu 1971 bagi Muhammadiyah merupakan saat dimana mereka harus berjuang keras karena adanya gelombang besar yang menghadang. Para anggota yang berasal dari pegawai negeri harus meninggalkan Muhammadiyah karena berbagai macam intimidasi. Meskipun ada berbagai tekanan namun Muhammadiyah Kuala Simpang masih tetap tegak menjalankan ajaran-ajaran-Nya.

Secara politik keadaan Muhammadiyah pada masa pendudukan Jepang semakin suram karena situasi sosial ekonomi secara makro juga semakin buruk dan memberatkan. Beban yang paling berat adalah menyantuni anak yatim yang telah diasramakan di Muhammadiyah. Untuk itu diadakan rapat untuk membahas masalah tersebut dan diputuskan bahwa anak yatim akan diserahkan kepada keluarga Muhammadiyah yang mampu. Selanjutnya semua jenis kegiatan Muhammadiyah harus dihentikan kecuali bila pengurus atau warga Muhammadiyah melakukan sesuatu untuk kepentingan Jepang. Warga terpaksa harus menanam sejenis tanaman untuk kepentingan Jepang. Di samping itu pemerintah Jepang membenarkan Muhammadiyah melakukan amal usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan

³¹ *Ibid.*, hlm. 69

politik Jepang. Selama masa Jepang pimpinan Muhammadiyah Meulaboh tidak dapat berhubungan dengan pimpinan pusat.³²

Pada periode 1962 – 1965 Indonesia dalam kondisi tidak menentu terutama dalam masalah ekonomi dan politik. Kelesuan ini juga menimpa Muhammadiyah di Aceh. Namun periode ini juga merupakan awal Muhammadiyah mulai masuk ke kampung-kampung. H. Jaafar Hanafiah sebagai Ketua Pimpinan waktu itu telah “melunakkan” cara berdakwah para pengurus /muballigh Muhammadiyah dengan cara dia tidak pernah mengkritik siapa pun dalam dakwahnya bahkan sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah saat itu. Dakwah ini memusatkan perhatian kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan sehingga dengan cara demikian Muhammadiyah mulai dapat diterima di kampung-kampung.

Periode selanjutnya yaitu tahun 1965 – 1968 di mana pada masa ini banyak anggota masyarakat yang sadar betapa besarnya bencana yang dialami oleh umat Islam bila PKI menang. Meskipun peristiwa PKI di Aceh tidaklah sebesar peristiwa yang terjadi di Jawa. Oleh karena itu banyak umat Islam yang mulai tertarik untuk memasuki organisasi yang bernafaskan Islam termasuk Muhammadiyah sehingga saat itu banyak ranting baru muncul. Namun kondisi itu kembali surut menjelang pelaksanaan Pemilu 1971.

Dalam kondisi pemerintahan yang juga mengalami pasang surut maka pada tahun 1968 – 1971 musibah menghampiri Muhammadiyah Aceh yaitu yang disebabkan oleh keterlibatan dalam politik praktis. Pemerintah Pusat memberi mandat kepada Muhammadiyah (Djarnawi Hadikusuma) untuk membentuk sebuah partai politik dan partai ini kemudian diberi nama Partai

³² *Ibid.*, hlm. 94

Muslimin Indonesia (PARMUSI). Oleh karena promotor pendirian partai ini adalah Muhammadiyah, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganjurkan anggotanya agar memilih Parmusi dalam Pemilu tahun 1971.

C. Pembangunan Muhammadiyah Dalam Bidang Ekonomi Rakyat

Kehadiran organisasi Muhammadiyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu gerakan sosial keagamaan nyata telah berperan amat besar dalam membangun ekonomi rakyat di Aceh. Tentunya sebagai organisasi yang memiliki potensi besar baik dari segi kemampuan mengakumulasikan sumber pembelanjaan maupun dari segi pengakarnya Muhammadiyah tidak ditinggal oleh umat, organisasi ini dituntut supaya selalu survive untuk mencari jalan keluar guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Aceh dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Dengan demikian sudah saatnya Muhammadiyah mulai memprioritaskan bidang ekonomi sebagai salah satu misi gerakannya.

Muhammadiyah merupakan organisasi massa yang bercorak sosial religius yang mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensi dalam berbagai fase situasi ekonomi yang melanda Aceh. Lebih jauh lagi, Muhammadiyah adalah organisasi yang berkarakteristik *urban base*. Ini merupakan potensi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan perannya bagi pengembangan ekonomi kaum muslimin. Ekonomi rakyat Aceh kebanyakan terpusat pada wilayah *urban* dan dengan kian dominannya sektor industri dan jasa membuat kedudukan

kota-kota di Aceh menjadi semakin penting. Wilayah urban ini sekarang tidak terbatas pada kota-kota kabupaten dan kota, tetapi juga muncul kota-kota kecamatan yang potensial untuk dapat digarap oleh Muhammadiyah.

Banyak ahli mengajukan satu persyaratan penting bagi kemajuan ekonomi dan modernitas, yakni "etos kerja" sebagaimana diajukan oleh Weber tentang kebutuhan berprestasi. Banyak para santri yang berasal dari Muhammadiyah yang beretos kerja sangat tinggi. Pembaruan Muhammadiyah secara signifikan mempengaruhi tumbuhnya sikap kewiraswastaan di kalangan umat Islam di Aceh.

Cukup realistis jika Muhammadiyah dalam kegiatan ekonominya dipusatkan pada pada sektor distribusi dan jasa. Sektor inilah yang relatif terbuka bagi Muhammadiyah. Secara tradisional para pengusaha muslim berada pada sektor distribusi tingkat kecil dan menengah, dan karenanya menuntut perhatian Muhammadiyah. Organisasi ini selain dapat membuka usaha sendiri dalam sektor distribusi, juga menekankan pada sektor jasa, yang antara lain dapat diimplementasikan dalam bentuk hubungan bisnis, manajemen dan ketrampilan usaha lainnya bagi pengusaha kecil dan menengah. Muhammadiyah juga dapat berfungsi koordinatif atas para pengusaha muslim, menggali potensi dan kekuatan ekonomi mereka untuk pengembangan lebih terarah dan terpadu.

Di Aceh, Muhammadiyah tampaknya tidak ada peluang untuk mengembangkan industri berskala besar karena selain langkanya para pengusaha muslim di Aceh juga karena industri-industri besar sudah dikuasai oleh para konglomerat dan aset-aset perusahaan kebanyakan dimiliki oleh investor asing. Sampai saat ini boleh dibilang tidak ada orang Aceh yang tidak mengaku beragama Islam. Oleh karena itulah maka wajar jika Aceh

mendapat gelaran Serambi Mekah, karena kehidupan masyarakatnya sudah sangat Islami. Banyaknya mesjid dan tempat ibadah telah mengindikasikan hal tersebut. Bahkan dapat dikatakan, di Aceh jumlah mesjid dan meunasah lebih banyak daripada jumlah mukim dan desa. Lebih-lebih setelah diberlakukannya syari'at Islam pada era otonomi khusus ini, masyarakat Aceh menjadi semakin islami. Namun demikian, masyarakat Aceh yang Islami ini kehidupan ekonominya masih sangat memprihatinkan. Kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak rakyat Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan. Krisis moneter dan runtuhnya Orde Baru pada awal tahun 1998, serta terjadinya konflik yang berkepanjangan ikut memperparah keadaan ekonomi rakyat Aceh.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Muhammadiyah mau tidak mau harus memperhatikan kehidupan kaum dhuafa yang nota bene merupakan ummat yang hidup dalam keterbelakangan. Yang dapat dikerjakan oleh Muhammadiyah pada tahap awal ialah mempersatukan pengusaha-pengusaha kecil dalam suatu ikatan kerja sama. Organisasi yang dibentuk, yang bekerja seperti koperasi, bukan saja dapat memupuk modal untuk membantu pengusaha yang membutuhkan modal, tetapi juga turut meningkatkan organisasi dan manajemen perusahaan-perusahaan kecil tadi. Di samping itu, sikap mau kerja keras, percaya diri, optimis dalam menghadapi tantangan dan peluang, mau bekerja sama dan saling membantu terus menerus dipompakan oleh pengurus Muhammadiyah kepada para pengusaha. Usaha Muhammadiyah dalam bidang ini cepat membuahkan hasil; Banyak pengusaha kecil di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat meningkatkan usaha mereka dan sejalan dengan itu mereka mampu pula meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Bagi Muhammadiyah banyaknya anggota yang mampu akan memberikan dampak yang sangat baik. Para anggota yang

pengusaha dapat menyumbangkan sadaqah, infaq, zakat dan sebagainya kepada organisasi ini³³.

Adanya konflik dan situasi keamanan yang kurang menguntungkan, membuat dunia usaha dan perekonomian rakyat mengalami gangguan. Hal ini juga menjadi sebab mengapa perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh mengalami kemunduran. Usaha maksimal Muhammadiyah dalam mengentaskan kemiskinan sedikit atau banyak juga mengalami hambatan. Keadaan ini menunjukkan masih besar dan banyaknya tugas bagi pembangunan bangsa khususnya di Aceh, baik oleh pemerintah sebagai supra struktur dan juga oleh lembaga-lembaga swasta sebagai infra struktur termasuk Muhammadiyah. Masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata-mata, tetapi juga terkait dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, nilai-nilai sosial budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya dilakukan secara parsial, tetapi juga harus secara komprehensif.

Untuk mengatasi gangguan keamanan dan konflik yang berkepanjangan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk menyelesaikannya secara damai atau dialog. Jika masalah keamanan ini dapat diatasi, maka pembangunan ekonomi rakyatpun akan dapat berjalan dengan lancar. Usaha-usaha pemerintah dan lembaga-lembaga lain termasuk Muhammadiyah juga akan dapat melakukan kiprahnya dalam mengangkat kehidupan ekonomi rakyat menjadi lebih baik.

³³ Bakhrum Yunus, "Misi dan Strategi Muhammadiyah Dalam Upaya Penegakan Nilai-Nilai Keislaman dan Kemanusiaan" dalam *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh : Penerbit Gua Hira, 1995), hlm. 49.

Jika kita hanya menyerahkan kepada pemerintah saja untuk melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat, tentu kurang berhasil karena Pemerintah Daerah juga mempunyai keterbatasan dalam menciptakan peluang kerja maupun dalam menampung tenaga kerja. Oleh karena itu peranan swasta maupun lembaga-lembaga sosial sangat diperlukan. Dalam hal ini Muhammadiyah tampil sebagai penyelamat dalam mengentaskan rakyat dari jerat kemiskinan dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam Islam secara tegas Allah telah memerintahkan ummat Islam untuk menunaikan zakat sebagai salah satu rukun yang wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang mampu. Ini tercermin dari disebutkan kewajiban berzakat yang selalu berbarengan dengan kewajiban shalat dalam Al Qur'an. Menurut Achmad Tirtosudiro, zakat adalah pengambilan sebagian harta orang muslim yang mampu untuk diberikan kepada orang muslim yang kurang mampu. Dengan kata lain zakat adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang muslim dari orang muslim untuk orang muslim.

Tentunya kita telah dapat mengambil salah satu hikmah bahwa zakat dan harta agama lainnya merupakan suatu ritual keagamaan yang memiliki dimensi sosial yang amat nyata dan pesan moral kewajiban membantu oleh yang mampu kepada yang kurang atau tidak mampu. Zakat dan harta agama lainnya, seperti infaq dan sadaqah memiliki potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim di samping sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai biaya yang ditimbulkan akibat hubungan antar manusia di dalam Islam.

Jika selama ini manfaat dari pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah belum mampu berperan besar dalam melepaskan kaum dhuafa atau mustahid dari jeratan kemiskinan sehingga mereka

menjadi muzaki. Hal ini lebih disebabkan oleh kurang besarnya jumlah zakat dan harta agama lainnya yang dikelola dan didistribusikan secara baik dan benar, efektif dan efisien. Pemanfaatan zakat selama ini masih terbatas pada kepentingan konsumsi. Oleh karena itu belum mampu menjadi suatu modal kerja yang produktif bagi yang berhak menerimanya (Mustahid).

Dirintis dan digalakkannya penerimaan zakat, infaq dan sadhaqah melalui BASIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) khususnya yang mulai dikelola dengan koordinasi yang baik yang memiliki jaringan informasi dari pusat sampai ke daerah, merupakan usaha ke arah pemanfaatan hasil zakat dan harta agama lainnya secara optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu dalam usaha merubah mustahid menjadi muzaki, dari yang berhak menerima menjadi pemberi³⁴. Akan tetapi masih banyak kekeliruan-kekeliruan dalam masyarakat yang ditemui selama ini seperti penyerahan sebagian harta penduduk kepada pengurus mesjid.

Penyerahan harta tersebut misalnya dalam bentuk tanah sawah atau tanah kebun, seluruh hasilnya sering dimanfaatkan hanya oleh individu dan sama sekali tidak dapat menambah perbendaharaan harta agama. Banyak sekali harta agama dalam masyarakat yang hilang percuma tanpa adanya suatu pengelolaan yang baik dan benar.

Sangat ironis jika hampir semua umat Islam mengeluh karena kekurangan dana dalam mengembangkan dan meningkatkan syiar Islam. Pada hal ummat Islam adalah ummat

³⁴Zulkifli Husin, "Peranan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Ummat", dalam *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh : Penerbit Gua Hira, 1995), hlm. 103.

mayoritas yang hampir sebagian besar mempunyai kemampuan dan potensial yang besar dalam bidang harta benda. Keluhan-keluhan ini tidak lain disebabkan oleh semrawutnya penataan dan pengelolaan harta agama. Oleh karena itu peranan Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi rakyat kiranya perlu lebih terarah kepada empat hal pokok³⁵, yaitu :

1. Membantu kembali manajemen keuangan harta agama.
2. Mengidentifikasi semua sumber yang dapat meningkatkan jumlah harta agama.
3. Memobilisasikan semua sumber-sumber yang ada dan memanfaatkan sesuai dengan aturan yang disyaratkan dalam agama Islam.
4. Mengusahakan pembentukan kembali Baitul Maal sampai ke tingkat kecamatan, sehingga sistem perekonomian seperti yang dilakukan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab dapat berkembang pada masyarakat Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian, peranan Muhammadiyah dalam hal ini akan lebih berdaya guna sebagai agen pembangunan umat dan agama sekali gus sebagai agen pembangunan yang berwawasan nasional.

Dengan berhasilnya pengelolaan zakat, infaq dan harta agama lainnya secara baik, benar, efektif dan efisien maka umat Islam di Aceh diharapkan akan memiliki sumber dana yang besar sehingga banyak program-program dan kegiatan pengembangan umat dapat dilaksanakan.

³⁵ *Ibid.*, hlm.104.

Salah satu strategi yang dianggap cukup penting terhadap pemecahan masalah ekonomi umat adalah pengembangan usaha kecil. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengusaha kecil dan lemah terdiri dari umat Islam. Dengan dibinanya kemampuan pengusaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah, diharapkan akan banyak di antara mereka yang dapat mandiri dan mengembangkan diri di samping akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga permasalahan ekonomi umat yang selama ini seperti pengangguran dan kemiskinan secara bertahap akan dapat diatasi³⁶.

Pemerintah dalam hal ini harus memiliki komitmen untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi golongan ekonomi lemah. Undang-undang monopoli untuk membatasi gerak usaha-usaha besar dan memberi ruang hidup bagi pengusaha kecil adalah sangat mendesak untuk direalisasikan. Di samping itu, harus ada usaha-usaha untuk membantu pengusaha kecil dalam mendapatkan kredit perbankan agar dapat mengembangkan usahanya. Kemitraan dengan usaha-usaha skala besar juga sangat diperlukan dalam bentuk kerja sama saling menguntungkan.

Pada situasi seperti ini kepeloporan organisasi Muhammadiyah memiliki tempat yang sangat strategis, baik dalam menjembatani antara pengusaha kecil dengan sumber dana maupun secara langsung terlibat dalam pembicaraan kualitas sumber daya manusia dari pada pengusaha kecil/lemah.

Beberapa usaha yang kiranya dapat dilakukan Muhammadiyah untuk mengisi peranannya terhadap pengembangan ekonomi umat, antara lain adalah :

³⁶ *Ibid.*, hlm. 105

1. Menjadi fasilitator terhadap hubungan dan kerja sama antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
2. Melakukan pelatihan dan pendidikan yang menjurus kepada pengembangan usaha kecil.
3. Mendirikan BPR-BPR khususnya yang berdasarkan syari'ah Islam yang langsung merangkap sebagai BAZIS, sehingga akan dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana ummat ke arah yang produktif.
4. Membentuk tim-tim bimbingan berusaha, didukung dengan sumber daya yang ada pada setiap tingkatan organisasi Muhammadiyah.
5. Meningkatkan etos kerja, kedisiplinan dan kejujuran dalam berusaha berdasarkan prinsip-prinsip agama³⁷.

Peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di Nangroe Aceh Darussalam sangat besar. Di samping perannya seperti yang disebutkan di atas, Muhammadiyah juga mempunyai semacam badan yang dikenal dengan nama Majelis Ekonomi. Majelis Ekonomi ini tugasnya mengurus masalah-masalah ekonomi. Setelah sekian lama berkiprah di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, Majelis Ekonomi ini sekarang telah memiliki Bank. Untuk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, kita telah memiliki Baitul Qirot yang jumlahnya di seluruh Aceh ada tiga tempat, yaitu satu di Banda Aceh, satu di Meulaboh dan satu lagi di Singkil. Untuk di Aceh Utara dan Aceh Timur, kegiatan

³⁷*Ibid.*, hlm. 106.

Baitul Qirot telah menjadi cikal bakal untuk melahirkan Bank Muhammadiyah.³⁸

Di samping itu Muhammadiyah juga membentuk kegiatan koperasi. Untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam di Aceh, Muhammadiyah telah menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui koperasi simpan pinjam.

3.4. Pembangunan Dalam Bidang Agama

3.4.1. Penolakan Terhadap Bid'ah dan Khurafat

Umat Islam ketika Muhammadiyah baru masuk ke Aceh pada tahun 1930-an banyak sekali digerogoti oleh pengaruh *bid'ah* dan *khurafat*. *Bid'ah* adalah suatu pekerjaan atau perkataan yang diada-adakan sesudah masa Rasulullah s.a.w., tetapi pekerjaan atau perkataan itu tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, dan tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Hadits³⁹. *Khurafat* adalah 'tahayul' hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara yang sulit untuk dipercaya kebenarannya, yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak terdapat dalam ajaran Islam, misalnya upacara kenduri tron u laot, upacara kenduri blang, dan sebagainya. Bentuk-bentuk *bid'ah* dan *khurafat* yang dikenal pada awal Muhammadiyah masuk Aceh adalah :

1. kenduri pada waktu ada yang meninggal. Setelah jenazah dimakamkan, maka pada malam harinya terus diadakan

³⁸Wawancara dengan Imam Syuja' dan Aslam Nur, Senin 25 Maret 2002 di Banda Aceh

³⁹ M. Yusron Asrofie. *Kyai Haji Ahmad Dahlan, Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta : Yogyakarta Offset, 1983), hlm. 41.

doa/kenduri. Doa baca yasin, tahlil, tahmid pada malam pertama, kedua sampai tujuh malam berturut-turut yang dilakukan orang lain yang datang ke rumah duka.

2. Kenduri/doa pada waktu seorang ibu mengandung tujuh bulan.
3. Selamatan pada waktu kelahiran.
4. Pengkeramatan terhadap kuburan dan orang suci, yaitu dengan melakukan ziarah kubur dan meminta doa kepada roh orang yang telah meninggal. Pengkeramatan terhadap kuburan ulama.
5. Upacara *tahlil* dan *talkin*. *Talkin* adalah upacara pembacaan doa dan nasehat kepada orang yang telah meninggal, setelah upacara penguburan, dengan menggunakan bahasa Arab. Isi upacara ini adalah pengingatan kepada orang yang telah meninggal bahwa andaikata nanti datang malaikat yang akan bertanya di dalam kubur, agar dijawab bahwa Allah itu Tuhan saya, Al-Qur'an iman saya dan semua orang Islam saudara saya. *Tahlil* adalah upacara membaca doa bersama-sama dan membaca *wirid* (bacaan yang biasa diamalkan setiap waktu tertentu sebagai amal ibadah kepada Allah), bersama-sama pula di bawah teungku atau ulama, atau orang yang dituakan dan memahami amalan tersebut.
6. Kepercayaan terhadap jimat. Di lingkungan masyarakat Aceh, benda-benda pusaka ada yang dianggap jimat. Sedangkan di *gampong-gampong* ada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib atau dianggap jimat.

Kehadiran Muhammadiyah di Aceh berusaha untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh *bid'ah* dan *khurafat*

sebagai mana yang disebutkan di atas. Islam mempunyai Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar dan tolok ukur dalam upaya pemurnian agama.

Dengan mengingat bahwa tugas-tugas Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam dari pengaruh sinkretisme, mistisisme, maka peranan Muhammadiyah dalam bidang agama sangat besar.

Muhammadiyah menyadari benar bahwa kebanyakan umat Islam khususnya pada awal masuknya organisasi ini ke Aceh, belum mendalami benar nilai hakiki ajaran Islam, apalagi menjalankan ajaran agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kebanyakan orang Islam sendiri, ajaran Islam seolah-olah mutiara yang terselimuti tabir. Sebab itu disadari pula perlunya memulai membuka tabir penutup itu sehingga Islam dapat dimengerti dan dijalankan dengan benar. Muhammadiyah di Aceh mengajak umat Islam untuk menjalankan *amar makruf nahi munkar*. (menyeru kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar). Bagi Muhammadiyah melakukan perbuatan yang baik (*amar makruf*) tidak berarti lain kecuali percaya sepenuhnya kepada Keesaan Tuhan (Tauhid) dan menolak tindakan yang menyekutukan Tuhan (syirik). Sejalan dengan itu, Muhammadiyah menekankan pentingnya umat Islam untuk menjalankan Rukun Iman dan Rukun Islam dalam kehidupan mereka.

Adapun rukun Iman terdiri dari (1) Iman kepada Allah SWT; (2) Iman kepada Malaikat-MalaikatNya; (3) Iman kepada Kitab-KitabNya; (4) Iman kepada Rasul-rasulNya; (5) Iman kepada Hari kemudian; (6) Iman kepada Qadar Allah. Sedangkan rukun Islam terdiri dari (1) mengucapkan dua kalimat shahadat, (2) mendirikan shalat, (3) membayar zakat, (4) berpuasa sebulan

di bulan ramadhan dan (5) menunaikan ibadah haji ke Mekah sekali dalam hidupnya bagi yang mampu.

Usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah di bidang agama di antaranya yaitu :

1. Menentukan arah kiblat yang tepat dalam menjalankan shalat, sebagai koreksi terhadap kebiasaan sebelumnya dengan menghadap tepat ke arah Barat.
2. Penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan ramadhan (hisab), sebagai cara lain dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama.
3. Mengumpulkan dan pembagian zakat fitrah dan daging qurban pada hari-hari raya oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat, yang dapat dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat sebelumnya dengan memberikan hak istimewa dalam persoalan ini pada pegawai atau petugas agama.
4. Penyederhanaan upacara dan ibadah dalam peristiwa kelahiran, kitanan, perkawinan dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politeistik.
5. Penyederhanaan makam.
6. Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci atau makam keramat.
7. Menghilangkan anggapan seolah-olah ada berkat yang sifatnya gaib yang dimiliki oleh ulama serta pengaruh ekstrim terhadap mereka.

8. Penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dengan perempuan pada pertemuan yang bersifat keagamaan.

Sebagai gerakan pemurnian, pemahaman keislaman yang dikembangkan Muhammadiyah telah menjadikan ajaran agama menjadi lebih sederhana. Dalam aspek kepercayaan yang didasarkan atas pengalaman sehari-hari dan ibadah yang telah dicampuri berbagai hal, dimurnikan dari berbagai ajaran bid'ah dan kurafat. Sebagai sifat kaum rasional yang ada dalam sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Muhammadiyah adalah menjadikan Islam benar sebagai agama suci dan terlepas dari hal-hal yang tidak relevan dengan ajaran dasarnya, yaitu Al Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan pembahasan yang dikembangkan oleh K.H. Ahmad Dahlan ada lima hal pokok yang ditumbuh kembangkannya, yaitu Tauhid dan pemurnian kepercayaan; kesadaran tujuan hidup muslim; perilaku; hubungan antara keimanan dan perilaku; amal dalam tindakan; dan tanggung jawab sosial⁴⁰.

Situasi suram yang menyelimuti umat Islam dibidang keagamaan ditandai dengan meruncingnya perselisihan dalam masalah khilafiah, taqlid pada mazhab, berkembangnya bid'ah, kurafat dan tahayul. Jadi, refleksi kesuraman tersebut tidak hanya di bidang fikih, tetapi juga di bidang akidah.

Muhammadiyah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam muncul membawa faham keagamaan yang baru. Di samping akidah yang disebut dengan "Ahl al-haq wa al-Sunnah". Materi

⁴⁰ Alfian, "Peranan Muhammadiyah Dalam Pergerakan Nasional dan Kemungkinan Masa Depan", dalam *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta : Panjimas), hlm. 73.

akidah ini kelihatannya lebih ditekankan pada pemurnian akidah, pembersihan keyakinan dari bid'ah, kurafat dan tahayul dan belum sampai pada taraf merubah corak akidah atau teologi yang dianut ummat Islam sebelumnya. Dari situlah, maka Muhammadiyah disebut sebagai organisasi pemurni akidah (puritan), bukan pembaharu

Ketika Muhammadiyah masuk di Aceh pada tahun 1930an, banyak mengalami hambatan dan rintangan, sehingga kurang berhasil dalam membawa misi Muhammadiyah di kalangan masyarakat. Bahkan di desa-desa tampaknya tidak ada kemajuan karena ada beberapa sebab di antaranya yaitu : pertama, pengaruh politik zaman Belanda dahulu. Oleh pemerintah Belanda, Muhammadiyah dianggap sebagai gerakan yang kontra dengan Pemerintah. Oleh karena itu diatur yang boleh memimpin Muhammadiyah itu dari golongan feodal. Hal ini menyebabkan kontra sekali dengan rakyat, karena rakyat tidak tertarik dengan Muhammadiyah yang dipimpin oleh golongan feodal. Pada waktu itu, konsul pertama adalah Tgk. Hasan Chik Glumpang Payong yang berasal dari golongan feodal. Kedua, dari segi ubudiyah. Ubudiyah yang diamalkan oleh orang-orang kampung, sangat bertolak belakang dengan ubudiyah yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Bagi orang kampung, Muhammadiyah dianggap membawa ajaran-ajaran agama baru. Jadi orang menganggap Muhammadiyah ini membawa ajaran agama baru. Pada hal yang benar bukan membawa ajaran agama yang baru, tetapi Muhammadiyah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang murni seperti yang dibawa oleh rasullullah. Pada hal di kampung-kampung itu ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama Islam yang murni, seperti adanya kurafat. Di kampung-kampung banyak penyimpangan ajaran Islam, ada tahayul yang bertentangan dengan akidah. Pada hal dari segi tauhid, itu sudah berbenturan. Di kampung dulu kalau orang mau berdoa, itu harus

memakai perantara. Dalam Islam berdoa lewat perantara itu sudah syirik. Makanya Muhammadiyah akan membersihkan. Bahkan disinyalir fenomena-fenomena yang bertentangan dengan ubudiyah itu sampai sekarang masih ada. makanya jaringan-jaringan Muhammadiyah itu tidak dapat menembus ke pedesaan karena di desa-desa masih banyak faham-faham yang masih menjalankan syirik dan tahayul.

Hanya sedikit sekali langkah-langkah Muhammadiyah yang dapat menembus ke masyarakat pedesaan untuk dapat merubah hal-hal yang berbau tahayul dan syirik. Hal ini terjadi karena sangat kuat di pertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Pada hal tujuan Muhammadiyah hanya ingin agar masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh pada khususnya mau melaksanakan ajaran agama Islam yang semurni-murninya. Hal ini terungkap dari keterangan Bapak Imam Syuja' sebagai berikut

“Pada waktu berdoa pada zikir maulid semua harus berdiri itu sudah di luar ajaran Islam. Pada puncak zikir itu lalu dalam keadaan berdiri itu maka merasakan bahwa nabi datang untuk menghadiri perayaan maulid. Ini sulit diterima oleh Muhammadiyah, karena hal tersebut sudah syirik. Nabi Muhammad itu tidak mungkin datang karena beliau sudah meninggal. Nabi hanya manusia biasa dan sudah meninggal. Maka nabi tidak mungkin lagi dapat datang menghadiri maulid. Dan masih banyak lagi benturan-benturan yang terjadi di masyarakat dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammadiyah”⁴¹.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syuja', pada tanggal 25 Maret 2002 di Banda Aceh

Masyarakat di kampung menganut mashab Syafii, tetapi dalam pelaksanaannya mereka melaksanakan tradisi yang bertentangan dengan mashab tersebut. Kalau ditelusur, mashab Syafii itu sama dengan faham yang dibawa oleh Muhammadiyah. Penyimpangan tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Syuja' sebagai berikut :

“dalam memperingati kematian, malam kesatu, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Pada malam-malam itu khan ada tadarus, mengaji, baca yasin, tahlil, dan tahmid itu menurut ajaran Syafii sangat dilarang. Kata Syafii, orang yang ikut doa membaca yasin dan zikir pada malam hari setelah kematian seseorang, itu sama dengan orang tersebut makan bangkai si mayat. Bukan hanya di kampung, di kota-kota hal semacam ini juga ada. Begitu ada orang meninggal, orang datang baca yasin. Pada hal yang benar, sebelum orang meninggal baca yasin, bukan setelah meninggal. Begitu juga misalnya di kuburan, ada talkin. Setelah orang dikebumikan itu ditalkin. Pada hal talkin itu memperingati. Kita berikan untuk orang yang belum meninggal dan menjelang sakratul maut, kita ucapkan kalimah syahadat laillah hailallah supaya dia tahu. Bukan setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, dia sudah tidak tahu apa-apa lagi. Inilah yang menjadi benturan-benturan antara Muhammadiyah dengan faham-faham yang berkembang di masyarakat. Hal-hal semacam ini sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Muhammadiyah. Salah satu cara untuk mengikis kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang itu maka Muhammadiyah membangun lembaga-lembaga pendidikan. Dengan lembaga pendidikan, dalam jangka panjang diharapkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam itu dapat dikikis. Orang tidak akan salah lagi

membaca usoli dan tidak ada kenduri. Pada hal itu semua membikin, bagaimana kita mau shalat tidak ada usoli. Cuma itu tidak diteruskan. Usoli itu khan lafalnya bagaimana kita mau shalat jika tidak ada usoli. Maka tidak ada orang Muhammadiyah salah dalam mengucapkan kalimah-kalimah dalam shalat. Begitu juga kunut. Kunut itu difahami bahwa itu bukan rukun tiga belas. Tetapi ada orang kampung yang tidak kunut, harus melakukan sujud syahwi. Karena begitu assalamu'alaikum, dia sujud syahwi. ini kunutnya ditinggal. Memang kunut ini bukan rukun tiga belas, tetapi hanya sunat syafaat. Jadi sudah memasukkan intervensi fikirannya dalam ubudiyah. Dalam Al-Quran itu sudah cukup, jangan ditambah atau dikurangi lagi. Muhammadiyah ingin membersihkan ubudiyah seperti berdoa, meminta lewat perantara dan membetulkan tata cara shalat yang menyimpang. Pada awalnya, hanya sedikit yang mau mengikuti ajakan Muhammadiyah⁴².

Pada tahun 1927 Muhammadiyah yang berpusat di Yogyakarta mendirikan Majelis Tarjih, semacam lembaga fatwa, untuk mentarjihkan atau mengukuhkan salah satu pendapat yang dianggap lebih benar, karena lebih dekat kepada Al Qur'an dan hadist, di antara pendapat-pendapat ulama yang dipertentangkan. Tarjih dilakukan secara kolektif dan dengan hasil-hasil Tarjih diharapkan anggota Muhammadiyah terhindar dari perselisihan yang disebabkan oleh masalah khilafiah. Dengan demikian Muhammadiyah telah membawa sesuatu yang baru, yaitu

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syuja', Ketua Umum pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2002.

meninggalkan taqlid kepada satu mazhab tertentu, dan mengikut pendapat ulama yang dinilai dalil yang dikemukakannya dalam satu masalah lebih kuat. Jadi, Majelis Tarjih telah melakukan semacam ijtihad dalam tingkat Tarjih.

Dari hasil penelitian yang lebih jauh terhadap hasil-hasil ijtihad Majelis Tarjih dan dari cara Majelis Tarjih memahami nash dalam berijtihad dapat difahami, bahwa :

1. Ijtihad Majelis Tarjih dalam masalah khilafiah ataupun masalah lainnya tidak keluar pendapat dari para ulama mazhab yang ada. Majelis Tarjih hanya mengukuhkan pendapat tersebut, Majelis Tarjih berpegang kepada Al Qur'an dan hadist, terutama Hadist yang telah ditarjih dalam kitab Al-Mizan. Ini berarti bahwa Majelis Tarjih belum melepaskan diri dari tradisi (pendapat ulama) dan masih tetap berada di seputar pendapat ulama⁴³.
2. Dalam memahami nash sebagai sumber pokok Majelis Tarjih masih tergolong literalis, meskipun barangkali tidak dapat disebut sebagai literalis murni yang ketat. Dari pada yang dipahami dari Kaidah Tarjih yang ditulis oleh H.M. Juawini menunjukkan tentang hal itu. Manhaj Tarjih yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Majelis Tarjih pada tahun 1987 memperkuat lagi apa yang disebutkan di atas⁴⁴.

Dari kajian ini didapat pula ciri khas Majelis Tarjih dalam berijtihad yang menunjukkan faham keagamaan Muhammadiyah, yaitu tradisional dan literalis. Harun Nasution dalam memahami faham keagamaan yang dibawa oleh para pembaharu membagi mereka dalam dua corak, modernis tradisional dan modernis

⁴³ Hasil keputusan rapat Muhammadiyah pada bulan April 1922.

⁴⁴ H. Ali Akbar, *Tuhan dan Manusia*, (Jakarta: Grafikatama, 1990),

progresif⁴⁵. Modernis dengan kedua ciri di atas, tradisionalis dan literalis, termasuk dalam corak yang pertama, yaitu modernis tradisionalis.

Predikat yang diberikan sebagai modernis kepada Muhammadiyah tidak diragukan lagi keabsahannya, dan Muhammadiyah telah melakukan pembaharuan diberbagai bidang, termasuk mentarjih. Akan tetapi juga diamati lebih lanjut kepada materi yang ditarjihkan dan sebagainya, maka Muhammadiyah berada dalam kelompok tradisionalis. Ini disebabkan karena dalam faham keagamaan Muhammadiyah belum membawa sesuatu yang baru dalam arti yang sebenarnya. Ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih masih sekitar masalah-masalah ushalla, qunut rakat shalat Tarawih dan sebagainya, dan belum menyentuh inti pembaharuan seperti yang dilakukan oleh para modernis lainnya. Inilah yang dimaksud oleh Nurcholis Majid bahwa pembaharuan yang dibawa Muhammadiyah tidak menjangkau masalah ideologis, atau soal-soal besar lainnya yang berkenaan dengan *welantschazung*, tentang alam, Tuhan dan sebagainya⁴⁶.

Dengan corak pembaharuan yang demikian Muhammadiyah memulai gerakannya lebih dari lima puluh tahun yang lalu, dan sampai kini corak pembaharuan yang demikian masih tetap menyelimuti organisasi ini. Selama waktu yang demikian pula tidak pernah terdengar adanya suatu ijtihad baru yang dimunculkan oleh Muhammadiyah, Majelis Tarjih

⁴⁵ H. Syed Pasha, "Education in Islam , Toward a New Appriach" dalam *All-Ittihad* (Jurnal, Vol. 17, No. 4, 1980), hlm. 1-2.

⁴⁶ Nurcholis Majid, "Menegakkan Faham Ahlussunah Wal-Jamaah Baru", dalam *Satu Islam Sebuah Dilema*, (Bandung : Al-Mizan, 1985), hlm. 27.

khususnya. Dan selama Muhammadiyah menganut corak pembaharuan yang demikian, maka ijhtihad yang baru sukar untuk dimunculkan. Dari itu jika Muhammadiyah ingin maju dan tetap disebut modernis, maka sudah tiba saatnya bagi Muhammadiyah untuk meninggalkan corak yang tradisional dan mengambil corak modernis yang progresif. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan menata kembali perangkat-perangkat Majelis Tarjih, anggota majelis, manhaj (metode) tarjih dan sebagainya. Anggota Majelis Tarjih misalnya haruslah mereka yang mempunyai wawasan keagamaan yang luas, dan bukan sembarang anggota yang dapat duduk di majelis tersebut. Kualitas anggota akan memberi warna yang dominan pada hasil tarjih. Dari itulah, pemilihan terhadap mereka yang diangkat menjadi anggota haruslah mendapat pertimbangan yang sungguh-sungguh.

Di samping itu Manhaj Tarjih pun tampaknya harus dirumuskan kembali berdasarkan hasil keputusan Majelis Tarjih dan bukan pendapat pribadi-pribadi tertentu. Dengan perumusan manhaj yang baru gambaran literalis pada Muhammadiyah dapat dihilangkan dan Muhammadiyah dapat kembali mengangkat dirinya, sekaligus merubah corak pembaharuannya dari apa yang disebut sebagai modernis tradisional menjadi modernis progresif.

Keadaan nyata yang dihadapi Muhammadiyah menyadarkan pimpinan organisasi pada waktu itu bahwa pembaharuan dibidang agama tidak akan berhasil jika tidak diimbangi dengan keberhasilan dibidang lain, seperti dibidang ekonomi, hukum, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Muhammadiyah melihat bahwa sumber daya umat Islam memang cukup rendah dan karena itu pembangunan ummat Islam harus dimulai dari potensi ummat Islam itu sendiri. Inilah yang menyebabkan mengapa Muhammadiyah berkecimpung dalam

bidang pendidikan. Sampai kini, insya Allah, semangat “memberikan pendidikan” Muhammadiyah tetap tegar; di manapun Muhammadiyah itu berada pastilah kegiatsan pendidikan mendapat tempat yang utama.

Tujuan didirikan organisasi Muhammadiyah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ialah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga tercipta masyarakat Islam yang sesungguhnya. Tugas pokok yang diemban oleh organisasi ini untuk mengembalikan ummat Islam kepada ajaran-ajaran Islam yang murni. Ini berarti Muhammadiyah harus berjuang membebaskan ummat dari segala jenis dogma karena “semangat yang benar dari ajaran kitab Suci Al Qur’an tidak mengizinkan adanya sembarang dogma”⁴⁷ Untuk mengubah kenyataan yang terdapat dalam masyarakat ini Muhammadiyah “meningkatkan dirinya” di atas kondisi umum masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, Muhammadiyah harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ajaran yang dianjurkan benar-benar didasarkan pada ajaran Islam yang murni dan pelaksanaan ajaran-ajaran ini di tengah-tengah masyarakat memberikan dampak positif bagi kemajuan ummat Islam⁴⁸.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ajaran Islam karena ummat telah terbelenggu beragam dogma, telah membuat semangat juang (fighting spirit) umat Islam menurun sehingga sulit untuk menyadarkan dan menggerakkan ummat Islam untuk berjuang meningkatkan

⁴⁷ H. Ali Akbar, *Tuhan dan Manusia*, (Jakarta: Grafikatama, 1990), hlm. 13.

⁴⁸ H. Sayed Pasha, “Education in Islam, Toward a New Approach” dalam *Al-Itihad*, (Jurnal, Vol. 17, No. 4, 1980), hlm. 1-2.

martabat mereka sebagai sebaik-baik ummat yang diciptakan oleh Allah SWT. Banyak ummat Islam yang bersikap “nrima” dan statis, apa yang mereka alami dianggapnya sebagai takdir Tuhan. Dengan adanya kondisi semacam ini, maka ummat Islam di Aceh menjadi kurang tergerak untuk maju sehingga daya pikir dan kreativitas mereka menjadi berkurang. Akibatnya proses pembangunan di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam menjadi terhambat karena kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas⁴⁹.

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan pemurnian⁵⁰ pemikiran keislaman yang bergerak dalam bidang keagamaan sudah berumur cukup dewasa dan telah melewati berbagai liku kehidupan. Meskipun demikian, dalam perjalanan hidupnya, banyak kritikan dilontarkan terhadapnya, namun ia tetap adaptif dan resistan berpegang pada garis-garis perjuangannya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang berdasarkan Islam. Oleh karena itu tidak salah jika orientasi pembangunan yang dilakukan Muhammadiyah juga menitik beratkan dalam bidang keagamaan dan sosial. Cabang Muhammadiyah yang didirikan di Kutaraja pada tahun 1927, setapak demi setapak mulai mengembangkan kiprahnya di kota-kota lain yang tersebar di seluruh Aceh, seperti Tapaktuan,

⁴⁹ Mahmudah Abdalati, *Islam in Pacus*, (Indianapolis : American Trust Publication, 1975), hlm. xiii.

⁵⁰ Alfian, “Peranan Muhammadiyah Dalam Pergerakan Nasional dan Kemungkinan Masa Depan”, dalam *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta : Panjimas, 1994), hlm.73.

Meulaboh, Singkil, Sigli, Sabang, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa dan Kutacane.

Menjelang Mukhtamar Muhammadiyah yang ke 43 di Banda Aceh organisasi ini telah menjadi aset bangsa. Secara nasional dapat diketahui bahwa organisasi Muhammadiyah mempunyai anggotanya yang berjumlah puluhan juta orang. Muhammadiyah mengasuh 70 buah perguruan tinggi, belasan ribu sekolah lanjutan dan sekolah dasar, ratusan panti asuhan dan ratusan buah poliklinik.

Sebagai gerakan modernist Islam, Muhammadiyah mencoba memperkenalkan pembaharuan pemikiran lewat ijtihad dan berupaya memerangi bid'ah, tahayul dan kurafat, perilaku keberagaman yang menyimpang dari ajaran al Qur'an dan hadist. Di sisi lain, Muhammadiyah juga melahirkan aksi-aksi kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang mempermudah ummat Islam dalam mengadopsi piranti modernisasi dengan benar. Piranti ini amat penting dan dapat dipakai untuk membina suatu kehidupan yang serasi dan harmonis sebagai manifestasi dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Berbeda dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang lahir dari dan dengan latar belakang keacehan, Muhammadiyah adalah produk proses modernisasi pemikiran Islam dengan latar belakang berbeda, walaupun tujuan utama dari gerakan tersebut adalah pemurnian ajaran Islam yang dianggap telah menyimpang dari sumbernya. Artinya Muhammadiyah itu dibawa dan diperkenalkan kepada masyarakat Aceh oleh seorang

pegawai pemerintah kolonial Belanda penganut faham modernist⁵¹.

Sasaran pengenalan gagasan ini adalah orang-orang dari kalangan yang sama, pegawai, perantau, kelompok penguasa (bangsawan). Pada tahun pertama organisasi ini didirikan secara resmi di Aceh (1928), jumlah anggota Muhammadiyah yang terdaftar secara resmi adalah 102 orang pria dan 52 orang wanita. Pada akhir tahun 1932 (empat tahun kemudian), jumlah anggota organisasi ini menjadi 191 orang laki-laki dan 132 orang perempuan. Para anggota tersebut pada umumnya adalah orang-orang yang berdinias dalam pemerintahan dan para perantau Minang dan Jawa. Dengan demikian, karena mutasi dan sebab-sebab lain, pernah anggota ini tidak mempunyai anggota⁵².

Menurut Remantan perkembangan gagasan dan organisasi Muhammadiyah di Aceh agak lamban. Di kalangan masyarakat luas, apalagi di daerah pedesaan, gagasan dan lembaga modernist Islam ini hampir tidak pernah terdengar gaungnya. Walaupun organisasi ini pernah beberapa kali menggelar konggresnya di Aceh pada masa sebelum Perang Dunia II. Kelambanan adopsi gagasan dan organisasi ini dapat dipertalikan dari berbagai hal :

Pertama, Gagasan dan organisasi ini diterima oleh masyarakat Aceh dengan hati yang mendua. Sebagai gerakan sosial kemasyarakatan yang bermuatan keagamaan, Muhammadiyah menjanjikan suatu gairah, suatu pencerahan.

⁵¹ Bahren T. Sugihen, "Muhammadiyah Dalam Kultur Keacehan", dalam *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh : Gua Hira, 1995), hlm. 141.

⁵² Remantan, *Gerakan Pembaharuan Islam di Aceh (1914-1953)*, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), hlm. 95-102.

Organisasi ini dilihat sebagai kumpulan orang-orang sekolahan dan perantau. Walaupun tidak bertendensi eksklusif, tidak terlalu ketat mengikat para anggota untuk memperlihatkan peri laku “mono loyalitas”. Misalnya Muhammadiyah tidak mengharamkan seseorang anggotanya (pengurus atau anggota organisasi) untuk menjadi anggota dan atau pengurus organisasi keagamaan (Islam) yang lain, sekalipun organisasi tersebut tidak searah jalan dengan yang ditempuh Muhammadiyah. Di beberapa tempat, misalnya ada anggota Muhammadiyah yang membentuk dan mengurus organisasi Nahdlatul Ulama (NU) atau organisasi lain⁵³.

Dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih banyak berkuat ke dalam politik, Muhammadiyah lebih banyak bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang hasilnya baru diketahui dalam jangka panjang, namun pengaruhnya terhadap masyarakat cukup mendalam. Gejala yang sering timbul dalam bidang teologi dapat diimbangi Muhammadiyah dalam kiprahnya dibidang dakwah, pendidikan dan kesejahteraan sosial ini.

Orientasi dan kiprah Muhammadiyah dalam bidang dakwah dan pendidikan telah melahirkan kader-kader Muhammadiyah sebagai sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Muhammadiyah memiliki kader-kader dakwah dari berbagai proses pelatihan yang dilakukannya. Yang lebih penting lagi ialah lulusan dan kader-kader Muhammadiyah ini telah menempati berbagai posisi dan lingkungan yang tersebar di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.

⁵³ Remantan, *Ibid*.

Kekayaan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi gerakan pembaharuan yang sangat penting adalah jaringan organisasinya yang sangat luas dan aktif. Muhammadiyah memiliki jaringan organisasi sampai ke desa-desa dalam bentuk mulai dari yang sangat formal sampai yang sangat informal, seperti pengajian-pengajian dan arisan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Aisyiah. Yang lebih penting lagi adalah bahwa jaringan organisasi ini sangat aktif terutama dalam dakwah islamiyah, pendidikan dan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Modal dasar yang menjadi penggerak awal Muhammadiyah adalah teologi pembaharuan yang dimilikinya. Teologi ini memberikan kepada warga Muhammadiyah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam suatu pegangan yang kokoh dan sebagai sumber semangat baru untuk menumbuhkan motivasi kerja dan beramal saleh. Teologi pembaharuan Muhammadiyah lebih mementingkan makna dari pada simbol sehingga acuan program menjadi begitu jelas. Dalam teologi ini bahkan Muhammadiyah begitu gencar menyerang simbol-simbol agama yang dianggap dapat mencampuri makna dan esensi hidup beragama sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist Rasulullah. Karena itulah mereka nampak bertentangan dengan golongan tradisional yang kadang-kadang terlalu terikat dengan simbol-simbol dan kering dari esensi hidup beragama. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengajian-pengajian dan arisan-arisan warga Muhammadiyah turut serta memperkuat dasar idiologi/teologis ini dalam memperkuat struktur dan jaringan organisasi ini.

Kaitannya dengan pelaksanaan Syariah Islam di Nangroe Aceh Darussalam, sepertinya juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Muhammadiyah. Syariah Islam itu kan harus islami. Dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahi. Tidak cukup hanya dengan tulisan-tulisan berbahasa Arab, dengan

pakaian muslimah. Tetapi bagi Muhammadiyah yang lebih penting adalah membangun akhlak. Betul-betul akhlak itu takut pada Allah, jangan takut pada manusia.

Yang terjadi sekarang, ada orang jika mempunyai kesempatan, tidak dilihat oleh orang lain, masih mau melakukan pelanggaran. Contohnya ada sepasang remaja yang berpacaran di tempat yang sunyi, sering kali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Di kalangan para birokrat juga kadang ditemui adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di kala orang lain tidak melihat. Pada hal perbuatan tersebut ada yang mengetahui, ada malaikat yang mencatat semua perbuatan manusia. Sekurang-kurangnya Allah tahu apa yang diperbuat oleh manusia, walaupun tidak ada orang lain yang mengetahuinya, perbuatan dosa tetap dosa dan pada suatu saat akan menerima hukumannya nanti.

Maka dalam hal ini Muhammadiyah ingin membangun manusia menjadi ikhsan. Jika orang sudah ikhsan, walaupun kita tidak dapat melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat perbuatan kita. Jika ikhsan itu tidak dimengerti oleh seseorang, maka orang tersebut akan mudah melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Inilah yang ingin dibangun Muhammadiyah untuk menyadarkan manusia membangun akhlakul korimah, untuk takut pada Allah, untuk tidak melanggar syariat Islam.

Menurut Muhammadiyah, sampai sekarang syariat Islam belum dijalankan sepenuhnya oleh umat Islam di Aceh. Karena masih ada banyak gadis-gadis yang belum memakai jilbab, masih ada perempuan yang keluyuran malam. Gongnya sudah dipukul, tetapi pelaksanaannya belum. Sekarang sistemnya yang berlaku adalah sistem undang-undang produk orde baru. Dikatakan oleh hakim agung, bahwa syariat Islam itu dalam bingkai hukum nasional. Sedangkan hukum nasional itu warisan Belanda, seperti

KUHP, hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam tidak boleh setengah-setengah. Jadi siapa yang menghukum bukan dengan hukum Allah itu berarti ia kafir. Bagaimana kita akan melaksanakan hukum Islam jika kita tidak berpedoman pada hukum Islam. Sangat besar murka Allah apabila kamu mengatakan sedangkan kamu sendiri tidak mengerjakan. Jadi dengan syariah Islam itu pekerjaan rumah Muhammadiyah menjadi lebih besar dan lebih berat⁵⁴.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syuja', pada tanggal 25 Maret 2002.

BAB IV

EKSISTENSI MUHAMMADIYAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ACEH

Seperti yang telah dibahas dalam bab terdahulu Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terpenting yang didirikan di Yogyakarta oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari ini adalah mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidup suburkan masyarakat tolong menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda agar kelak menjadi orang Islam yang berguna, berusaha kearah perbaikan penghidupan kehidupan yang layak serta berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan dalam Islam berlaku dalam masyarakat.¹

¹ H.A Hasjmy, *Muhammadiyah Ibarat pohon Beringin yang Rindang*, dalam Zamroni Mashuda, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, Gua Hira', (Banda Aceh: Gua Hira, 1995), hlm. 12.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang pertama didirikan di Yogyakarta telah menyebar masuk ke berbagai daerah di pelosok wilayah negara Indonesia antara lain di Minang kabau, Bengkulu, Banjarmasin, Makassar dan salah satunya adalah di tanah Aceh. keberadaan Muhammadiyah di Aceh ini tepatnya pada tahun 1923 pada masa sebelum perang dunia II jauh sebelum propinsi ini terbentuk yang mula-mula diperkenalkan S.Djaja Soekanta seorang pegawai pergadaian pemerintah Belanda asal Betawi serta bekas sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi, namun organisasi ini secara resmi mulai berdiri di Aceh pada tahun 1927 dengan bimbingan A.R. Sutan Mansoer seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah yang kemudian baru berkembang ke pesisir timur dan barat Aceh.

Pada mulanya ajaran-ajaran Muhammadiyah menyebar didalam kota Banda Aceh, sesudah Muhammadiyah berdiri di Banda Aceh barulah Muhammadiyah menyebar di daerah-daerah lainnya di Aceh. Namun penerimaan Muhammadiyah disetiap daerah-daerah tersebut tidaklah sama, ada daerah yang baru dapat mendirikan organisasi Muhammadiyah sesudah zaman penjajahan Jepang.

Kehadiran Muhammadiyah di pesisir Timur Aceh diperkenalkan oleh seorang ulama yang bernama A.R Sutan Mansur yang datang ke tanah Aceh pada tahun 1927. Selain sebagai pembawa Muhammadiyah di pesisir Timur Aceh ia juga turut meresmikan berdirinya Muhammadiyah di Sigli pada tanggal 1 Juli 1927. Kehadiran Muhammadiyah di daerah kota Sabang telah diterima pada tahun 1927 dan sekitar bulan Juli atau Agustus 1927 cabang Muhammadiyah telah berdiri di Sabang. Sementara itu kehadiran Muhammadiyah di Aceh Tengah setahun lebih lambat yaitu pada tahun 1928 yang diprakarsai oleh A.R Sutan Mansur, namun keberadaan Muhammadiyah di Aceh

Tengah ini dengan cepat menyebar di daerah-daerah sekitarnya. Di Aceh Timur Muhammadiyah berdiri pada tanggal 4 Oktober 1928 yang dimulai dengan berdirinya Muhammadiyah di Kuala Simpang dan Muhammadiyah baru berdiri di Aceh Tenggara pada tahun 1937 dua tahun sebelum pecahnya perang dunia ke II yang disebarkan oleh beberapa pemuda setempat yang baru kembali dari Tawalib School di Minang Kabau. Di Aceh Barat dan Aceh Selatan Muhammadiyah berdiri 15 tahun setelah Muhammadiyah berdiri di Kutaraja (Banda Aceh) yang dibawa oleh seorang konsul Muhammadiyah dari Jawa ke Aceh dan menyampaikan gagasan-gagasan Muhammadiyah kepada para pemuka masyarakat di daerah tersebut. Kehadiran Muhammadiyah di Aceh Selatan pada tahun 1933 awal mulanya tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga akhirnya organisasi ini membubarkan diri setahun kemudian. Akan tetapi di tahun yang sama Muhammadiyah muncul di Labuhan Haji. Hal ini menyebabkan kegiatan Muhammadiyah berjalan agak lamban sampai dengan tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Aceh. Pada masa kedudukan Jepang ini kegiatan organisasi Muhammadiyah berhenti yang disebabkan karena semua bangunan Muhammadiyah dipakai secara paksa oleh bala tentara Jepang sebagai tempat tinggal. Baru segera setelah Jepang meninggalkan Indonesia organisasi Muhammadiyah mendapatkan momentum yang baik sehingga organisasi ini berkembang dengan pesat.²

Keberadaan Muhammadiyah di Aceh sejak berdirinya hingga sekarang telah mengalami suatu perjalanan yang cukup

²Bakhrum Yunus, *Beberapa Catatan Tentang Sejarah Awal Muhammadiyah Di Daerah Istimewa Aceh.*, (Banda Aceh: Badan Perencanaan Dan Evaluasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah istimewa Aceh 1995), hlm. 2-4.

panjang dengan melewati berbagai masalah baik internal dan eksternal sampai perkembangan pesat yang telah dicapai. Kehadiran Muhammadiyah di Aceh pada awalnya tidaklah disambut dengan tangan terbuka sehingga dimanapun muhammadiyah muncul selalu ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, namun hal ini dianggap wajar oleh karena muhammadiyah ingin menembus kejumudan, khufarat dan bid'ah yang telah terbentuk dan terentang selama berabad-abad.³

Demikianlah kehadiran Muhammadiyah awalnya tidak berjalan dengan baik, dakwah amar makruf nahi munkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak mudah diterima oleh masyarakat dan mereka melemparkan tuduhan kepada Muhammadiyah sebagai *kaum muda*, *kaum wahabbi*, *kaum tak bermazhab* bahkan pernah dikatakan bahwa Muhammadiyah itu kristen halus. Pada masa itu karena kaum penjajah ingin tetap mempertahankan kedudukannya di Indonesia maka kehadiran Muhammadiyah dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk memecah belah umat dengan cara menghasut golongan umat Islam lainnya untuk membenci Muhammadiyah. Disamping itu juga banyak yang menganggap bahwa dahwah Muhammadiyah terlalu keras sehingga keberadaan Muhammadiyah tidak mendapat simpati dari masyarakat. Akan tetapi para Muballigh Muhammadiyah dengan berpedoman kepada sejarah dakwah Rasulullah tidak gentar menghadapi rintangan apapun dalam usaha menyebarkan gagasan-gagasan Muhammadiyah.⁴

Dalam rentang waktu yang cukup lama ini telah banyak kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh

³ *Ibid*, hlm. 147.

⁴ *Ibid*, hlm. 73.

muhammadiyah sehingga sampai akhirnya organisasi muhammadiyah ini dapat dikatakan merupakan suatu organisasi yang relatif dapat hidup dan berkembang di Aceh yang mana amal usaha Muhammadiyah yang dahulunya dicemoohkan dan dihalangi akhirnya telah merupakan amal usaha yang dikerjakan oleh masyarakat, walaupun pada awal keberadaannya organisasi ini hanya berkembang di perkotaan dan tidak berkembang sampai ke pedesaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan organisasi ini tidak berkembang di pedesaan yaitu pertama, politik di zaman Belanda. Pada masa ini organisasi Muhammadiyah dianggap sebagai suatu gerakan yang dapat menggiring masyarakat sehingga diaturlah bahwa yang menjadi pemimpin-pemimpin muhammadiyah dari golongan feodal, oleh karena yang memimpin muhammadiyah dari golongan feodal menyebabkan masyarakat tidak tertarik karena adanya perbedaan yang kontras sekali antara rakyat dan golongan feodal. Kedua, dari segi ubudiyah yang bertolak belakang dengan ubudiyah yang dianut masyarakat di pedesaan dimana pada waktu itu masyarakat tidak lagi melaksanakan ubudiyah seperti sunnah, banyak terjadinya kurabang, takyul di kampung-kampung yang semuanya itu sudah bercampur baur dengan aqidah. Berbagai macam kenduri seperti kenduri sawah, kenduri laot, kenduri seratus hari, kenduri di rumah orang kematian, pembacaan qunut pada shalat subuh dan zikir-zikir maulid dan sebagainya merupakan objek kritikan Muhammadiyah dan Muhammadiyah berbenturan terus dengan paham-paham seperti itu. benturan-benturan ini menjadi tugas bagi muhammadiyah dan ini tidak terlepas dari cita-cita muhammadiyah agar supaya umat Islam di seluruh Indonesia dan khususnya di Aceh dapat melaksanakan ajaran Islam dengan semurni-murninya. Sejalan dengan itu perkembangan Muhammadiyah sekarang ini berjalan dengan pesat dan merakyat dimana lapisan-lapisan masyarakat sekarang ini banyak yang

masuk ke Muhammadiyah tidak hanya dari golongan pegawai tetapi juga petani baik di desa maupun kota.⁵

Pada awal keberadannya di Aceh ada tiga aspek yang menjadi sasaran pembaharuan muhammadiyah yaitu sosial kemasyarakatan, pendidikan dan faham keagamaan disamping turut dalam gerakan-gerakan politik pada dekade tahun 1930-an. Semua ini tidak terlepas dari peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan pemurnian keislaman dengan berpegang pada garis perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dengan melakukan upaya-upaya yang digerakkan dalam bidang pendidikan, tabligh-tabligh dan dalam usaha pembinaan kesejahteraan sosial. Keberadaan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di daerah Aceh ini telah menimbulkan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah di antaranya melakukan dakwah ke kampung-kampung, mendirikan sekolah, menyantuni dan memberi makan anak yatim, mendirikan mushalla Muhammadiyah, membagi-bagikan zakat fitrah dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah ini tidak saja terbatas dalam bidang keagamaan, pendidikan dan politik, tetapi juga dalam bidang sosial budaya masyarakat pendukungnya.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan organisasi Muhammadiyah lebih menekankan pembaharuannya kepada penanggulangan kehidupan anak yatim, fakir dan miskin dengan memberikan penyantunan kepada anak-anak yatim yang merupakan kewajiban bagi umat Islam. penyantunan ini diberikan dengan cara mengambil anak-anak yatim tinggal di rumah

⁵ Wawancara dengan Imam Syuja' pada hari Senin tanggal 25 Maret 2002 pukul 9.00 WIB bertempat di Banda Aceh.

keluarga yang berada. Disamping itu juga didirikan panti-panti asuhan bagi anak-anak yatim dan mengatur segala kebutuhan hidup mereka serta diberikan pendidikan di panti-panti asuhan tersebut. Demikian pula bagi yang fakir dan miskin Muhammadiyah memberikan bantuan yang tetap dari dana yang dihimpun melalui zakat dan didistribusikan sendiri oleh Muhammadiyah. Disamping penyantunan terhadap anak yatim, fakir dan miskin Muhammadiyah juga melakukan aktivitas sosial lainnya seperti mendirikan balai-balai pengobatan, klinik, apotik, BKIA, juga lembaga pendidikan kesehatan dan kebidanan.

Usaha penyantunan anak yatim dengan mendirikan panti-panti asuhan merupakan salah satu aktivitas organisasi Muhammadiyah yang cukup menonjol. Usaha pendirian rumah penyantun Muhammadiyah ini didirikan di Banda Aceh pada tanggal 28 februari 1943 oleh sekelompok anggota Muhammadiyah yang terdiri dari 22 orang yang dikenal dengan "sahabat dua puluh dua" dalam masa penjajahan Jepang dan merupakan rumah penyantun Muhammadiyah pertama di Aceh. Rumah penyantun Muhammadiyah ini diubah menjadi panti asuhan sejak tahun 1978 sesuai dengan ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah. Keberadaan panti-panti asuhan ini merupakan sumbangan nyata Muhammadiyah terhadap kemajuan dan pembinaan bangsa. Dengan pendirian panti-panti asuhan ini masyarakat sangat merasakan manfaatnya terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah anak yatim ke panti asuhan setiap tahunnya. Sedangkan bagi Muhammadiyah sendiri pendirian panti asuhan tidak terlepas dari ajaran agama dimana Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menyantuni anak-anak yatim dan Allah SWT mengkategorikan orang-orang yang tidak mau menyantun anak-anak yatim sebagai pendusta agama. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tujuan Muhammadiyah mendirikan panti-panti asuhan yaitu untuk mengasuh, merawat dan mendidik

anak-anak yatim agar kelak mereka dapat menjadi mulim yang taat kepada agama, berakhlak mulia, berpengetahuan, tangkas, dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri dan berguna bagi masyarakat dan bangsa.⁶

Dalam bidang sosial kemasyarakatan ini perhatian Muhammadiyah sangatlah besar, hal ini dapat kita lihat secara lebih jelas pada awal berdirinya, organisasi muhammadiyah meletakkan perhatian utamanya terhadap bidang kemasyarakatan dimulai dengan menetapkan suatu lembaga yang bernama Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) sebagai suatu organisasi yang memberikan bantuan bagi orang-orang miskin dan anak yatim piatu yang kemudian namanya dirubah menjadi Pembina Kesejahteraan Umat. Sebagai lembaga yang membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal pelaksanaan program sosial kemasyarakatan adalah penyelenggaraan amal usaha serta tugas pekerjaan persyarikatan dalam bidang kesejahteraan sebagai sarana dakwah. Adapun tugas lembaga ini sebagai berikut : *Pertama*, usaha pelayanan dan bimbingan kesejahteraan sosial antara lain anak-anak yatim piatu, fakir miskin, orang jompo, penderita cacat dan tuna sosial lainnya serta memberikan bantuan bagi korban bencana alam. *Kedua*, usaha-usaha pelayanan dan bimbingan kesehatan seperti pendirian rumah sakit, pendirian rumah sakit bersalin, pendirian rumah bersalin, pendirian balai pengobatan dan penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, usaha-usaha kesejahteraan keluarga yang meliputi perencanaan keluarga. *Keempat*, usaha-usaha lain dalam bidang kesejahteraan sosial. *Kelima*, kegiatan pendidikan, kursus, latihan para petugas PKU dan pengabdian masyarakat pada umumnya yang berminat. *Keenam*, membina kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah untuk

⁶ Bakhrum Yunus, *op.cit.*, hlm. 142-144.

diikutsertakan dalam usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. *Ketujuh*, membina pelaksanaan rasa solidaritas, saling menjamin, saling mencukupi antar sesama anggota masyarakat antara lain dengan melaksanakan jaminan sosial bersama asuransi sosial. *Kedelapan*, memimpin pelaksanaan kemasyarakatan seperti zakat fitrah, kurban, khitanan, penyantunan jenazah.⁷

Dalam aktivitasnya memberikan penyantunan terhadap anak-anak terlantar Muhammadiyah menerapkan metode yang dilaksanakan dalam tiga jenis yaitu : *Pertama*, sistem asuhan keluarga adalah seorang atau dua orang anak diasuh oleh satu keluarga muslim yang bertindak sebagai keluarga pengasuh. *Kedua*, sistem santunan keluarga adalah ketika anak yang diasuh tetap berada dalam lingkungan orang tuanya namun mereka mendapat bantuan / santunan dari Muhammadiyah. *Ketiga*, sistem panti asuhan adalah ketika anak asuhan ditampung dalam satu tempat dan disitu diberikan pelayanan pengasuhan bagi mereka untuk jangka waktu tertentu⁸.

Dalam hubungannya dengan program kemasyarakatan lebih lanjut Muhammadiyah melalui Majelis PKU mendirikan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang tujuannya antara lain meningkatkan keadaan kesehatan wanita yang sebaik-baiknya selama masa hamil, melahirkan, sesudah melahirkan dan meningkatkan kesehatan bayi dan anak melalui peningkatan gizi dan perlindungan terhadap infeksi serta meningkatkan kesehatan

⁷Weinata Sairin, MTH., *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 72-73.

⁸*Ibid*, hlm. 73.

keluarga dengan memantapkan perencanaan keluarga yang sesuai dengan tuntunan Islam.⁹

Selain mendirikan berbagai macam sarana diatas bagi pembangunan masyarakat, Muhammadiyah juga membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Hibul Wathan, Aisyah, Nahdatul Aisyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Organisasi Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Bela diri Muhammadiyah. Semua organisasi ini memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Gerakan kepanduan Muhammadiyah, organisasi Hizbul Wathan mulanya didirikan oleh Kiyai haji Ahmad Dahlan setelah melihat banyaknya manfaat yang diberikan oleh gerakan seperti ini dimana di samping latihan kepanduan yang biasa, pandu-pandu Muhammadiyah itu diberikan juga pelajaran-pelajaran agama serta latihan dalam berorganisasi pada umumnya untuk mempersiapkan mereka pada tuntutan yang diperlukan apabila mereka dewasa nanti dan bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. Mulanya organisasi ini merupakan bagian dari Departemen Pendidikan Muhammadiyah. Perluasannya kepada beberapa tempat di Jawa menyebabkan kongres Muhammadiyah tahun 1926 memutuskan untuk membentuk departemen yang khusus bagi gerakan kepanduan yang dinamakan majelis Hizbul Wathan dan sekitar dua tahun kemudian cabang-cabang Hizbul Wathan didirikan di Luar Jawa, enam belas orang wakil dari Sumatera tinggal di Yogyakarta setelah berakhirnya kongres ke-17 Muhammadiyah pada tahun 1928 untuk mempelajari dan mendapat latihan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan

⁹*Ibid, hlm. 74.*

Hizbul Wathan. Merekalah yang merupakan pelopor-pelopor Hizbul Wathan untuk daerah mereka masing-masing.¹⁰

Organisasi Hizbul Wathan yang didirikan di daerah Aceh merupakan organisasi kepanduan dimana peranannya dalam masyarakat Aceh ikut berkecimpung dalam mengatasi keadaan sosial seperti membantu orang yang mengalami kecelakaan, menolong orang hanyut, pingsan dan sebagainya serta melakukan kegiatan dalam bidang olah raga. Selain melakukan kegiatan olah raga dan kepanduan anggota Hibul Wathan juga melakukan kegiatan-kegiatan amal seperti bergerak dalam mengumpulkan dana serta barang-barang bekas yang nantinya akan disumbangkan kepada fakir miskin, kegiatan ini terutama sekali dilakukan dalam bulan ramadhan dan dalam rangka merayakan hari-hari besar Islam. Organisasi hibul wathan ini juga tidak saja bergerak dibidang kepanduan tetapi juga melakukan dakwah keliling kampung menggembelng anak-anak muda agar mereka sadar terhadap ajaran Islam yang murni.

Organisasi wanita dari Muhammadiyah bernama Aisyiah adalah juga merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan sebagai salah satu tumpuan kegiatan Muhammadiyah. Organisasi Aisyiah ini berdiri beberapa waktu setelah Muhammadiyah hadir yang diperkenalkan oleh seorang wanita yang bernama Rahmah El Yunusiah seorang pemimpin pesantren wanita di Minang Kabau ketika ia datang ke Aceh untuk mengumpulkan sumbangan atau dana bagi pembangunan pesantren yang roboh akibat gempa besar pada tahun 1926. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan adalah memberi santunan terhadap anak yatim, melakukan dakwah-dakwah

¹⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 91-92.

keliling dan tabligh, memberikan kursus-kursus kepandaian putri, masak memasak, kursus kesejahteraan keluarga, membantu Muhammadiyah dalam bidang pembangunan gedung-gedung sekolah dan bidang-bidang lainnya.

Sebagai organisasi wanita, organisasi Aisyiah menekankan sekali pentingnya kedudukan wanita sebagai ibu. Menurut Aisyiah bahwa oleh karena pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak adalah di rumah, maka wanita-wanita yaitu ibu-ibu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk kemajuan masyarakat melalui asuhan dan didikan terhadap anak-anaknya sendiri. Lebih lanjut ia berpendapat seorang anak perempuan mudah saja dikirim ke sekolah untuk latihan dan pelajaran di samping latihan dan pelajaran yang diperolehnya di rumah, akan tetapi wanita yang telah dewasa apalagi pada masa permulaan berdirinya Aisyiah itu hanya mungkin dilatih dengan kerelaan dan kemauan dari saudara-saudaranya wanita sesama muslim untuk kehidupan mereka sebagai ibu sehingga demikianlah dirasa perlunya organisasi Aisyiah itu didirikan.¹¹

Organisasi Aisyiah juga memberikan perhatian kepada anak-anak perempuan remaja sehingga akhirnya didirikan pula suatu organisasi Nasyiatul Aisyiah. Organisasi ini pada awalnya lahir di Yogyakarta pada tahun 1931 dan beberapa tahun kemudian hadir di Banda Aceh, Sigli dan kota-kota lainnya di daerah-daerah Aceh. kegiatan yang dilakukan antara lain memberikan kursus agama kepada para anggota, menyelenggarakan kegiatan kesenian yang berafaskan Islam, mengadakan bazar, restoran amal untuk mendapatkan dana bagi keperluan organisasi. Kehadiran organisasi Nasyiatul Aisyiah ini cukup mendapat respon yang positif dari masyarakat dan banyak

¹¹ *Ibid*, hlm. 90.

menarik minat tidak sedikit kaum muda serta kehadirannya dianggap sebagai terobosan dalam bidang pendidikan dan pembimbingan para wanita muda.

Selain melakukan berbagai kegiatan dan mendirikan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah juga memprogramkan peningkatan perhatian terhadap masalah sosial budaya seperti kesenian, perubahan budaya masyarakat, gaya hidup dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi perkembangan masyarakat yang disertai upaya pengembangan budaya Islam.

Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Aceh dominan beragama Islam. Islam sebagai agama pada masyarakat Aceh sudah diperkenalkan pada abad pertama hijriah dan agama Islam yang masuk ke Aceh ini Islamnya terlebih dahulu tersebar dan beradaptasi dengan unsur-unsur di daerah Persia dan Gujarat tempat dimana kerajaan Islam yang pertama berada. Dengan masuk dan berkembangnya Islam di Aceh menjadikan rakyat Aceh secara keseluruhan sebagai penganut agama Islam. Oleh karena Islam yang masuk ke Aceh telah berbaur dengan unsur-unsur budaya Persia dan India sehingga telah memberi corak tersendiri terhadap budaya dan agama di Aceh.¹² Hal yang demikian ini juga menyebabkan tatanan hidup serta kebudayaan masyarakat Aceh berdasarkan ajaran dan tuntunan agama Islam.

Oleh karena adanya pengaruh agama Islam yang sangat kuat menyebabkan pola pikir, sikap dan prilaku masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari sedapat mungkin disesuaikan dengan

¹² Rusdi Sufi, *Karakteristik Islam di Aceh Pada Abad XIX*, dalam M. Hakim Nyakpha dan Rusdi Sufi, *Adat dan Budaya Aceh*, (Banda Aceh, BKSNT Banda Aceh, 2000), hlm. 2.

kaidah-kaidah menurut ajaran Islam demikian pula kiranya dengan praktek keagamaan disesuaikan pula dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku. Hal ini tampak dalam kehidupan sosial/ budaya masyarakat yang tercakup berbagai unsurnya telah diwarnai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian Islam telah dijadikan dasar budaya keacehan dan didalam budaya keacehan ini adat telah menjadi suatu yang susah dipisahkan dengan agama, diantara keduanya telah menyatu sebagaimana tercermin dalam ungkapan Aceh “*adat ngon hukom hanjeut cree lagee zat ngon sifeu*” artinya adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti unsur dengan sifatnya.¹³

Kebudayaan Aceh yang Islami adalah merupakan akumulasi dari berbagai subsistem budaya yang dibangun dari subsistem budaya Aceh pra Islam lewat akulturasi budaya. Budaya Aceh pra Islam merupakan akumulasi dari peradaban dan budaya yang lebih tua serta berkembang mengikuti proses perubahan sosial yang terjadi didalam dan sekitarnya¹⁴

Pada saat Islam pertama sekali diperkenalkan kepada masyarakat Aceh, adat dan budaya Hindu menjadi bagian dari budaya Aceh yang kemudian sukar dipisahkan dengan sistem sosial yang baru yang diperkenalkan. Oleh sebab itu dalam budaya keacehan yang Islami masih ditemukan beragam perilaku sosial atau ritus dan ritual-ritual tertentu yang referensinya sukar dicari dalam sumber Islam itu sendiri.¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm.2.

¹⁴ Bahrein T. Sugihen, *Muhammadiyah Dalam Kultur Keacehan*, dalam Zamroni Mashuda, dkk, *Muhammadiyah Dalam perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira',1995), hlm. 137.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 139.

Reaksi terhadap permasalahan ini menimbulkan munculnya berbagai gerakan pembaharuan dengan tujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan memerangi perilaku atau ritual keagamaan yang dianggap menyimpang dari agama. Salah satunya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan modernist Islam yang mencoba memperkenalkan pembaruan pemikiran lewat ijtihad dan berupaya memerangi bid'ah, takhyul dan kurajat serta perilaku keberagaman yang menyimpang dari ajaran Alqur'an dan hadist. Bahkan Muhammadiyah juga melahirkan aksi-aksi kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang mempermudah umat Islam dalam menggadopsi piranti modernisasi dengan besar sehingga dapat dipergunakan dalam membina suatu kehidupan yang serasi dan harmonis sebagai manifestasi dari keimanan dan ketagwaan kepada Allah subhanahu wata'ala.¹⁶

Hal-hal di atas sebenarnya tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang relatif cukup panjang yang menyebabkan budaya Aceh yang Islami mengalami berbagai perubahan karena adanya kontak budaya yang luas. Penyebaran agama Islam keberbagai penjuru dunia telah bersinggungan dengan berbagai sistem budaya yang melahirkan akulturasi budaya yang majemuk dan melahirkan berbagai perilaku keagamaan yang dianggap telah menyimpang dari apa yang diajarkan lewat Al-qur'an dan Hadist. Demikian pula halnya dengan adat istiadat masyarakat yang berkaitan erat dengan agama menyebabkan ajaran agama dan adat istiadat sukar untuk dibedakan, begitu juga dengan kaidah Islam yang sudah menjadi bagian dari adat atau yang telah diadatkan. Berbagai upacara-upacara yang dikaitkan dengan tradisi atau adat istiadat dan agama masih ditemukan diberbagai tempat di Aceh

¹⁶ *Ibid*, hlm. 141.

dan telah membudaya dalam kehidupan umat Islam. Bahkan kerana kepentingan tertentu hal-hal yang pernah dianggap tidak baik dilakukan suatu saat dianggap relevan untuk dilakukakan lagi seperti menjadikan hari-hari besar agama setiap tahun sebagai upacara besar-besaran.¹⁷ Diantara upacara-upacara yang berkaitan dengan adat dan agama misalnya antara lain : 1. *Peusijuek*, merupakan rangkaian upacara tepung tawar bagi seseorang atau benda pada acara tertentu dengan tujuan untuk melahirkan rasa optimis dengan mengharapkan sesuatu yang lebih baik dan untuk mendapatkan berkah serta mengharapkan ridha Allah SWT. Upacara *peusijuek* ini dilakukan atas orang atau barang yang bersangkutan dengan tepung tawar yang dicampur air dingin dengan cara diretik, kemudian ditaburi sedikit beras padi dan mempergunakan pohon-pohon kecil tertentu yaitu *sidingin* (*sisijuek*) dan *manèk manoe* yang ditambahi dengan *naleuengsambo* (sebangsa rumput). Umumnya upacara *peusijuek* yang dilakukan oleh masyarakat ini merupakan manifestasi dari kebudayaan yang berafaskan Islam yang telah tumbuh dan berkembang serta diwariskan secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak berdirinya kerajaan Aceh Darussalam di awal abad XVI; 2. *Kenduri sawah*, merupakan rangkaian upacara yang dilaksanakan di sawah pada saat padi sedang muda yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada hambanya; 3. *Kenduri Laot*, merupakan upacara yang dilaksanakan menjelang musim timur atau ketika musim barat akan berakhir pada hari selain hari jum'at yang dilaksanakan setahun sekali dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan bulan atau waktu yang tepat untuk melaksanakan kenduri laot yang dilaksanakan oleh panglima laot selaku pimpinan masyarakat nelayan. Upacara kenduri laot

¹⁷ *Ibid*, hlm. 139.

dilaksanakan sehubungan dengan turunnya para nelayan ke laut dengan maksud agar selama mereka pergi ke laut mendapat keselamatan dan rezeki yang melimpah serta menjauhkan mereka dari mara bahaya serta untuk menghindarkan atau menjauhkan diri dari gangguan roh jahat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Upacara kenduri laot setiap tahun dilaksanakan dan telah menjadi bagian dari adat istiadat dikalangan masyarakat nelayan di Aceh; 4. Maulud Nabi, merupakan upacara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad yang diperingati dengan melakukan kenduri secara besar besaran pada tiap-tiap gampong di Aceh dan apabila sebuah gampong tidak melakukannya maka akan menjadi sebuah aib. Upacara ini diadakan pada siang hari dengan pusat kegiatan di meunasah. Penduduk laki-laki dari gampong lain biasanya tetangga gampong yang bersangkutan diundang datang untuk makan kenduri bersama. Diantara mereka ada yang khusus diundang untuk membaca barzanzi, marhaban yang dalam istilah aceh disebut *dieke maulud* (zikir maulid). Upacara ini mendapat tempat istimewa dalam masyarakat Aceh karena mereka menganggapnya sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini mungkin disebabkan bahwa dengan mengingat dan berselawat kepada nabi sebagai konsekuensinya Nabi pun sebaliknya tidak akan melupakan individu yang berselawat dengan memberi syafaat di hari akhirat. Oleh karena dianggap pentingnya upacara ini, maka sistem kalender Aceh bulan maulid dijadikan tiga bulan berturut-turut, yaitu *molod awai* (maulid awal), *molod tengoh* (mouldid tengah), dan *molod akhe* (maulid akhir). Selama jangka waktu tiga bulan tersebut tetap ada kreativitas masyarakat dalam merayakan upacara Maulid tersebut¹⁸; 5. upacara kematian, dalam pelaksanaan upacara kematian umumnya masyarakat

¹⁸ Rusdi Sufi, *op.cit.*, hlm.17.

Aceh melakukannya menurut ketentuan Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hukum Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya sesungguhnya sudah ditambah lagi dengan tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat, seperti pada saat memandikan jenazah selain air juga digunakan sabun atau air jeruk purut (*boh kruet*) dan daun sijaloh dengan meremas-remasnya dalam air yang digunakan untuk satu dari keenam kali pembasuhan. Begitu pula dengan upacara penangisan jenazah (*pemoe bae* yaitu menangis secara meratap) pada saat jenazah diletakkan hendak dibawa ke kubur. Selain itu ada pula yang melakukan begitu iring-iringan pengantar jenazah meninggalkan rumah semua pakaian milik orang yang telah meninggal tersebut diletakkan di atas tempat tidur dan ditaburi bunga yang wangi dan pakaian tersebut dibiarkan disitu selama 44 atau 100 hari dan dibawah tempat tidur selalu diletakkan sebuah bejana yang penuh air untuk menghilangkan rasa haus aruah orang yang meninggal tersebut. Dengan demikian, menurut kepercayaan masyarakat, roh orang yang meninggal itu masih ada di dalam rumah selama jangka waktu tertentu setelah meninggal. Setelah itu juga dilakukan kenduri-kenduri bagi mereka yang telah kembali dari kubur dan kenduri-kenduri berikutnya yang diadakan di rumah duka dihitung sejak hari kematian, mulai dari pertama sampai sepuluh diadakan pembacaan doa setiap malamnya dilanjutkan dengan kenduri hari ketiga, kelima, ketujuh, kesepuluh yang diadakan agak besar serta hari ketiga puluh, keempat puluh, keseratus dan tahun kematian juga diadakan kenduri dimana orang-orang sekampung juga diundang¹⁹; 6. upacara-upacara lainnya yang berkaitan dengan adat/tradisi dan kepercayaan/agama.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20-21.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang mempunyai tujuan utama melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam menentang keras terhadap hal-hal yang dianggap telah jauh menyimpang dari Alqur'an dan hadist. Muhammadiyah beranggapan bahwa upacara-upacara atau kenduri-kenduri sebagaimana tersebut diatas telah mengandung unsur kesyirikan, karena dalam upacara-upacara tersebut orang memohon berkah, lindungan dan sebagainya tidak langsung kepada Allah melainkan kepada atau melalui laut, gunung, sawah dan sebagainya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh seorang informan :

“Upacara-upacara seperti *peusijuek* sebenarnya sudah mengandung unsur sirik karena sudah menilahkan *peusijuek* ini sendiri, seperti misalnya ada kata-kata “*nyoe mudamudahan ngon ta peusijuek nyoe dron beuseulamat geujak ue haji, beumabrur haji drön, beutröh drön jak beutröh drön woe*”. Hal ini sama dengan merokok, misalnya dengan mengatakan “saya tidak bisa kalau tidak merokok, karena saya tidak punya inspirasi”. Ini sudah mengandung sirik karena sudah mengilahkan merokok. Jadi sebenarnya kalau ingin merokok hanya tidak untuk maksud apa-apa, ini boleh saja tidak apa-apa. Tetapi jangan untuk inspirasi. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya steril betul, tidak boleh begitu-begitu. Soal aqidah ya aqidah, soal ubudiyah ubudiyah, soal akhlaq akhlaq, soal muamalah “*hantum aklamu.....*”, yaitu kamu lebih tahu tentang dunia kamu kata Nabi. Begitu pula dengan syariat Islam, sebenarnya yang dikatakan Islami itu apa, apakah *peusijuek* itu Islami, tulisan-tulisan bahasa Arab itu Islami. Jadi orang melestarikan syariat Islam itu seperti itu, padahal yang dikatakan syariat itu yang penting bagaimana membangun akhlaq. Benar-benar akhlaq takut kepada Allah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, bukan takut kepada manusia. Begitu pula

dengan zikir-ziki maulud dimana puncak zikir yaitu orang berdiri lalu dalam keadaan berdiri mereka merasakan atau menganggap Nabi datang untuk menghadiri peringatan maulud itu. Itu sebenarnya sudah diluar kalimat shahadat, sudah sirik. Nabi itu manusia dan kalau sudah meninggal tidak mungkin datang lagi ke dunia ini. Maka itu sangat salah orang menganggap Nabi datang atau hadir. Sebenarnya Muhammadiyah sama dengan faham safi'i, seperti dalam memperingati kematian. Malam pertama, ketiga yaitu malam ganjil diadakan tadarus (membaca doa, mengaju, tahlil) dan kenduri di rumah orang meninggal itu menurut safi'i sangat dilarang, karena itu sama saja dengan kita memakan bangkai saudara kita yang sudah meninggal jika kita makan di rumah orang yang meninggal itu. Menurut Muhammadiyah sebelum orang meninggal kita membaca yasin, bukan sesudah orang meninggal ada pembacaan yasin. Itulah Muhammadiyah berbenturan terus dengan paham-paham seperti ini".²⁰

Hal-hal diatas jika dikaitkan dengan kebiasaan dan pandangan masyarakat, ini merupakan suatu hal yang sudah menjadi budaya. Dalam hal ini Muhammadiyah beranggapan bahwa sebenarnya budaya itu boleh-boleh saja, akan tetapi kebudayaan itu janganlah menginterfensi aqidah. Inilah benturan-benturan bagi Muhammadiyah dan menjadi tugas bagi Muhammadiyah serta cita-cita Muhammadiyah agar supaya umat Islam dapat melaksanakan ajaran Islam dengan semurni-murninya.

²⁰ Wawancara dengan Imam Syuja' pada hari Senin tanggal 25 Maret 2002 pukul 9.00 WIB bertempat di Banda Aceh.

BAB V

KESIMPULAN

Muhammadiyah pada awal kehadirannya di Aceh dikenal mempunyai suatu ciri khas tersendiri yaitu dengan terlibatnya organisasi ini dalam bidang politik seperti yang telah dikemukakan pada bab terdahulu. Ciri khas itulah yang tidak dimiliki oleh daerah lain misalnya di Jawa sebagai tempat lahirnya Muhammadiyah atau pun Minangkabau sebagai daerah yang membesarkan Muhammadiyah yang lebih menitikberatkan pada masalah sosial keagamaan sehingga warna Muhammadiyah di Aceh memiliki model tersendiri.

Pada awal perkembangannya Muhammadiyah mendapat dukungan dari elite adat dengan terlibatnya Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong sebagai Konsul Muhammadiyah yang pertama dan diteruskan oleh Teuku Cut Hasan anggota keluarga *uleebalang* Meuraksa. Meskipun sebagian besar anggota Muhammadiyah adalah bukan orang-orang Aceh. Namun golongan lain yang ada saat itu yaitu dari golongan elit agama tidak menyambut dengan baik seperti yang dilakukan oleh kelompok elite adat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut menyebabkan Muhammadiyah dalam perkembangan gagasan dan organisasi di

Aceh menjadi lamban. Di kalangan masyarakat luas, apalagi di pedesaan, gagasan dan lembaga yang modernist seperti ini kurang terdengar gaungnya. Walaupun Muhammadiyah pernah beberapa kali menyelenggarakan konggresnya di Aceh sebelum masa Perang Dunia II. Kelambanan organisasi ini untuk diterima disebabkan oleh bebarapa hal. Misalnya pada awal kehadirannya organisasi ini dilihat sebagai kumpulan orang-orang sekolahan dan perantau sedangkan kondisi masyarakat pedesaan waktu itu belum terpelajar. Di samping itu Muhammadiyah juga memperbolehkan anggota atau pengurusnya untuk menjadi anggota atau pengurus dalam oeganisasi keagamaan (Islam) yang lain sekalipun organisasi tersebut belum tentu sejalan dengan organisasi Muhammadiyah.

Selanjutnya kurang diterimanya Muhammadiyah waktu itu dapat dimaklumi karena faham yang dibawa oleh Muhammadiyah yaitu kembali untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh bid'ah dan khurafat dan kembali pada Al-Quran dan Hadits sebagai dasar dan tolok ukur dalam pemurnian agama Islam. Selain itu Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk menjalankan *amar makruf nahi munkar* (menyeru kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar). Sehingga pada awal kehadirannya Muhammadiyah sempat mendapat julukan sebagai "*kristen halus*".

Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah yang berhadapan dengan berbagai masalah internal maupun eksternal . Masalah internal terwujud dalam bentuk masalah dalam organisasi Muhammadiyah sendiri. Misalnya pada waktu tingkat kepercayaan anggota Muhammadiyah terhadap pendidikan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah menurun di mana banyak anggota Muhammadiyah yang tidak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Muhammadiyah sehingga banyak sekali sekolah

Muhammadiyah yang terpaksa tutup karena kekurangan murid. Masalah eksternal yang dihadapi oleh Muhammadiyah adalah masalah yang berhadapan dengan misi pembaharuan Islam yang dibawanya kadang-kadang berbenturan dengan nilai adat yang telah berbaur dengan nilai ritual keagamaan yang menyatu dengan kebiasaan masyarakat Islam yang telah lebih dulu ada.

Dalam bidang politik khususnya Pemilu tahun 1971 Muhammadiyah pernah ditinggal oleh anggotanya karena adanya tekanan dari pihak lain yang memaksakan kehendak untuk memilih dalam suatu golongan tertentu. Disinilah keberadaan Muhammadiyah kembali diuji untuk tetap bertahan meskipun dalam situasi yang paling berat sekalipun.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih banyak terjun dalam bidang politik, Muhammadiyah lebih banyak bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang hasilnya baru dapat dinikmati dalam waktu yang cukup panjang. Gejala yang sering timbul dalam bidang teologi dapat diimbangi oleh Muhammadiyah dalam kiprahnya dibidang dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Kiprah Muhammadiyah di Aceh telah membawa manfaat yang besar dan melalui pendidikan Muhammadiyah yang telah tersebar dimana-mana menunjukkan betapa konsistennya organisasi ini terhadap peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Di samping itu pembangunan rumah ibadah yang secara khusus di bawah kelolaan Muhammadiyah merupakan momentum kukuh sebagai basis pergerakan yang beridentitas Islam. Sehingga dari sistem pendidikan yang telah dikembangkan oleh Muhammadiyah dapat melahirkan sosok insan yang didambakan yaitu "alim, intelek,

muslim yang seimbang iman dan ilmunya, orang yang kuat rohani dan jasmaninya.

Dalam konteks kekinian keberadaan Muhammadiyah semakin ditantang dalam menegakkan pemberlakuan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah yang sampai detik ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Muhammadiyah memerlukan pendistribusian pemikiran dari para anggotanya baik yang berasal dari tokoh masyarakat, agama, akademik maupun elemen mahasiswa untuk memberikan kontribusi ide-ide sekaligus dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Mahmudah, *Islam in Pacus*. (Indianapolis : American Trust Publication, 1975).
- Abubakar, Said, *Berjuang untuk Daerah*, (Banda Aceh: Yayasan Nagasakti, 1995).
- Ahmad Tafsir,” Pendidikan : Alternatif Pembaruan Muhammadiyah”. dalam Usman Yatim, *Muhammadiyah dalam Sorotan*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1993).
- Akbar, Ali. H., *Tuhan dan Manusia*, (Jakarta : Grafikatama, 1990).
- Alfian, “Peranan Muhammadiyah dalam Pergerakan Nasional dan Kemungkinan Masa depannya”, dalam *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Panjimas, 1981).
- _____, “Peranan Muhammadiyah Dalam Pergerakan Nasional dan Kemungkinan Masa depannya”, dalam *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta : Panjimas).

Alfian, Teuku Ibrahim, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: PDIA, 1999).

Asrofie. M. Yusron, *Kyai Haji Ahmad Dahlan, Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta : Yogyakarta Offset, 1983).

Baharuddin Yahya. “Muhammadiyah dalam Konstalasi Politik Nasional”. dalam Zamroni Mashuda, dkk, *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. (Banda Aceh: Gua Hira, 1995).

Bakhrum Yunus. “Sejarah Singkat Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Aceh” dalam Badruzzaman (Ed.) *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995).

Budiman, Arif, “Agama, Demokrasi dan Keadilan”, dalam *Agama, Demokrasi dan Keadilan*. (Jakarta: Gramedia, 1983).

Hasil keputusan rapat Muhammadiyah pada bulan April 1922.

Hasjmy, HA., *Muhammadiyah Ibarat Pohon Beringin yang Rindang*, dalam Zamroni Mashuda, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira, 1995).

Husin, Zulkifli , “Peranan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Ummat”, dalam *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh : Penerbit Gua Hira, 1995).

Idham, *Moehammadijah Hindia Timoer Tjabang Koetaradja. Perhitoengan: Wang Keloear Dan Masoek Dalam Tahoen 1932*, (Koetaradja, 23 Februari 1933).

Iriani (Ed), *Peranan Muhammadiyah dalam Sistem Pendidikan Islam di Padang Panjang Tahun 1950-1965*, (Jakarta: Depbudpar Ditjen Sejarah dan Purbakala, 2001).

“Lahir di Yogyakarta, Minangkabau Membesarkannya”, dalam *Kompas*, Jum’at, 14 Desember 1990.

“Laporan Politik dalam Daerah Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama Tahun 1928, dalam *Seri Informasi Aceh Th. VI No. 1* Terj. Aboe Bakar, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1982).

“Laporan Politik Polisionil Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933”, dalam *Seri Informasi Aceh Th.V No. 4* Terjemahan Aboe Bakar, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1981).

Lubis, Arbiyah, “Cita dan Corak Pembaharuan dalam Gerakan Muhammadiyah dalam Zamroni Mashuda, *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira, 1995).

Majid, Nurcholis, “Menegakkan Faham Ahlussunah Wal-Jamaah Baru”, dalam *Satu Islam Sebuah Dilema*, (Bandung: Al-Mizan, 1985).

- Mochtar Buchori. "Sekolah Muhammadiyah dalam Kenangan dan Harapan" dalam Usman Yatim, *Muhammadiyah dalam Sorotan*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1993).
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Pasha, Sayed, H., "Education in Islam , Toward a New Appriach" dalam *All-Ittihad* (Jurnal, Vol. 17, No. 4, 1980).
- Piekar, A.J., *Atjeh En De Oorlog Met Japan*, (Den Haag: W. Van Hoeve, 1949).
- Remantan, *Gerakan Pembaharuan Islam di Aceh (1914-1953)*, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1986).
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Shabri A. (dkk), *Kedudukan dan Peranan Dayah di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949)*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2000).
- Sufi, Rusdi, "Perkembangan Muhammadiyah dan Kiprahnya dalam Bidang Politik pada Masa Kolonial di Aceh". dalam *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. (Banda Aceh: Gua Hira, 1995).
- _____, *Karakteristik Islam di Aceh Pada Abad XIX*, dalam M. Hakim Nyakpha dan Rusdi Sufi, *Adat dan Budaya Aceh*,(Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2000).

T. Sugihen, Bahrein, "Muhammadiyah Dalam Kultur Keacehan", dalam Zamroni Mashuda, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira, 1995)

Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: LP3ES, 1987).

Yunus, Bakhrum, *Beberapa Catatan Tentang Sejarah Awal Muhammadiyah Di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perencanaan Dan Evaluasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh, 1995).

_____, "Misi dan Strategi Muhammadiyah Dalam Upaya Penegakan Nilai-Nilai Keislaman dan Kemanusiaan" dalam Zamroni Mashuda, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh : Penerbit Gua Hira, 1995).

Yusuf, M. Yunan , "Muhammadiyah dan Politik", dalam Usman Yatim (Ed.), *Muhammadiyah dalam Sorotan*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1993).

Daftar Informan

Nama : Abdul Manaf Meuraxa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 76 tahun
Pekerjaan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cabang Aceh Selatan (1963 – 2000)
Alamat : Jln. Pendidikan No. 1 Blang Pidie

Nama : H. Imam Syuja'
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh Periode 2000 - 2005
Alamat : Jln. T. Syarief Thayeb 1 Lr. Seulanga Banda Aceh

Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh

Nama : Drs. Aslam Nur, MA
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen IAIN Ar-Raniry
Alamat : Meusara Agung, Banda Aceh

Nama : Pocut Meurah Pangkat
Umur : 67 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mantan Pengurus Aisyiah Kutaraja
Alamat : Desa Gla Meunasah Baro, Aceh Besar

**Perpustakaan
Jenderal K**

953
S